



BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rembang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang selama akhir periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi aktivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Rembang selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aspek dalam kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

2. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek, maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/Defisit;
- 5) Pembiayaan;
- 6) Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi dalam satu periode pelaporan.



b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL secara komparatif dengan periode sebelumnya terdiri dari:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (SilPA/SiKPA);
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain;
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan entitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban setiap entitas pelaporan mengelompokkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) Kas dan Setara Kas
- 2) Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- 3) Persediaan
- 4) Investasi Jangka Pendek
- 5) Investasi Jangka Panjang
- 6) Aset Tetap
- 7) Kewajiban Jangka Pendek
- 8) Kewajiban Jangka Panjang
- 9) Entitas Dana

d. Laporan Operasional

- 1) Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
- 2) Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta



daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

- 3) Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) Cakupan entitas pelaporan;
 - c) Periode yang dicakup;
 - d) mata uang pelaporan; dan
 - e) satuan angka yang digunakan.
- 4) Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - b) Beban dari kegiatan operasional;
 - c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 - d) Kegiatan Non Operasional
 - e) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa
 - f) Pos luar biasa;
 - g) Surplus/defisit-LO.
- 5) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan Saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Arus Kas Masuk dan Keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Aset Nonkeuangan, Pembiayaan dan Non Anggaran.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas



laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan runtutan sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, Undang-Undang/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan, Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 52).

C. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- Bab II Ekonomi makro dan Kebijakan Keuangan
 - A. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - B. Kebijakan keuangan
 - C. Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang



- telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan akuntansi
- A. Entitas pelaporan
 - B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- A. LRA
 - 1. Pendapatan-LRA
 - 2. Belanja
 - 3. Pembiayaan
 - B. Laporan Perubahan SAL
 - 1. Perubahan SAL
 - C. Neraca
 - 1. Aset
 - 2. Kewajiban
 - 3. Ekuitas
 - D. LO
 - 1. Pendapatan-LO
 - 2. Beban
 - 3. Kegiatan Non Operasional
 - 4. Pos Luar Biasa
 - E. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 1. Perubahan Ekuitas
 - F. Laporan Arus Kas
 - 1. Arus Kas dari Operasi
 - 2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
 - 3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 4. Arus Kas dari AKtivities Transitoris
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
- Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

A. EKONOMI MAKRO

Luas wilayah Kabupaten Rembang 101.408 Ha, merupakan wilayah kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar (46,39%) wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah, yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi. Wilayah di bagian selatan ini mempunyai ketinggian antara 100-500 meter dpl (30,42% dari total wilayah Kabupaten Rembang) dan sisanya berada pada ketinggian 0-25 m dan 500-1.000m.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Laut Jawa
2. Sebelah barat : Kabupaten Pati
3. sebelah selatan : Kabupaten Blora
4. sebelah timur : Provinsi Jawa Timur

Mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah, maka secara umum peruntukan wilayah Kabupaten Rembang dapat dibedakan menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Dari lahan pertanian tersebut dapat dibedakan kembali menjadi sawah dan bukan sawah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang Tahun 2018 (data 2016) secara garis besar luas pemanfaatan lahan adalah sebagai berikut :

1. Lahan pertanian sawah : 29.061 ha
2. Lahan pertanian bukan sawah : 52.561 ha
3. Lahan bukan pertanian : 19.767 ha.

Mengingat sebagian besar pemanfaatan lahan adalah lahan pertanian, maka potensi pertanian menghasilkan banyak komoditas, diantaranya produk tanaman pangan. Jumlah produk tanaman pangan adalah sebagai tanaman pangan padi sawah 141.902 ton, tanaman padi ladang 10.920 ton dan tanaman jagung 119.348 ton.

Berikutnya untuk tanaman palawija unggulan yang lain adalah kedelai 1.620 ton, kacang tanah 1.672 ton, kacang hijau 1.393 ton dan ubi kayu 116.272 ton.

Sedangkan untuk tanaman hortikultura, bawang merah menghasilkan 17.183 kwintal, kacang panjang 5.979 kwintal, cabe menghasilkan 58.567 kwintal dan cabe kecil sebesar 128.782 kwintal. Sedangkan tanaman buah-buahan yang utama adalah mangga dan melon yang masing-masing menghasilkan 1.143.342 kwintal dan 55.129 kwintal.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Selain hasil pertanian karena letak wilayah Kabupaten Rembang di daerah pantura, maka potensi di bidang perikanan juga menonjol, yang dapat dilihat dari jumlah produksi ikan laut tahun 2017 sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik

Kabupaten Rembang Dalam Angka 2018 sebesar 36.243.036 kg atau jika dikonversikan dengan nilai rupiah sebesar Rp.410.814.488,00.

Di sisi lain jumlah perahu penangkap ikan sebanyak 3.488 buah, dengan rincian kapal motor 350 buah, motor tempel sebanyak 3.122 buah dan perahu layar sebanyak 16 buah. Sedangkan untuk alat tangkap yang digunakan bermacam-macam yaitu mini purse seine sebanyak 464 buah, payang 56 buah, dogol 542 buah, pancing 121 buah, bubu sebanyak 634 buah, cantrang 331 buah, trammel net 1.583 buah, jaring insang 614 buah dan lampara 56 buah.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan, memperluas kesempatan kerja, mendorong kemakmuran dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan, maka diperlukan adanya alat yang dapat membantu memberikan gambaran tingkat keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi tersebut. Salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan adanya data tersebut dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu data PDRB dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan, analisa, dan evaluasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan untuk menentukan sasaran pembangunan.

b. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dalam suatu perekonomian. Yang dimaksudkan dengan sektor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap terbesar tenaga kerja. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

Struktur perekonomian di Kabupaten Rembang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, struktur perekonomian Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Rembang masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini menggambarkan keadaan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Rembang mendapatkan penghasilan atau bekerja di sektor tersebut. Namun dengan perkembangan yang terjadi saat ini, peranannya mulai mengalami penurunan seiring dengan semakin meningkatnya lapangan usaha yang lain, seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian, konstruksi, transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya, terutama dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2017 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rembang yaitu sebesar 27,86%, disusul sektor industri pengolahan sebesar 21,50%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,90%, sektor konstruksi sebesar 7,55% dan urutan kelima sektor jasa pendidikan sebesar 5,83%.

b.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang

Pertumbuhan ekonomi secara agregat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Selama periode tahun 2013-2017 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 5,43 persen dan mengalami perlambatan pada tahun 2014 menjadi 5,15 persen, terendah selama periode tahun 2013-2017. Pada tahun 2015 kembali mengalami percepatan menjadi 5,50 persen dan melambat lagi <https://rembangkab.bps.go.id> Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,22 persen. Namun, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 6,19 persen, tertinggi selama lima tahun terakhir. Percepatan perekonomian Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 disebabkan dengan kembalinya lapangan usaha pertanian mengalami percepatan, dari 1,63 persen menjadi 3,87 persen. Dengan porsi yang besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rembang (27,86 persen), meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian cukup berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang secara keseluruhan. Selain itu, didukung dengan percepatan pertumbuhan dari lapangan usaha lainnya, termasuk lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami percepatan sangat signifikan, dari 6,30 persen menjadi 20,84 persen.

PDRB per Kapita Kabupaten Rembang PDRB per kapita merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor perekonomian di suatu daerah, yang dihitung dari PDRB *ad-hoc* berlaku dan konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita dapat menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah, meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataannya.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tahun	PDRB Per Kapita (Ribu Rp)	
	Adh berlaku	Adh Konstan
2013	18.789,70	16.062,90
2014	20.879,31	16.746,18
2015	22.448,60	17.522,70
2016	23.819,76	18.293,18
2017	25.781,14	19.276,85

PDRB per kapita Kabupaten Rembang mengalami kenaikan tiap tahunnya selama kurun waktu 2013-2017. PDRB menurut harga berlaku tahun 2013 sekitar 18,79 juta rupiah dan terus meningkat hingga menjadi 25,78 juta rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2017 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Rembang mencapai 25,78 juta rupiah. Sedangkan menurut harga konstan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Rembang meningkat dari 16,06 juta rupiah menjadi 19,28 juta rupiah.

Meskipun perkembangan PDRB per kapita selalu mengalami kenaikan, yang berarti ada peningkatan pendapatan, namun belum dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk Kabupaten Rembang yang sebenarnya. Hal tersebut karena ada kepemilikan faktor produksi yang tidak hanya dimiliki oleh warga Rembang saja, tetapi sebagian juga dimiliki oleh penduduk di luar Kabupaten Rembang. Oleh karena itu PDRB per kapita Kabupaten Rembang belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Rembang.

B. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yakni :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- i. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
- j. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
- k. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
- l. Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Substansi dari tujuan utama penganggaran meliputi :

- a. Stabilitas fiskal;
- b. Alokasi sumber daya sesuai prioritas dan
- c. Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Stabilitas fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah dan jangka pendek, merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan Pemerintah Daerah, dalam kondisi dimana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhannya begitu besar. Alokasi sumber daya sesuai prioritas, perlu dibatasi dengan indikasi pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan fiskal. Dengan penetapan pagu indikatif pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran, para pelaku anggaran dapat menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai “*trade-off*” antara keputusan yang telah diambil di masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Dengan tercapainya 2 (dua) tujuan, yaitu stabilitas fiskal dan alokasi sumber daya sesuai prioritas, maka tujuan yang ketiga yakni pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien juga akan dapat dicapai.

Sejalan dengan kemampuan keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan menjalankan berbagai macam kebijakan keuangan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah serta mendorong timbulnya inovasi dan kreatifitas. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan (pendapatan), khususnya untuk memenuhi pendanaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD tersebut dilakukan melalui Pengembangan Ekonomi Rembang (PER),



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

intensifikasi sumber pendapatan yang saat ini telah disusun secara utuh dengan cara perbaikan pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana serta transparansi pengelolaan pendapatan. Selain itu dilakukan juga ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, peningkatan dana perimbangan serta penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain hal tersebut di atas kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Rembang juga dipengaruhi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru menggantikan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang lama, yaitu UU Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Dalam undang-undang yang baru, daerah diberi kewenangan yang lebih besar di bidang perpajakan dalam bentuk kenaikan tarif maksimum, perluasan obyek pajak, dan pengalihan sebagian pajak pusat menjadi pajak daerah. Salah satunya menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak kabupaten/kota. Dalam APBD Kabupaten Rembang TA 2018 ini, BPHTB dan PBB telah tercover menjadi Pajak Daerah.

Secara ringkas kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Rembang diarahkan:

- a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui pengendalian dan optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, termasuk optimalisasi penarikan PBB yang sudah menjadi kewenangan Kabupaten, serta pendayagunaan asset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dapat menghasilkan penerimaan PAD dan memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata; dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum serta dana bagi hasil
- b. Penetapan Target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing SKPD penghasil/pengelola pendapatan;
- c. Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalan sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat;
- d. Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan;
- e. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan masing-masing SKPD guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah;
- f. Menyiapkan dasar hukum, sarana prasarana dan sistem yang baik untuk memberikan kepastian hukum dan prasarana bagi semua pelaku bisnis yang hendak berinvestasi di Kabupaten Rembang;
- g. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pengelolaan pendapatan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- h. Mengupayakan koordinasi secara internal antar SKPD pengelola pendapatan daerah juga dengan pemerintah pusat terkait dengan alokasi dana perimbangan dan transfer bagi hasil;

2. Strategi dan Prioritas Pendapatan

Untuk mempercepat dan memperlancar pendapatan, arah dan kebijakan umum pendapatan daerah strategi yang menjadikan prioritas dalam rangka pencapaian peningkatan pendapatan daerah antara lain:

- a. Meningkatkan penggalan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah;
- b. Optimalisasi Dana Perimbangan, Dana Transfer Bagi Hasil dan sumber-sumber dana lain dari Pemerintah Pusat;
- c. Peningkatan kemampuan pembiayaan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta;
- d. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal;
- e. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat Kabupaten Rembang dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan terlebih dahulu memperbaiki kesejahteraannya melalui pengembangan ekonomi lokal;
- f. Pendayagunaan potensi pinjaman dan obligasi daerah serta pengembangan pembiayaan edukatif.
- g. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dengan perbaikan pengelolaan asset dan peningkatan kerjasama dengan pihak lain/ swasta baik dalam bentuk *Build Operating Transfer* (BOT) maupun kontrak konsesi.

3. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian input yang direncanakan. Penyelenggaraan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang baik. Lebih spesifik kebijakan belanja daerah Kabupaten Rembang TA 2018 didorong agar sinergis dan sinkron dengan kebijakan pemerintah melalui 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pro poor, pro job, pro growth dan pro environment, mendukung Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Transparan dan akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Secara ringkas kebijakan belanja daerah Kabupaten Rembang diarahkan:

- a. Penyediaan pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat yang semakin baik dan bermutu;
- b. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang handal dan mandiri di daerah, pertumbuhan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dengan memberi perhatian khusus pada usaha kecil, tradisional dan golongan ekonomi lemah;
- c. Pembangunan sektor pertanian terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan pangan yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, serta mampu melanjutkan proses industrialisasi yang makin terkait dan terpadu dengan sektor industri dan jasa menuju terbentuknya jaringan kegiatan agroindustri dan agrobisnis yang produktif;
- d. Pembangunan sektor industri yang mampu menjadi penggerak utama ekonomi rakyat yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang makin kukuh untuk menghasilkan barang yang bermutu, bernilai tambah tinggi, padat ketrampilan dan memihak pada industri kecil dan menengah;
- e. Pembangunan sektor produksi lainnya yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat daerah, mengurangi isolasi, dan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

melancarkan hubungan antar daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, mendorong kegiatan ekonomi lain yang terkait dengan pengembangan budaya, stabilitas sosial budaya dan politik dengan senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya dan pemanfaatannya harus efisien dan efektif untuk kelanjutan di masa yang akan datang.

Belanja daerah Kabupaten Rembang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dipecahkan dengan pengelolaan yang transparan berbasis kinerja yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi dan satuan organisasi (SKPD), program dan kegiatan, serta berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, efisien, efektif, transparan dan akuntabel meliputi antara lain:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai diarahkan untuk memenuhi gaji dan tunjangan pegawai yang sifatnya mengikat (*mandatory*).
2. Bantuan hibah diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
3. Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah. Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk bantuan umum (*block grant*) dan bantuan khusus (*specific grant*), antara lain Alokasi Dana Desa (ADD);
4. Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan, diarahkan pada sasaran secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
5. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja Langsung

- 1) Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas;
- 2) Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif;
- 3) Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di pedesaan;
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi dan kapasitas



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro

- 5) Meningkatkan efektifitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerjasama yang harmonis antara eksekutif, legislatif serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.
- 6) Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

4. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

Strategi dan prioritas pembiayaan adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan pembiayaan atas beberapa kewenangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.

Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebanan belanja pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehingga banyak daerah justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnya



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang mengalami defisit, namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah yang diharapkan dari sumber-sumber lain, seperti : masyarakat, swasta serta pemerintah pusat (APBN).

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

- a. Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah pemberian peningkatan jaminan sosial;
- b. Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah;
- c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan Dana Pinjaman.

Adapun strategi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018 diarahkan :

- a. Dari Sisi Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya.
- 2) Memperluas dan meningkatkan kerjasama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan;
- 3) Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber Corporate Social Responsibility (CSR);
- 5) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBD;
- 6) Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan model-model pembiayaan tanggung renteng;
- 7) Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat.

- b. Dari Sisi Sumber Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sumber pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Rembang;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.

Pembiayaan yang merupakan transaksi keuangan daerah dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sisi penerimaan daerah menampung sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu dan pinjaman daerah, sedangkan sisi pengeluaran daerah untuk pembayaran utang dan penyertaan modal daerah serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan.

Berikut adalah ringkasan Perubahan APBD 2018 Kabupaten Rembang :

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN	1.816.909.022.094,00	1.816.656.942.094,00	(252.080.000,00)	(0,01)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	304.351.906.094,00	304.351.906.094,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	96.286.250.000,00	96.286.250.000,00	0,00	0,00
Hasil Retribusi Daerah	22.858.499.000,00	22.858.499.000,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.679.000.000,00	17.679.000.000,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	167.528.157.094,00	167.528.157.094,00	0,00	0,00
DANA PERIMBANGAN	1.100.652.496.000,00	1.100.652.496.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	818.442.437.000,00	818.442.437.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	282.210.059.000,00	282.210.059.000,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	411.904.620.000,00	411.652.540.000,00	(252.080.000,00)	(0,06)
Pendapatan Hibah	57.708.000.000,00	57.455.920.000,00	(252.080.000,00)	(0,44)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	229.010.130.000,00	229.010.130.000,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.186.490.000,00	30.186.490.000,00	0,00	0,00
BELANJA	1.912.352.839.618,00	1.912.100.759.618,00	(252.080.000,00)	(0,01)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.091.881.145.441,75	1.091.881.145.441,75	0,00	0,00
Belanja Pegawai	668.354.042.426,75	668.354.042.426,75	0,00	0,00
Belanja Bunga	1.451.355.415,00	1.451.355.415,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	61.787.200.000,00	61.787.200.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	8.980.000.000,00	8.980.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10.765.819.900,00	10.765.819.900,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	340.042.727.700,00	340.042.727.700,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA LANGSUNG	820.471.694.176,25	820.219.614.176,25	(252.080.000,00)	(0,03)
Belanja pegawai	179.604.985.065,00	179.604.985.065,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
2	3	4	5	6
Belanja barang jasa	290.146.449.366,25	289.894.369.366,25	(252.080.000,00)	(0,09)
Belanja modal	350.720.259.745,00	350.720.259.745,00	0,00	0,00

Tabel 2.1 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

C. CAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Dari target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.816.656.942.094,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.794.911.075.230,15 atau 98,80 % dan Belanja yang direncanakan sebesar Rp. 1.561.292.212.018,00 direalisasikan sebesar Rp. 1.464.321.519.614,36 atau 93,79 %, sedangkan di kelompok Pembiayaan pada Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 108.161.445.444,00 realisasinya sebesar Rp. 108.161.445.444,40 atau 100,00 % dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 12.717.627.920,00 realisasinya sebesar Rp. 12.717.627.920,00 atau 100,00 % , untuk lebih jelasnya uraian diatas diuraikan dalam tabel berikut ini.

URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
PENDAPATAN – LRA	1.816.656.942.094,00	1.794.911.075.230,15	98,80	1.722.252.909.030,04
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	304.351.906.094,00	305.676.436.263,15	100,44	300.319.284.807,04
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	96.286.250.000,00	100.438.352.553,00	104,31	59.734.946.872,04
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	22.858.499.000,00	21.441.590.432,00	93,80	20.730.064.301,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	17.679.000.000,00	18.775.303.058,00	106,20	9.212.738.532,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	167.528.157.094,00	165.021.190.220,15	98,50	210.641.535.102,04
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.454.849.116.000,00	1.432.266.688.947,00	98,45	1.420.221.823.549,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	922.884.425.000,00	902.171.379.111,00	97,76	927.645.131.515,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	26.359.122.000,00	20.192.268.635,00	76,60	28.022.881.056,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	20.498.948.000,00	20.819.418.859,00	101,56	17.340.981.751,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	771.584.367.000,00	771.584.367.000,00	100,00	771.584.367.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	104.441.988.000,00	89.575.324.617,00	85,77	110.696.901.708,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	406.778.201.000,00	398.053.997.887,00	97,86	375.414.444.034,00
Dana Penyesuaian - LRA	406.778.201.000,00	398.053.997.887,00	97,86	375.414.444.034,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	95.000.000.000,00	105.216.144.949,00	110,75	92.803.709.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	95.000.000.000,00	105.216.144.949,00	110,75	92.803.709.000,00
Bantuan Keuangan - LRA	30.186.490.000,00	26.825.167.000,00	88,86	24.358.539.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	30.186.490.000,00	26.825.167.000,00	88,86	24.358.539.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	57.455.920.000,00	56.967.950.020,00	99,15	1.711.800.674,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
Pendapatan Hibah - LRA	57.455.920.000,00	56.967.950.020,00	99,15	1.711.800.674,00
BELANJA	1.561.292.212.018,00	1.464.321.519.614,36	93,79	1.457.482.172.598,22
BELANJA OPERASI	1.210.071.952.273,00	1.154.873.013.719,36	95,44	1.102.895.850.531,00
Belanja Pegawai	847.959.027.491,75	825.668.358.529,16	97,37	797.129.312.468,00
Belanja Barang dan Jasa	289.894.369.366,25	263.637.696.747,20	90,94	250.388.658.063,00
Belanja Bunga	1.451.355.415,00	1.468.870.443,00	101,21	0,00
Belanja Hibah	61.787.200.000,00	55.764.388.000,00	90,25	46.450.880.000,00
Belanja Bantuan Sosial	8.980.000.000,00	8.333.700.000,00	92,80	8.927.000.000,00
BELANJA MODAL	350.720.259.745,00	309.448.505.895,00	88,23	353.770.714.067,22
Belanja Modal Tanah	7.475.114.000,00	7.406.104.110,00	99,08	528.142.667,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.989.838.313,00	46.462.284.728,00	89,37	64.631.248.279,22
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.031.939.250,00	94.860.823.159,00	86,21	104.140.195.865,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	171.523.136.204,00	152.529.881.164,00	88,93	173.930.573.900,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.700.231.978,00	8.189.421.734,00	84,42	10.540.553.356,00
BELANJA TAK TERDUGA	500.000.000,00	0,00	0,00	815.608.000,00
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	815.608.000,00
TRANSFER	350.808.547.600,00	350.341.352.600,00	99,87	371.606.068.500,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	10.765.819.900,00	10.765.819.900,00	100,00	6.437.223.500,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	8.449.970.000,00	8.449.970.000,00	100,00	3.735.350.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.315.849.900,00	2.315.849.900,00	100,00	2.701.873.500,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	340.042.727.700,00	339.575.532.700,00	99,86	365.168.845.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	338.951.771.700,00	338.601.771.700,00	99,90	364.077.895.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.090.956.000,00	973.761.000,00	89,26	1.090.950.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(95.443.817.524,00)	(19.751.796.984,21)	20,69	(106.835.332.068,18)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.161.445.444,00	108.161.445.444,40	100,00	232.225.166.662,58
Penggunaan SILPA	108.161.445.444,00	108.161.445.444,40	100,00	214.495.185.982,58
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.717.627.920,00	12.717.627.920,00	100,00	8.228.389.150,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.422.000.000,00	10.422.000.000,00	100,00	8.189.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	2.256.548.000,00	2.256.548.000,00	100,00	0,00
Pembayaran utang jangka Panjang lainnya	0,00	0,00	0,00	39.389.150,00
Restitusi	39.079.920,00	39.079.920,00	100,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	95.443.817.524,00	95.443.817.524,40	100,00	223.996.777.512,58
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	75.692.020.540,19	0,00	117.161.445.444,40

Tabel 2. Capaian Kinerja APBD Tahun 2018



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN ANGGARAN KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

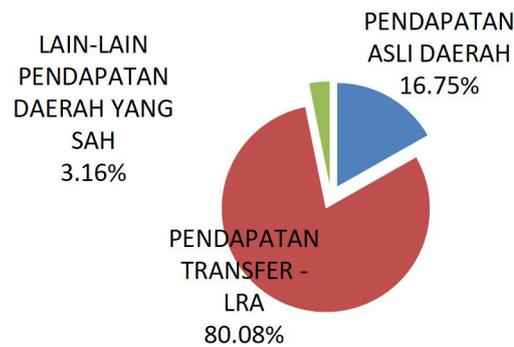
1. PENDAPATAN

Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2018 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun anggaran 2018 jumlah anggaran Pendapatan adalah senilai Rp1.816.656.942.094,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp1.785.911.075.230,15 atau menunjukkan kinerja sebesar 98,31% dari yang dianggarkan. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi senilai Rp296.676.436.263,15 atau 97,48% dibandingkan anggaran 2018 senilai Rp304.351.906.094,00 Pendapatan Transfer memberikan kontribusi senilai Rp1.432.266.688.947,00 atau 98,45% dibandingkan anggaran 2018 senilai Rp1.454.849.116.000,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi senilai Rp56.967.950.020,00 atau 99,15% dari anggaran 2018 senilai Rp57.455.920.000,00. Hal tersebut ditunjukkan dalam gambar grafik 3.1 dan 3.2 sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Capaian Kinerja Komponen Pendapatan Daerah TA 2018

Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

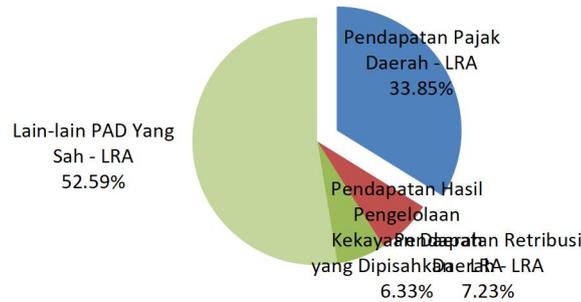


Gambar 3. 2 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018

Dari gambar 3.2 dapat dilihat bahwa Pendapatan Transfer masih merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Daerah Tahun 2018 yaitu senilai 80,08%, untuk Pendapatan Asli Daerah 16,75% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi 3,16%.

Pada Tahun Anggaran 2018 anggaran PAD adalah senilai Rp304.351.906.094,00 sedangkan realisasinya senilai Rp296.676.436.263,15 atau menunjukkan pencapaian kinerja senilai 97,48% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian Pajak Daerah menyumbang senilai Rp100.438.352.553,00 atau 104,31%, Retribusi Daerah menyumbang senilai Rp21.441.590.432,00 atau 93,80%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menyumbang senilai Rp18.775.303.058,00 atau 106,20%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menyumbang senilai Rp156.021.190.220,15 atau 93,13%, seperti gambar 3.3 sebagai berikut:

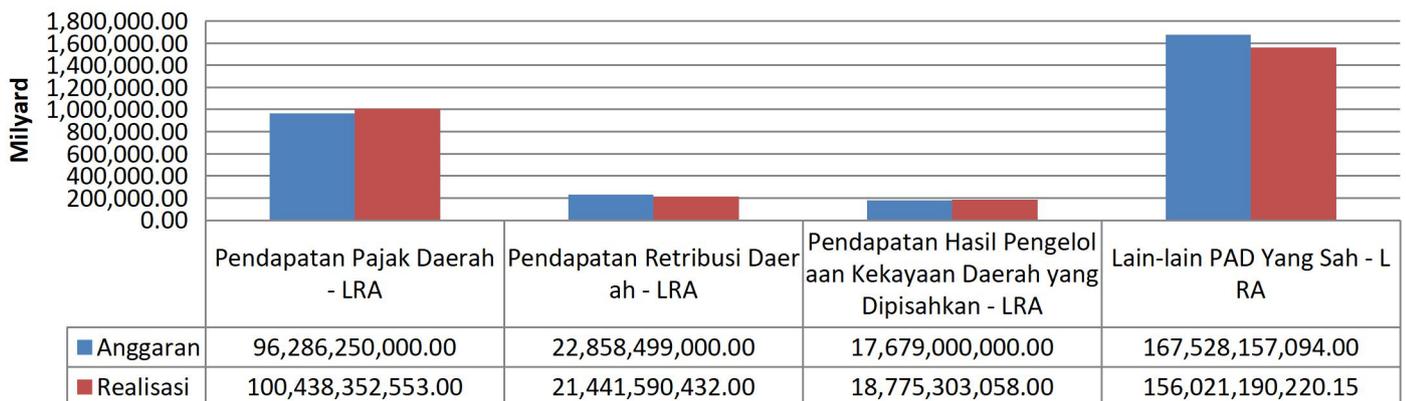
Proporsi Realisasi PAD TA. 2018



Gambar 3. 3 Proporsi Realisasi PAD TA 2018

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Rembang selama Tahun Anggaran 2018 atas perbandingannya dengan anggaran ditunjukkan dalam gambar 3.4 berikut:

CAPAIAN KINERJA KOMPONEN PAD TA. 2018



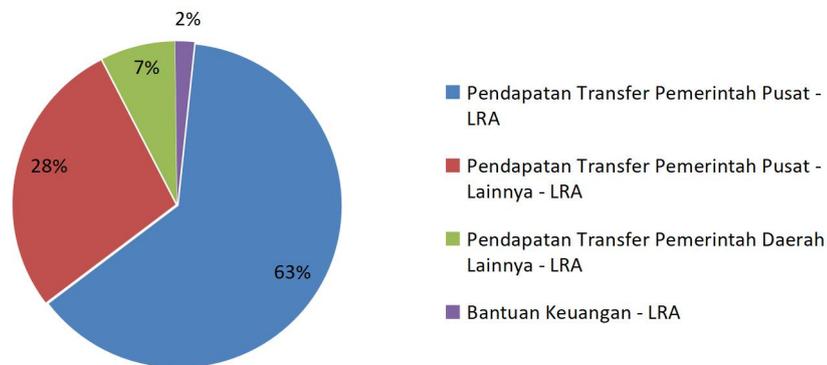
Gambar 3. 4 Capaian Kinerja PAD TA 2018

Dari grafik di atas tampak bahwa Anggaran Pendapatan Pajak Daerah adalah senilai Rp96.286.250.000,00 dengan realisasi senilai Rp100.438.352.553,00 atau mencapai kinerja 104,31%. Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah adalah senilai Rp22.858.499.000,00 dengan realisasi senilai Rp21.441.590.432,00 atau mencapai kinerja 93,80%. Anggaran pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah senilai Rp17.679.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp18.775.303.058,00 atau mencapai kinerja 106,20%. Sedangkan Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah senilai Rp167.528.157.094,00 dengan Realisasi senilai Rp156.021.190.220,15 atau mencapai kinerja 93,13%

Anggaran pendapatan transfer senilai Rp1.454.849.116.000,00 sedangkan realisasinya senilai Rp1.432.266.688.947,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 98,45% dari anggaran yang ditetapkan.

Kontribusi komponen pendapatan transfer di tahun anggaran 2018 terdiri dari transfer pemerintah pusat senilai Rp902.171.379.111,00 atau 97,76% Transfer pemerintah pusat-lainnya senilai Rp398.053.997.887,00 atau 97,86% Transfer pemerintah daerah lainnya senilai Rp105.216.144.949,00 atau 110,75% dan Bantuan keuangan senilai Rp56.967.950.020,00 atau 99,15% seperti gambar 3.5 sebagai berikut:

PROPORSI REALISASI PENDAPATAN TRANSFER TA. 2018



Gambar 3. 5 Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer TA 2018

Bila dibandingkan antara anggaran dan realisasinya maka anggaran Transfer Pemerintah Pusat adalah senilai Rp.922.884.425.000,00 dengan realisasi senilai Rp.902.171.379.111,00 atau mencapai kinerja 97,76% Anggaran Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah senilai Rp.406.778.201.000,00 dengan realisasi Rp398.053.997.887,00 atau mencapai kinerja 97,86%. Anggaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah senilai Rp95.000.000.000,00 dengan realisasi Rp105.216.144.949,00 atau mencapai kinerja 110,75% Anggaran Bantuan Keuangan adalah senilai Rp30.186.490.000,00 dengan realisasi senilai Rp26.825.167.000,00 atau mencapai kinerja 88,86% yang terlihat dalam gambar 3.6 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

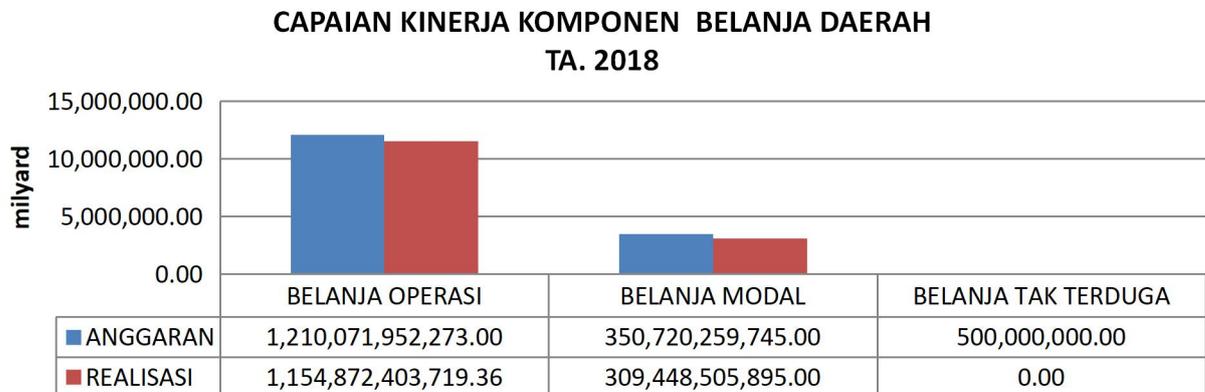


Gambar 3. 6 Capaian Kinerja Pendapatan Transfer TA. 2018

Pada tahun anggaran 2018 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan senilai Rp57.455.920.000,00 sedangkan realisasinya senilai Rp56.967.950.020,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja senilai 99,15% dari anggaran yang ditetapkan.

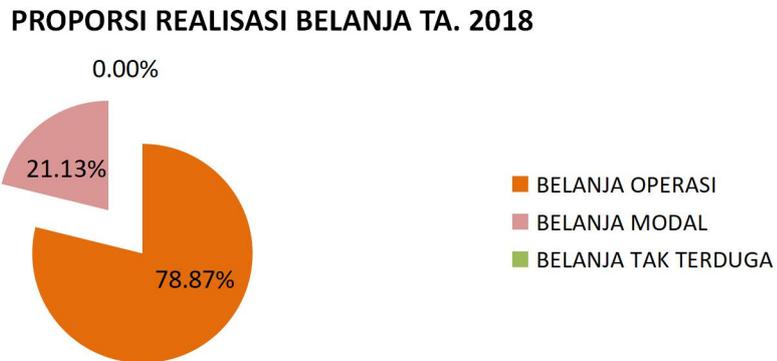
2. BELANJA

Pemerintah Kabupaten Rembang pada APBD TA. 2018 menganggarkan Belanja senilai Rp1.561.292.212.018,00 dan dapat terealisasi senilai Rp1.464.320.909.614,36 atau 93,79%. berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Anggaran dan realisasi masing-masing bagian belanja adalah sbb; Belanja Operasi dianggarkan senilai Rp1.210.071.952.273,00 dapat direalisasikan senilai Rp1.154.872.403.719,36 Belanja Modal dianggarkan senilai Rp350.720.259.745,00 dapat direalisasikan senilai Rp309.448.505.895,00 dan belanja tak terduga dianggarkan senilai Rp500.000.000,00 direalisasikan senilai Rp0,00 ditunjukkan dalam gambar 3.7 dan 3.8 sebagai berikut:





Gambar 3. 7 Capaian Kinerja Komponen Belanja Daerah TA 2018



Gambar 3. 8 Proporsi Realisasi Belanja Daerah TA 2018

2.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA DAERAH

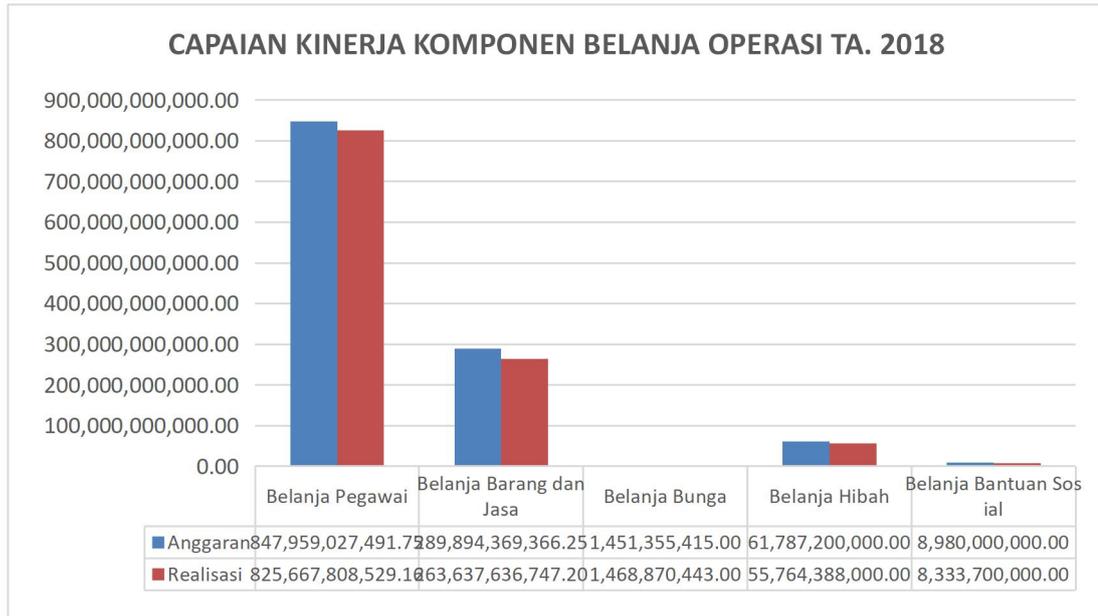
2.1.1. Belanja Operasi

Perbandingan kinerja pos-pos belanja operasi tahun anggaran tahun 2018 terdiri dari belanja pegawai dianggarkan Rp847.959.027.491,75 dapat direalisasikan senilai Rp825.667.808.529,16 atau 97,37%, belanja barang dan jasa dianggarkan Rp289.894.369.366,25 dapat direalisasikan senilai Rp263.637.636.747,20 atau 90,94% , belanja bunga dianggarkan Rp 1.451.355.415,00 dapat direalisasikan senilai Rp1.468.870.443,00 atau 101,21%, belanja hibah dianggarkan Rp61.787.200.000,00 direalisasikan senilai Rp 55.764.388.000,00 atau 90,25% dan belanja bansos dianggarkan Rp8.980.000.000,00 terealisasi senilai Rp8.333.700.000,00 atau 92,80%hal ini dapat dilihat dari gambar 3.9 dan 3.10 sebagai berikut



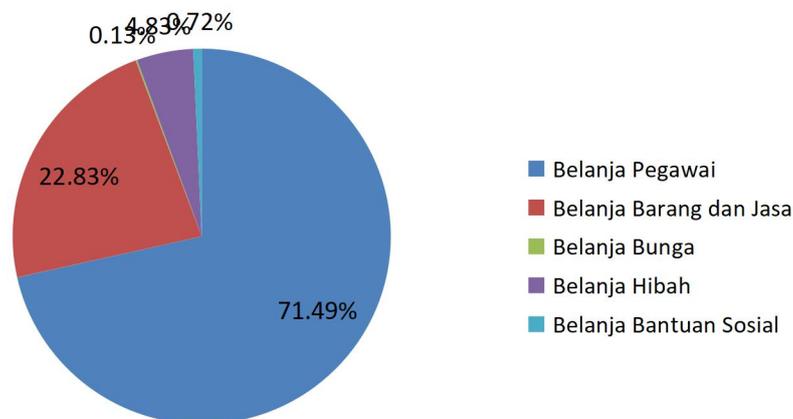
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017



Gambar 3. 9 Capaian Kinerja Komponen Belanja Operasi TA. 2018

PROPORSI REALISASI BLJ. OPERASI TA. 2018

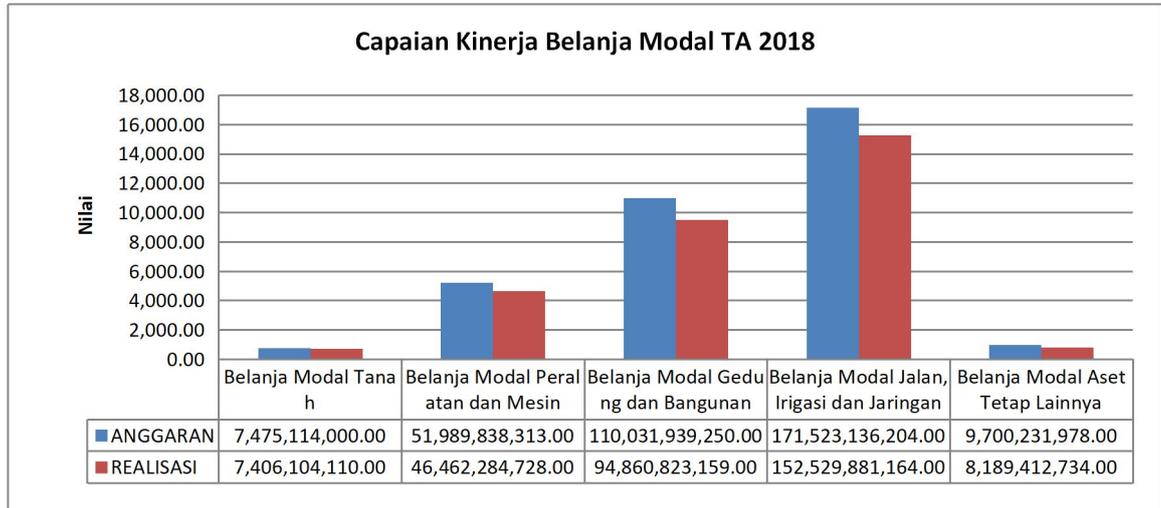


Gambar 3. 10 Proporsi Realisasi Belanja Operasi TA. 2018

2.1.2. Belanja Modal

Belanja Modal terbagi menjadi beberapa komponen antara lain Belanja Modal Tanah dianggarkan Rp7.475.114.000,00 terealisasi senilai Rp7.406.104.110,00 atau 99,08% Peralatan dan Mesin dianggarkan Rp51.989.838.313,00 terealisasi senilai Rp46.462.284.728,00 atau 89,37% Gedung dan bangunan dianggarkan Rp110.031.939.250,00 terealisasi senilai Rp94.860.823.159,00 atau 86,21%, Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan Rp171.523.136.204,00 terealisasi Rp152.529.881.164,00 atau 88,93% dan Belanja Modal Aset tetap lainnya

dianggarkan Rp9.700.231.978,00 terealisasi senilai Rp8.189.412.734,00 atau 84,42% dapat di jelaskan dalam gambar 3.11 sebagai berikut:



Gambar 3.11 Capaian Kinerja Belanja Modal TA. 2018

2.1.3. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga Tahun Anggaran 2018 dianggarkan senilai Rp500.000.000,00 terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%

3. TRANSFER

Pada tahun anggaran 2018 jumlah anggaran transfer adalah senilai Rp350.808.547.600,00 dengan realisasi Rp350.341.352.600,00 atau 99,87% Realisasi transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan senilai Rp10.765.819.900,00 (100,00%) dan Transfer Bantuan Keuangan senilai Rp339.575.532.700,00 (99,86%). Kontribusi masing-masing komponen ditunjukkan oleh gambar berikut:



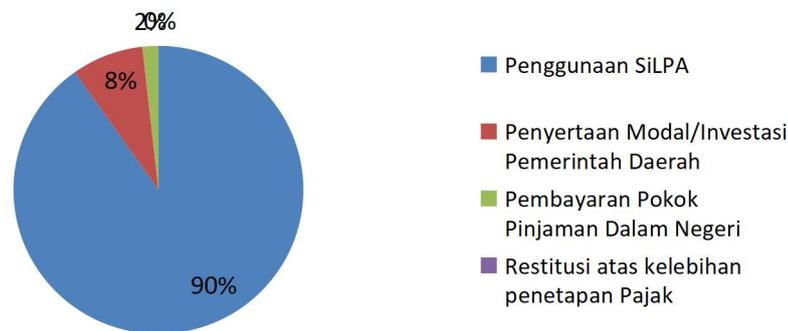
Gambar 3. 12 Proporsi Realisasi Transfer TA 2018

4. PEMBIAYAAN

Pada tahun anggaran 2018 jumlah anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada pos penggunaan (SiLPA) adalah senilai Rp108.161.445.444,00 sedangkan

realisasinya mencapai Rp117.161.445.444,40 atau menunjukkan kinerja senilai 108,32% dari yang dianggarkan. Pengeluaran Pembiayaan daerah pada pos penyertaan modal pemerintah daerah dianggarkan senilai Rp10.422.000.000,00 dengan realisasi Rp10.422.000.000,00 atau 100,00%, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dianggarkan senilai Rp2.256.548.000,00 dengan realisasi Rp2.256.548.000,00 atau 100,00%, sedangkan Restitusi dianggarkan senilai Rp39.079.920,00 dengan realisasi Rp39.079.920,00 atau 100,00% dapat di jelaskan dalam Grafik sebagai berikut:

PROPORSI REALISASI PEMBIAYAAN TA. 2018



mbar 3. 13 Proporsi Realisasi Pembiayaan 2018

Ga

B. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN ANGGARAN YANG TELAH DITETAPKAN

1. PENDAPATAN

Secara keseluruhan Realisasi Pendapatan Daerah telah melampaui yang ditargetkan, namun masih terdapat potensi pendapatan yang belum optimal pencapaiannya. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan hal ini antara lain:

- Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang belum sebanding dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah;
- Metode menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah yang kurang efektif;
- Belum optimalnya dalam pengelolaan APBD;
- Belum optimalnya penarikan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Kurangnya motivasi masyarakat dalam membayar pajak.

Beberapa strategi dan prioritas yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar mampu meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

- Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah;
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- d. Mendorong berkembangnya BUMD dan sektor swasta;
- e. Mendorong perkembangan dan peningkatan ekonomi lokal masyarakat Kabupaten Rembang sehingga menumbuhkan peran partisipatif dan kesadaran masyarakat dalam ikut membangun Kabupaten Rembang, salah satunya dengan membayar pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi tanggung jawabnya;
- f. Kerjasama dengan produsen produk-produk dari Kabupaten Rembang.

2. BELANJA

Beberapa permasalahan kinerja pengelolaan belanja daerah adalah:

- a. Terbatasnya kemampuan APBD dan bergantung pada dana perimbangan sehingga kemampuan belanja pun terbatas;
- b. Belum terkoordinasinya beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
- c. Terbatasnya daya dukung pembangunan daerah;
- d. Perencanaan anggaran berbasis kinerja yang belum optimal.

Strategi dan prioritas APBD yang masih diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan, kendala dan tantangan dalam pencapaian arah dan kebijakan umum belanja antara lain:

- a. Penyusunan kebijakan umum belanja daerah yang memenuhi sarana dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana dasar yang mendukung serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Penyusunan program dan kegiatan belanja yang sesuai dengan skala prioritas berdasarkan kebijakan umum APBD;
- c. Penyusunan program dan kegiatan belanja daerah berdasarkan alokasi sumber-sumber penerimaan daerah dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk membiayai pembangunan daerah;
- d. Belanja daerah yang ditujukan untuk pengelolaan potensi daerah Kabupaten Rembang sebagai produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan keunikan tertentu;
- e. Penyusunan program dan kegiatan belanja yang *reliable* untuk mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian yang harus ditanggung.

3. PEMBIAYAAN

Sisa lebih perhitungan sebagai sumber pembiayaan juga berfungsi sebagai dana *sharing* guna membiayai defisit anggaran pada saat terjadi selisih minus antara pendapatan dengan belanja. Strategi dan prioritas pembiayaan diarahkan dalam rangka:

- a. Penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah;
- b. Membayar utang pokok yang jatuh tempo.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai Entitas akuntansi.

Sementara entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban daerah.

B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang adalah *Basis Akrual* baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang masih merupakan basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

C. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD/OPD

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Daerah berdasarkan nilai nominal uang.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2018.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2018.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

4. Investasi Jangka Pendek

Adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

5. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Piutang Pajak dan Piutang Retribusi adalah piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapaannya (SKPD, SKRD atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu) yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang

6. Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan atas pengolongan kualitas umur piutang terdiri atas kualitas lancar: jika umur piutang 0 sd 1 tahun, kualitas kurang lancar: jika umur piutang 1 sd 2 tahun, kualitas diragukan: jika umur piutang 2 sd 3 tahun dan kualitas macet: umur piutang lebih dari 3 tahun.

Batasan atas kelompok umur piutang, dikelompokkan atas kelompok umur tahun baik untuk piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya kecuali untuk di RSUD dr. Soetrasno berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi tersendiri di lingkup RSUD dr. Soetrasno sebagai BLUD. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0,5% dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama dengan tanggal pelaporan, maka tidak diperlukan jurnal penyesuaian dan diungkapkan di CALK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya bila kualitas piutang meningkat, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dalam saldo awal

7. Beban Dibayar Dimuka

Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Biaya Dibayar Dimuka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar di muka. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

8. Persediaan



Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stok opname*).

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

9. Investasi Non Permanen

Investasi Nonpermanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

10. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20%.

Dan jika kepemilikannya 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

11. Aset Tetap

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian aktiva tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada penghapusan aset tetap;
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai;
- c. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari pihak ketiga kepada Pemda;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- e. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- f. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja, ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp300.000,00;
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset ini dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana di atas dicatat dalam pembukuan (*intra komptable*) dan menambah aset daerah.

BM/KD yang mempunyai nilai Aset di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan, dan tanaman, buku bahan bacaan dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (*ektra komptable*);

- h. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
 - 2) Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
 - 3) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- i. Kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Batas Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan mesin	
	Alat-alat Berat	10.000.000
	Alat-alat Angkutan	
	- Angkutan roda 4	5.000.000
	- Angkutan roda 2	1.000.000
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000
	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
	Alat-alat Kedokteran	1.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
	Alat-alat Laboratorium	1.000.000
	Alat Keamanan	1.000.000
3.	Gedung dan bangunan	
	Bangunan gedung	100.000.000
	Bangunan monumen	100.000.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan	100.000.000
	Bangunan air (Irigasi)	100.000.000
	Instalasi	100.000.000
	Jaringan	100.000.000
5.	Aset tetap lainnya	
	Buku dan perpustakaan	-
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	-
	Hewan/Ternak & Tumbuhan	-

- j. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima.

12. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

13. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

14. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

15. Jalan, Irigasi dan Jaringan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

16. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

17. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

18. Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3			ASET TETAP		
1	3	2		Peralatan dan Mesin		
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10	120
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8	96
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7	84
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	84
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	24
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10	120
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	36
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20	240
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10	120
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	60
1	3	2	11	Alat Ukur	5	60
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4	48



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	48
1	3	2	14	Alat Kantor	5	60
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5	60
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4	48
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	60
1	3	2	18	Alat Studio	5	60
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5	60
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10	120
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5	60
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5	60
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8	96
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	120
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	120
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	180
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	120
1	3	2	28	<i>Radiation Application and Non-Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10	120
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	84
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidroninamika	15	180
1	3	2	31	Senjata Api	10	120
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3	36
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5	60
1	3	3		Gedung dan Bangunan		
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	600
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	600
1	3	3	3	Bangunan Menara	40	480
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50	600
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50	600
1	3	3	6	Candi	50	600
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	600
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50	600
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	600
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50	600
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	600
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1	3	4	1	Jalan	10	120
1	3	4	2	Jembatan	50	600
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50	600
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50	600
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25	300
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	120
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	360
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40	480
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40	480
1	3	4	10	Bangunan Air	40	480
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	360
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30	360
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	120
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	120
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	480
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40	480
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30	360
1	3	4	18	Instalasi Gas	30	360
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20	240
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30	360
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40	480
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20	240
1	3	4	23	Jaringan Gas	30	360



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan table dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

19. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieleminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/ sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan Kepala Daerah.

20. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Aset Lain-lain.

Tuntutan Ganti Rugi merupakan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang dikelola oleh Majelis TP/TGR dan jangka waktu lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Aset Tidak Berwujud antara lain *software* komputer, Lisensi dan *Franchise*, Hak Cipta/ Paten dan hak lainnya berupa hasil pengkajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan lebih dari satu tahun.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada periode akuntansi.

Aset lainnya termasuk di dalamnya Aset lain-lain: Penyalahgunaan kas, investasi BPUD Indak yang merugi dan terancam akan dibubarkan, aset lain-lain Dana TKI, Saldo kas di Bank Hasil Perguliran LPUKM dan Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan TA 2005-2006 yang dikelola oleh eks KKP sekarang DPU yang tidak jelas siapa Wajib Retribusi yang berhutang dan nominal Retribusi yang terutang. Termasuk di dalam rekening Aset lain-lain adalah pencatatan aset tetap yang rusak berat dan akan dihapuskan, nilainya sesuai yang tertera dalam neraca BMD.

21. Amortisasi

Pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi dengan mempergunakan metode garis lurus (*straight line method*) dan diakui sebagai beban amortisasi pada laporan operasional.

Masa manfaat aset tidak berwujud terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3 Masa Manfaat Aset Tidak berwujud

URAIAN	TAHUN	BULAN
Hak Paten	10	120
Hak Cipta	25	300
Royalti	10	120
Software Komputer	4	48
Lisensi	10	120
Franchise	5	60
Paten Biasa	20	240
Merek	10	120
Hasil Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5	60

22. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar, yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah :

- Utang PFK
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban

23. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah. Pendapatan Dibayar Dimuka terdiri dari Pendapatan Dibayar Dimuka dari Penerimaan Pajak Reklame dan penerimaan Pasar Grosir dan Pertokoan yang tanggal ketetapannya melebihi tahun anggaran 2018.

24. Utang Beban

Utang beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Utang beban terjadi karena adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran, misal: utang beban gaji yang belum terbayar tahun anggaran bersangkutan. Utang beban juga terjadi karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang, misalnya: tagihan listrik, air PAM, telepon bulan Desember ditagih bulan Januari

25. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

26. Ekuitas Dana

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

27. Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pendapatan yang telah diterima Bendahara Penerimaan meskipun hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD dan Pendapatan BUD.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.



Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

28. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

29. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

30. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Saldo Anggaran Lebih(SAL) adalah jumlah saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/ SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

Akun Saldo Anggaran Lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan. Akun ini akan menutup akun Pendapatan-LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

31. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan-LO diakui sesuai dengan penetapannya bila dengan SKPD/SKRD-nya apabila pendatan tidak memerlukan dokumen penetapan, maka atas transaksi tersebut dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

32. Beban LO

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

33. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

34. Laporan Arus Kas

- a. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- b. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.



D. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan SKPD/OPD atau pemerintah daerah setempat.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN DAERAH

Tabel. 5.1.1



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pendapatan Daerah

No	Akun	2018			2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Asli Daerah	304.351.906.094,00	296.676.436.263,15	97,48	300.319.284.807,04
2	Pendapatan Transfer	1.454.849.116.000,00	1.432.266.688.947,00	98,45	1.420.221.823.549,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	57.455.920.000,00	56.967.950.020,00	99,15	1.711.800.674,00
	Jumlah	1.816.656.942.094,00	1.785.911.075.230,15	98,31	1.722.252.909.030,04

Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang TA 2018 terealisasi sebesar Rp1.785.911.075.230,15 atau 98,31 % dari anggaran sebesar Rp1.816.656.942.094,00 Realisasi pendapatan daerah TA 2018 meningkat sebesar Rp 63.658.166.200,11 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.722.252.909.030,04

Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang terdiri atas:

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2018 sebesar Rp296.676.436.263,15 atau 97,48% dari anggaran sebesar Rp304.351.906.094,00 Pendapatan Asli Daerah TA 2018 menurun sebesar Rp(3.642.848.543,89) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp300.319.284.807,04 yang terdiri dari:

Tabel. 5.1.2

Pendapatan Asli Daerah

No	Akun	2018			2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Daerah	96.286.250.000,00	100.438.352.553,00	104,31	59.734.946.872,00
2	Retribusi Daerah	22.858.499.000,00	21.441.590.432,00	93,80	20.730.064.301,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.679.000.000,00	18.775.303.058,00	106,20	9.212.738.532,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	167.528.157.094,00	156.021.190.220,15	98,50	210.641.535.102,04
	Jumlah	304.351.906.094,00	296.676.436.263,15	97,48	300.319.284.807,04

1) Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.1.3



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pendapatan Pajak Daerah

No	Akun	2018			2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Hotel	1.500.000.000,00	1.547.385.331,00	103,16	900.947.867,00
2	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	3.645.146.314,00	145,81	3.079.057.000,00
3	Pajak Hiburan	200.000.000,00	242.073.750,00	121,04	199.842.500,00
4	Pajak Reklame	800.000.000,00	866.975.159,00	108,37	988.263.050,00
5	Pajak Penerangan Jalan	22.750.000.000,00	23.455.582.696,00	103,10	18.129.943.313,00
6	Pajak Parkir	20.000.000,00	72.769.000,00	363,85	11.930.000,00
7	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	389.209.789,00	194,60	181.252.591,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000,00	8.397.500,00	111,97	9.610.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	45.000.000.000,00	45.410.707.344,00	100,91	13.744.078.898,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.725.000.000,00	14.819.014.513,00	107,97	11.221.983.586,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	9.583.750.000,00	9.981.091.157,00	104,15	11.268.038.067,00
	Jumlah	96.286.250.000,00	100.438.352.553,00	104,31	59.734.946.872,00

Realisasi pendapatan Pajak Daerah TA 2018 sebesar Rp100.438.352.553,00 atau 104,31% dari anggaran sebesar Rp96.286.250.000,00 Pajak Daerah TA 2018 mencapai target dan meningkat sebesar Rp40.703.405.681,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp59.734.946.872,00

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 terealisasi sebesar Rp21.441.590.432,00 atau 93,80% dari anggarannya Rp22.858.499.000,00 meningkat sebesar Rp711.526.131,00 dibandingkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp20.730.064.301,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.4
Pendapatan Retribusi Daerah

No	Akun	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Akun	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Retr. Pelayanan Kesehatan	292.600.000,00	79.959.000,00	27,33	76.034.500,00
2.	Retr. Pelayanan Persampahan/K ebersihan	828.057.500,00	797.635.000,00	96,33	772.060.000,00
3.	Retr. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	15.000.000,00	17.582.950,00	117,22	12.476.350,00
4.	Retr. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	330.002.000,00	151.580.500,00	45,93	344.837.500,00
5.	Retr. Pelayanan Pasar	2.776.736.000,00	2.082.528.988,00	75,00	1.666.245.550,00
6.	Retr. Pengujian Kendaraan Bermotor	550.000.000,00	588.525.000,00	107,00	564.246.000,00
7.	Retr. Pengendalian Menara Telekomunikasi	356.745.000,00	372.827.909,00	104,51	331.408.000,00
8.	Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah	1.672.660.000,00	2.085.986.221,00	124,71	1.766.344.486,00
9.	Retr. Pasar Grosir atau Pertokoan	198.000.000,00	217.807.400,00	110,00	233.396.500,00
10.	Retr. Tempat Pelelangan	12.604.019.265,00	11.652.036.414,00	92,45	11.730.060.915,00
11.	Retr. Terminal	231.379.000,00	221.398.750,00	95,69	237.753.500,00
12.	Retr. Tempat Khusus Parkir	194.000.000,00	98.025.000,00	50,53	200.816.000,00
13.	Retr. Rumah Potong Hewan	45.525.000,00	45.945.000,00	100,92	46.429.500,00
14.	Pelayanan Kepelabuhan				120.506.900,00
15.	Retr. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	732.000.000,00	972.196.000,00	132,81	326.711.000,00
16.	Retr. Penjualan Produksi Usaha Daerah	91.010.000,00	92.780.000,00	101,94	91.065.000,00
17.	Retr. Ijin Mendirikan Bangunan	1.100.000.000,00	1.815.407.050,00	165,04	619.586.200,00
18.	Retr. Ijin Gangguan Keramaian	820.015.235,00	144.178.650,00	17,58	1.566.326.400,00
19.	Retr. Ijin Trayek	20.750.000,00	5.190.600,00	25,01	23.760.000,00
	Jumlah	22.858.499.000,00	21.441.590.432,00	93,80	20.730.064.301,00

Realisasi tersebut tidak termasuk penerimaan atas saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan Tahun 2017 yang disetor di tahun 2018 sebesar Rp9.414.462,00 dan Kas di Bendahara Dinindagkop sebesar Rp9.543.700,00 namun telah mengakui saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinindagkop TA. 2018 sebesar Rp,68.000,00

**3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk TA 2018 terealisasi sebesar Rp18.775.303.058,00 atau 106,20 % dari anggaran sebesar Rp17.679.000.000,00 bila dibandingkan realisasi TA. 2017 sebesar Rp 9.212.738.532,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.562.564.526,00 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2018 berasal dari bagi laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah PD BPR BKK Lasem, PD BPR BKK Kaliori, PD BPR Bank Pasar, Unit Percetakan Daerah dan Bagi laba atas penyertaan modal pada perbankan PT Bank Jateng, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	BUMD	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
A.	Bagi Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD				
1	PD BPR-BKK Lasem	3.000.000.000,00	3.088.211.367,00	102,94	2.999.403.848,00
2	PD BPR-BKK Kaliori	300.000.000,00	329.796.123,00	109,93	389.300.399,00
3	PD. BPR Bank Pasar	875.000.000,00	878.050.670,00	100,35	877.239.567,00
4	Unit Percetakan Daerah	130.000.000,00	143.685.370,00	110,53	120.134.356,00
	Jumlah	4.305.000.000,00	4.439.743.530,00	103,13	4.386.078.170,00
B.	Bagi Laba atas penyertaan modal pada Perbankan				
1	Deviden PT Bank Jateng	4.952.000.000,00	5.913.559.528,00	119,42	4.826.660.362,00
	Cash in Bank Jateng	8.422.000.000,00	8.422.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	13.374.000.000,00	14.335.559.528,00	107,19	4.826.660.362,00
	Jumlah Total	17.679.000.000,00	18.775.303.058,00	106,20	9.212.738.532,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah TA 2018 sebesar Rp156.021.190.220,15 atau 93,13% dari anggaran sebesar Rp167.528.157.094,00 terjadi penurunan sebesar Rp 54.620.344.881,89 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp210.641.535.102,04 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

Tabel. 5.1.6

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Lain-Lain PAD Yang Sah	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	20.000.000,00	174.940.000,00	874,70	223.242.000,00
2	Pendapatan Jasa Giro	5.991.454.235,00	3.501.301.408,00	58,44	8.258.104.243,00
3	Penerimaan Bunga Deposito	6.269.370.471,00	10.271.682.940,00	163,84	9.641.233.369,00
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		927.093.577,00	100,00	485.414.424,00
5	Pendapatan Denda Pajak	147.045.639,00	405.796.227,00	275,97	232.715.572,00
6	Pendapatan Denda Retribusi	2.323.565,00	19.463.700,00	837,67	15.413.885,00
7	Pendapatan denda atas pelanggaran Perda	500.000,00	750.000,00	150,00	1.750.000,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	3.177.850.000,00	4.237.512.162,16	133,35	3.661.253.477,00
9	Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah	292.579.000,00	599.002.644,00	204,73	435.771.734,00
10	Penerimaan Pihak Ketiga		32.564.334,00	100,00	51.970.000,00
12	Pendapatan BLUD	142.627.034.184,00	135.851.083.227,99	95,25	129.840.717.134,40
13	Pendapatan dari Bendahara Puskesmas	9.000.000.000,00	0,00	100,00	57.793.949.264,00
	Jumlah	167.528.157.094,00	156.021.190.220,15	93,13	210.641.535.102,40

Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

a) Hasil Penjualan Aset daerah yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp174.940.000,00 atau 874,70 % dari anggarannya sebesar Rp20.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.7

Hasil Penjualan Aset daerah yang Tidak Dipisahkan

No	Hasil Penjualan Aset Daerah	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Drum Bekas aspal	20.000.000,00	5.940.000,00	29,70	43.242.000,00
2	Bekas Barang Inventaris	0,00	53.500.000,00		0,00
3	Bekas Bahan Bangunan	0,00	115.500.000,00		180.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Hasil Penjualan Aset Daerah	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	Jumlah	20.000.000,00	174.940.000,00	874,70	223.242.000,00

Realisasi penjualan aset Tahun 2018 sebesar 174.940.000,- mengalami penurunan sebesar Rp48.302.000,00 bila dibandingkan realisasi Tahun 2017 sebesar 223.242.000,00

b) Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan jasa giro untuk TA 2018 terealisasi sebesar Rp3.501.301.408,00 dari anggaran sebesar Rp5.991.454.235,00 atau 58,44% menurun sebesar Rp(4.756.802.835,00) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp8.258.104.243,00 Realisasi Pendapatan Jasa Giro Th. 2018 tersebut termasuk saldo Kas di Bendahara BOS SD/SMP se Kab. Rembang Tahun 2018 yang disetor di tahun 2019 sebesar Rp4.885.580,00

c) Bunga Deposito

Realisasi Pendapatan bunga deposito TA 2018 yaitu Rp10.271.682.940,00 atau 163,84% dari anggarannya sebesar Rp6.269.370.471,00 namun bila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp9.641.233.369,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 630.449.571,00

d) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan denda keterlambatan TA 2018 teralisasi sebesar Rp927.093.577,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp.0,00 yang terbagi dalam beberapa bidang yaitu:

Tabel. 5.1.8

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2018		%	2017
		Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	31.747.732,00
2	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	921.926.209,00	100,00	450.014.186,00
3	Bid. Perencanaan Pembangunan	0,00	5.167.368,00	100,00	3.652.506,00
	Jumlah	0,00	927.093.577,00	100,00	485.414.424,00

e) Pendapatan Denda Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada Tahun Anggaran 2018 pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp405.796.227,00 atau 275,97 % dari anggrannya Rp147.045.639,00 dengan rincian sebagaimana daftar di bawah ini :

Tabel. 5.1.9
Pendapatan Denda Pajak

No	Pendapatan Denda Pajak	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Denda Pajak Hotel	484.834,00	66.410.975,00	13.697,67	114.428,00
2	Denda Pajak Restaurant	1.178.558,00	2.053.097,00	174,20	185.300,00
3	Denda Pajak Hiburan	1.526.750,00	3.560.350,00	233,20	833.700,00
4	Denda Pajak Reklame	206.950,00	873.190,00	421,93	608.350,00
5	Denda Pajak Parkir	187.480,00	384.380,00	205,02	36.200,00
6	Denda Pajak Air Tanah	273.330,00	5.001.155,00	1.829,71	546.246,00
7	Denda Pajak Sarang Burung Walet	46.750,00	178.750,00	382,35	150.400,00
8	Denda Pajak Gol. C	43.817.593,00	77.442.570,00	176,74	5.209.660,00
9	Denda Pajak PBB	99.323.394,00	249.891.760,00	251,59	225.031.288,00
	Jumlah	147.045.639,00	405.796.227,00	275,97	232.715.572,00

f) Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan denda retribusi TA 2018 terealisasi sebesar Rp19.463.700,00 yang terdiri dari pendapatan denda retribusi jasa umum sebesar Rp18.503.080,00 pendapatan denda retribusi jasa usaha sebesar Rp634.220,00 serta pendapatan denda retribusi perijinan tertentu sebesar Rp326.400,00 pendapatan denda retribusi Tahun 2017 meningkat sebesar Rp4.049.815,00 dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp15.413.885,00

g) Pendapatan denda atas pelanggaran Perda



Penerimaan denda atas pelanggaran Perda berasal dari denda administrasi keterlambatan pelaporan PPAT untuk Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 750.000,00 atau 150% dari anggarannya sebesar Rp. 500.000,00

h) Pendapatan dari pengembalian

Pendapatan dari pengembalian setoran TA 2018 terealisasi sebesar Rp4.237.512.162,16 atau 133,35% dari anggarannya Rp3.177.850.000,00 terdiri dari pendapatan dari pengembalian Taspen sebesar Rp31.475.300,00, pendapatan dari pengembalian setoran (Pengembalian Gaji/Tunj. Keluarga, serta tunj. Profesi Guru) sebesar Rp194.130.557,00 dan pengembalian atas hasil pemeriksaan sebesar Rp4.011.906.305,16,00 dibandingkan dengan realisasi Th. 2017 Rp3.661.253.477,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.576.258.685,16,00.

i) Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah

Pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 599.002.644,00 atau 204,73 dari anggarannya Rp 292.579.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.1.10

Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah

No	Uraian	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Sewa Kios & Gudang Dirlutkan	278.809.000,00	345.287.841,00	123,84	334.019.641,00
2	Sewa Kios & Gudang Dinbudpar	0,00	52.861.000,00	100,00	2.047.000,00
3	Sewa Lap. & Gdg. Olahraga_ Dinbudpar	13.770.000,00	8.590.000,00	62,38	34.574.000,00
4	Sewa Tanah Kapling Dinbudpar	0,00	0,00	0,00	4.999.500,00
5	Sewa Tanah BPPKAD	0,00	192.263.803,00	100,00	60.131.593,00
	Jumlah	292.579.000,00	599.002.644,00	204,73	435.771.734,00

**j) Pendapatan BLUD**

Pendapatan BLUD Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp135.851.083.227,99 atau 95,25% dari anggaran sebesar Rp142.627.034.184,00. Menurun sebesar Rp11.719.614.587,05 bila dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp147.570.697.814,04

Penerimaan Pendapatan BLUD Th. 2018 terdiri dari :

Tabel. 5.1.10
Pendapatan BLUD

No	BLUD	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	RSUD dr. Soetrasno	100.000.000.000,00	93.667.508.828,00	93,67	108.077.889.656,84
2	PPK BLUD Puskesmas	42.627.034.184,00	42.183.574.399,00	98,96	39.492.808.157,20
	Jumlah	142.627.034.184,00	135.851.083.227,00	95,25	147.570.697.814,04

k) Penerimaan Pihak Ketiga

Penerimaan Pihak ketiga TA. 2018 terealisasi sebesar Rp32.564.334,00 atau 100,00.% dari anggaran sebesar Rp0,00 Penerimaan Pihak ketiga tersebut berasal dari penerimaan sumbangan PT. Garuda Food sebesar Rp25.000.000,00 dan penerimaan pihak ke-3 lainnya Rp7.564.334,00

b. PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi pendapatan transfer TA 2018 sebesar Rp1.432.266.688.947,00 atau 98,45% dari anggaran sebesar Rp1.454.849.116.000,00 serta meningkat sebesar Rp12.044.865.398,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.420.221.823.549,00 yang terdiri dari:

Tabel. 5.1.11
Pendapatan Transfer

No	URAIAN	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Transfer Pemerintah Pusat	922.884.425.000,00	902.171.379.111,00	97,76	927.645.131.515,00
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	406.778.201.000,00	398.053.997.887,00	97,86	375.414.444.034,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	URAIAN	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	95.000.000.000,00	105.216.144.949,00	110,75	92.803.709.000,00
4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya.	30.186.490.000,00	26.825167.000,00	88,86	24.358.539.000,00
	Jumlah	1.454.849.116.000,00	1.432.266.688.947,00	98,45	1.420.221.823.549,00

1) Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat Th. 2018 terealisasi sebesar Rp902.171.379.111,00 atau 97,76% dari anggaran sebesar Rp922.884.425.000,00 serta menurun sebesar Rp25.473.752.404,00 dibandingkan TA 2017 sebesar Rp927.645.131.515,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.12

Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dana Bagi Hasil Pajak	26.359.122.000,00	20.192.268.635,00	76,60	28.022.881.056,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	20.498.948.000,00	20.819.418.859,00	101,56	17.340.981.751,00
3	Dana Alokasi Umum	771.584.367.000,00	771.584.367.000,00	100,00	771.584.367.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	104.441.988.000,00	89.575.324.617,00	85,77	110.696.901.708,00
	Jumlah	922.884.425.000,00	902.171.379.111,00	97,76	927.645.131.515,00

a) Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Dana Bagi hasil Pajak TA 2018 terealisasi sebesar Rp20.192.268.635,00 atau 76,60.% dari anggaran sebesar Rp26.359.122.000,00 menurun sebesar Rp7.830.612.421,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp28.022.881.056,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel. 5.1.13

Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bagi Hasil PBB	9.459.836.000,00	8.698.005.439,00	91,95	11.168.048.004,00
2	Bagi Hasil dari PPh Ps.25 dan Ps.29, WP OPDN dan PPh Ps.21	16.899.286.000,00	11.494.263.196,00	68,02	16.854.833.052,00
	Jumlah	26.359.122.000,00	20.192.268.635,00	76,60	28.022.881.056,00

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Realisasi pendapatan dari dana bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam TA 2018 adalah sebesar Rp20.819.418.859,00 atau 101,56.% dari anggaran sebesar Rp20.498.948.000,00 serta mengalami kenaikan sebesar Rp3.478.437.108,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp17.340.981.751,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.14

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

No	Nama Akun	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	736.354.000,00	1.148.926.695,00	156,03	724.811.329,00
2	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	701.234.591,00	74,36	525.572.127,00
3	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	181.972.000,00	36.346.929,00	19,97	30.278.848,00
4	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	291.237.025,00	100,00	480.660.548,00
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	21.547.000,00	26.570.761,00	123,32	71.137.168,00
6	Bagi Hasil Dari Pertambangan	3.588.000,00	2.642.858,00	73,66	4.352.112,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Nama Akun	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
	Umum				
7	Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau	18.612.460.000,00	18.612.460.000,00	100,00	15.504.169.619,00
	Jumlah	20.498.948.000,00	20.819418.859,00	101,56	17.340.981.751,00

c) Dana Alokasi Umum

Pendapatan dari Dana Alokasi Umum TA 2018 terealisasi sebesar Rp771.584.367.000,00 atau 100.% dari anggarannya sebesar Rp771.584.367.000,00 sama bila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp771.584.367.000,00.

d) Dana Alokasi Khusus

Realisasi pendapatan dari Dana Alokasi Khusus TA .2018 sebesar Rp89.575.324.617,00 atau 85,77.% dari anggaran sebesar Rp104.441.988.000,00 menurun sebesar, Rp21.121.577.091,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp110.696.901.708,00. Dana Alokasi Khusus TA 2018 terdiri dari:

Tabel. 5.1.15

Dana Alokasi Khusus

No	Uraian Dana Alokasi Khusus	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	DAK Bid. Infrastruktur Jalan	17.597.743.000,00	14.770.709.000,00	83,94	19.940.583.000,00
2	DAK Bid. Infrastruktur Irigasi	9.639.782.000,00	8.391.164.700,00	87,05	8.964.771.000,00
3	DAK Bid. Air Minum	8.150.373.000,00	5.746.282.900,00	70,50	2.742.428.000,00
4	DAK Bid. Sanitasi	1.800.000.000,00	450.000.000,00	25,00	
5	DAK Bid. Perumahan & Kawasan Pemukiman	0,00	950.373.000,00	100,00	0,00
6	Dana Alokasi Khusus Kesehatan	37.528.867.000,00	34.507.222.717,00	91,95	34.873.220.300,00
7	Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan	996.370.000,00	806.698.000,00	80,96	1.450.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian Dana Alokasi Khusus	2018			2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8	Dana Alokasi Khusus Perdagangan	1.670.183.000,00	526.040.000,00	31,50	0,00
9	Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup	667.485.000,00	421.982.000,00	63,22	0,00
10	Dana Alokasi Khusus Pertanian	4.057.544.000,00	3.842.422.000,00	94,70	3.956.773.000,00
11	Dana Alokasi Khusus Pendidikan	17.993.538.000,00	14.874.968.600,00	82,67	15.127.482.000,00
12	DAK Fisik Pariwisata	0,00	795.361.700,00	100,00	0,00
13	DAK Fisik Pasar	4.340.103.000,00	3.492.100.000,00	80,46	613.240.000,00
14	DAK Fisik Tambahan				23.027.604.408,00
	Jumlah	104.441.988.000,00	89.575.324.617,00	85,77	110.696.901.708,00

2) Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2018 sebesar Rp398.053.997.887,00 atau 97,86% dari anggarannya sebesar Rp406.778.201.000,00 serta mengalami kenaikan sebesar Rp22.639.553.853,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp375.414.444.034,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.16

Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya

No	Uraian Dana Penyesuaian	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	140.815.051.000,00	135.157.721.710,00	95,98	119.428.018.295,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	849.000.000,00	492.050.000,00	57,96	1.140.150.000,00
3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	17.301.600.000,00	16.230.600.000,00	93,81	0,00
4	Dana Desa	229.010.130.000,00	229.010.130.000,00	100,00	228.013.715.000,00
5	Dana BOK dan BOKB	16.795.949.000,00	15.729.107.298,00	93,65	8.943.478.739,00
6	Dana pelayanan Adm. Kependudukan	1.523.271.000,00	1.434.388.879,00	94,17	1.395.701.000,00
7	Tunjangan Khusus Guru	483.200.000,00	0,00	0,00	314.381.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian Dana Penyesuaian	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
	BOP PAUD				16.179.000.000,00
	Jumlah	406.778.201.000,00	398.053.997.887,00	97,86	375.414.444.034,00

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

Realisasi transfer pemerintah Daerah Lainnya TA 2018 sebesar Rp105.216.144.949,00 atau 110,75% dari anggaran sebesar Rp95.000.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp12.412.435.949,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp92.803.709.000,00

Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.17

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

No	Nama Akun	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.000.000.000,00	22.516.080.104,00	160,83	20.161.487.173,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.990.000.000,00	19.623.766.626,00	70,11	15.359.389.745,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.000.000.000,00	33.112.721.400,00	103,48	26.830.199.341,00
4	Bagi Hasil dari Pajak APT	10.000.000,00	71.239.776,00	712,40	31.258.258,00
5	Bagi hasil dari Pajak Rokok	21.000.000.000,00	29.892.337.043,00	142,34	30.421.374.483,00
	Jumlah	95.000.000.000,00	105.216.144.949,00	110,75	92.803.709.000,00

4) Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar Rp26.825.167.000,00 atau 88,86% dari anggarannya sebesar Rp30.186.490.000,00 atau meningkat sebesar Rp2.466.628.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp24.358.539.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.18

Bantuan Keuangan Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Nama Akun	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Sarana Prasarana	29.300.000.000,00	25.938.677.000,00	88,53	23.444.849.000,00
2	FEDEP	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
3	TMMD	534.400.000,00	534.400.000,00	100,00	561.600.000,00
4	SIPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
5	Pendidikan Untuk Semua (PUS)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
6	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00
7	Nangkis	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
8	Pengembangan SID	62.090.000,00	62.090.000,00	100,00	62.090.000,00
	Jumlah	30.186.490.000,00	26.825.167.000,00	88,86	24.358.539.000,00

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah berasal dari pendapatan hibah TA 2018 sebesar Rp56.967.950.020,00 atau 99,15% dari anggarannya sebesar Rp57.455.920.000,00 serta meningkat sebesar Rp55.256.149.346,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.711.800.674,00. Pendapatan hibah tersebut merupakan hibah Pemerintah kepada PDAM sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Pendapatan hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 55.967.950.020,00.

2. BELANJA

Anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Rembang TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.1.19
Belanja

No	Uraian	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	5
1	Belanja Operasi	1.210.071.952.273,00	1.154.872.403.719,36	95,44	1.102.895.850.531,00
2	Belanja Modal	350.720.259.745,00	309.448.505.895,00	88,23	353.770.714.067,22



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

3	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	815.608.000,00
	Jumlah	1.561.292.212.018,00	1.464.320.909.614,36	93,79	1.457.482.172.598,22

Belanja TA 2018 sebesar Rp1.464.320.909.614,36 atau 93,79% dari anggaran sebesar Rp1.561.292.212.018,00 meningkat sebesar Rp6.838.737.016,14 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.457.482.172.598,22 dengan uraian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi Kabupaten Rembang TA 2018 digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan Jasa, belanja bunga, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial dengan total belanja sebesar Rp1.154.873.013.719,36 atau 95,44% dari anggarannya sebesar Rp1.210.071.952.273,00 atau meningkat sebesar Rp51.977.163.188,36 dibandingkan TA 2017 sebesar Rp1.102.895.850.531,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2018 sebesar Rp825.667.808.529,16 atau 97,37% dari anggaran sebesar Rp847.959.027.491,75 atau meningkat sebesar Rp28.538.496.061,16 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp 797.129.312.468,00 yang terdiri dari:

Tabel. 5.1.20

Belanja Pegawai

No	Akun	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	449.049.889.689,75	444.727.189.055,16	99,04	453.449.569.901,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	201.069.152.737,00	185.853.971.080,00	92,43	158.715.498.865,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	12.115.500.000,00	11.986.500.000,00	98,94	7.306.815.000,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.732.500.000,00	4.661.690.625,00	98,50	2.160.412.063,00
5	Belanja Insentif	1.387.000.000,00	874.700.062,00	63,06	914.965.338,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Akun	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5=4/3	6
	Pemungutan Retribusi Daerah				
6	Belanja Pegawai BLUD/BOS	84.774.022.065,00	85.070.293.435,00	100,35	77.756.907.272,00
7	Belanja Honorarium	94.830.963.000,00	92.493.464.272,00	97,54	96.825.144.029,00
	Jumlah	847.959.027.491,75	825.667.808.529,16	97,37	797.129.312.468,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan Jasa TA. 2018 sebesar Rp263.637.636.747,20 atau 90,94% dari anggaran sebesar Rp289.894.369.366,25 atau meningkat sebesar Rp13.248.978.684,20 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp250.388.658.063,00 yang terdiri dari:

Tabel. 5.1.21

Belanja Barang dan Jasa

No	Akun	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Bahan Pakai Habis	16.458.692.022,00	14.883.349.372,00	90,43	13.417.594.298,00
2	Belanja Bahan/Material	11.079.729.998,00	10.588.650.408,00	95,57	12.914.933.577,00
3	Belanja Jasa Kantor	20.529.062.125,00	19.961.405.998,00	97,23	18.196.969.362,00
4	Belanja Premi Asuransi	4.887.150.000,00	4.868.609.548,00	99,62	4.644.138.923,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.641.157.216,00	2.498.526.872,00	94,60	2.396.716.759,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.386.941.002,00	6.109.452.805,00	95,66	5.604.195.450,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	1.810.365.000,00	1.665.356.324,00	91,99	1.814.351.880,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.157.850.000,00	1.077.727.273,00	93,08	1.182.002.545,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.391.228.000,00	1.248.762.500,00	89,76	1.165.582.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	23.749.767.100,00	21.865.368.036,00	92,07	22.051.921.705,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	815.285.000,00	807.907.500,00	99,10	928.980.500,00
13	Belanja Pakaian Kerja	242.654.000,00	237.449.000,00	97,85	284.275.050,00
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.625.555.000,00	1.451.191.400,00	89,27	5.433.888.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Akun	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
15	Belanja Perjalanan Dinas	43.488.754.460,00	37.518.960.415,00	86,27	32.062.531.047,00
16	Belanja Pemeliharaan	1.119.762.000,00	1.071.131.000,00	95,66	1.765.817.675,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	1.833.639.000,00	1.662.906.000,00	90,69	4.759.890.480,00
18	Blj. Barang yg akan diserahkan kpd masyarakat/pihak tiga.	36.314.894.000,00	33.456.050.000,00	92,13	30.562.112.740,00
19	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	54.330.000,00	54.205.000,00	99,77	40.505.000,00
20	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	40.000.000,00
21	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dan non PNS	4.883.557.000,00	4.253.542.607,00	87,10	4.033.881.782,00
22	Blj. Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (Hadiah, Penghargaan)	1.096.350.000,00	1.009.540.000,00	92,08	879.210.000,00
23	Blj. Barang dana BOS	34.283.811.140,00	33.915.650.518,00	98,93	30.045.844.180,00
24	Belanja Jasa Lainnya	7.414.660.200,00	5.632.644.089,00	75,97	3.456.517.775,00
25	Blj. Penanganan Masalah Sosial	14.640.000,00	14.500.000,00	99,04	0,00
25	Belanja Beasiswa Pendidikan	1.827.000.000,00	1.515.896.000,00	82,97	946.589.000,00
26	Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur	3.657.105.000,00	3.442.335.000,00	94,13	2.805.415.000,00
27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.350.230.103,25	52.796.519.082,20	88,96	48.882.292.535,00
29	Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD	1.750.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	289.894.369.366,25	263.637.636.747,20	90,94	250.388.658.063,00

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga utang Pinjaman terealisasi sebesar Rp. 1.468.870.443,00 atau 101,21 dari anggarannya Rp.1.451.355.415,00 adalah belanja Bunga utang Pinjaman kepada lembaga keuangan Bank yang dilakukan oleh RSUD. dr. Soetrasno (BLUD) sedangkan pada TA 2017 tidak terdapat realisasi belanja bunga dikarenakan sudah tidak ada pinjaman.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan TA 2018 terserap sebesar Rp55.764.388.000,00 atau 90,25% dari anggaran sebesar Rp61.787.200.000,00. Realisasi TA 2018 meningkat sebesar Rp9.313.508.000,00 dibandingkan dengan TA 2017 sebesar Rp46.450.880.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel. 5.1.22

Belanja Hibah

No	Hibah	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Hibah kepada organisasi kemasyarakatan	61.787.200.000,00	55.764.388.000,00	90,25	46.450.880.000,00
	Jumlah	61.787.200.000,00	55.764.388.000,00	90,25	46.450.880.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2018 sebesar Rp8.333.700.000,00 atau 92,80% dari anggaran sebesar Rp8.900.000.000,00 menurun sebesar Rp593.300.000,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp8.927.000.000,00. Belanja ini merupakan bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang yang dikelola oleh BPPKAD (PPKD)

Tabel. 5.1.23

Belanja Bantuan Sosial

No	Bantuan Sosial	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	BPPKAD (PPKD)	8.980.000.000,00	8.333.700.000,00	92,80	8.927.000.000,00
	Jumlah	8.980.000.000,00	8.333.700.000,00	92,80	8.927.000.000,00

b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2018 sebesar Rp309.448.505.895,00 atau 88,23% dari anggaran sebesar Rp350.720.259.745,00 atau menurun sebesar Rp44.322.208.172,22 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp353.770.714.067,22 yang terdiri dari:

Tabel. 5.1.24
Belanja Modal

No	Belanja Modal	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Tanah	7.475.114.000,00	7.406.104.110,00	99,08	528.142.667,00
2	Peralatan dan Mesin	51.989.838.313,00	46.462.284.728,00	89,07	64.631.248.279,22
3	Gedung dan	110.031.939.250,00	94.860.823.159,00	86,21	104.140.195.865,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Belanja Modal	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	Bangunan				
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	171.523.136.204,00	152.529.881.164,00	88,93	173.930.573.900,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.700.231.978,00	8.189.412.734,00	84,42	10.540.553.356,00
	Jumlah	350.720.259.745,00	309.448.505.895,00	88,23	353.770.714.067,22

Realisasi Belanja modal per OPD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

NO	DINAS	2018		%	2017
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DINDIKPORA	63.807.729.695,00	59.233.678.104,00	92,83	65.911.587.985,00
2	DINAS KESEHATAN	23.551.673.113,00	21.578.422.895,00	91,62	31.034.949.275,22
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	35.268.398.000,00	22.434.543.756,00	63,61	48.343.738.516,00
4	DPUTARU	147.438.138.154,00	135.732.003.753,00	92,06	131.988.763.350,00
5	DINPERKIM	13.997.978.175,00	11.868.162.870,00	84,78	34.604.163.900,00
6	SATPOL PP	929.498.000,00	900.607.760,00	96,89	628.896.300,00
7	KESBANGPOLINMAS	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
8	BPBD	776.500.000,00	758.182.000,00	97,64	3.158.822.400,00
9	DINSOSPPKB	750.149.000,00	732.709.370,00	97,68	1.595.221.750,00
10	DPMPSTPTK	66.655.000,00	61.905.500,00	92,87	58.786.750,00
11	DINTANPAN	1.346.240.000,00	1.290.503.400,00	95,86	1.203.866.000,00
12	DLH	7.124.269.058,00	6.818.614.488,00	95,71	1.285.417.160,00
13	DINDUKCAPIL	106.900.000,00	106.800.000,00	99,91	102.095.730,00
14	DINPERMADES	58.590.000,00	57.450.100,00	98,05	236.741.980,00
15	DISHUB	8.312.864.000,00	8.287.762.000,00	99,70	2.429.990.650,00
16	DINKOMINFO	401.160.000,00	393.668.240,00	98,13	374.164.710,00
17	DINBUDPAR	1.591.786.000,00	1.093.859.230,00	68,72	2.341.709.250,00
18	DINARPUS	307.231.000,00	306.332.100,00	99,71	759.429.000,00
19	DINLUTKAN	17.857.431.000,00	12.155.403.954,00	68,07	8.604.231.382,00
20	DININDAGKOPI DAN UMKM	19.238.178.550,00	18.288.149.589,00	95,06	2.407.070.001,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	2.199.925.000,00	2.091.852.407,00	95,09	3.564.850.378,00
22	SEKRETARIAT DPRD	885.484.000,00	854.956.860,00	96,55	942.989.950,00
23	KECAMATAN REMBANG	1.810.540.000,00	1.709.520.359,00	94,42	1.917.864.900,00
24	KECAMATAN KALIORI	9.000.000,00	8.902.000,00	98,91	92.574.302,00
25	KECAMATAN SULANG	205.000.000,00	203.397.000,00	99,22	3.117.801.675,00
26	KECAMATAN SUMBER	194.000.000,00	190.658.070,00	98,28	49.960.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	DINAS	2018		%	2017
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5	6
27	KECAMATAN BULU	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00	217.998.700,00
28	KECAMATAN LASEM	125.000.000,00	119.666.000,00	95,73	200.036.000,00
29	KECAMATAN PANCUR	22.000.000,00	21.985.600,00	99,93	190.426.480,00
30	KECAMATAN SLUKE	28.000.000,00	27.774.000,00	99,19	295.942.000,00
31	KECAMATAN PAMOTAN	432.800.000,00	415.200.000,00	95,93	141.920.000,00
32	KECAMATAN GUNEM	77.800.000,00	77.800.000,00	100,00	138.765.600,00
33	KECAMATAN SALE	121.500.000,00	31.150.000,00	25,64	208.051.000,00
34	KECAMATAN KRAGAN	190.450.000,00	189.400.000,00	99,45	202.038.000,00
35	KECAMATAN SEDAN	48.700.000,00	48.450.000,00	99,49	236.062.000,00
36	KECAMATAN SARANG	293.000.000,00	291.532.000,00	99,50	7.000.000,00
37	INSPEKTORAT	235.020.000,00	222.405.500,00	94,63	123.602.143,00
38	BAPPEDA	167.145.000,00	167.041.880,00	99,94	145.920.650,00
39	DPPKAD (SKPD)	671.327000,00	608.356.210,00	90,62	4.556.546.200,00
40	BKD	50.000.000,00	47.498.900,00	95,00	345.218.000,00
	Jumlah	350.720.259.745,00	309.448.505.895,00	88,23	353.770.714.067,22

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tak terduga TA 2018 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 atau menurun sebesar Rp815.608.000,00 dibandingkan Realisasi TA 2017 sebesar Rp815.608.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.25
Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	815.608.000,00
	JUMLAH	500.000.000,00	0,00	0,00	815.608.000,00

3. TRANSFER

Realisasi Transfer TA 2018 sebesar Rp350.341.352.600,00 atau 99,87% dari anggarannya Rp350.808.547.600,00 menurun sebesar Rp21.264.715.900,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp371.606.068.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.1.26
Transfer



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Keterangan	2018		%	Realisasi 2017 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan				
	Transfer bagi hasil pajak Daerah kpd Pemkab/Kota	8.449.970.000,00	8.449.970.000,00	100,00	3.735.350.000,00
	Transfer bahu hasil pendapatan lainnya	2.315.849.900,00	2.315.849.900,00	100,00	2.701.873.500,00
	Jumlah 1	10.765.819.900,00	10.765.819.900,00	100,00	6.437.223.500,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan				
	1. Transfer bantuan keuangan ke Desa	338.951.771.700,00	338.601.771.700,00	99,90	364.077.895.000,00
	1. Alokasi Dana Desa	81.532.141.700,00	81.532.141.700,00	100,00	
	2. Dana Desa	229.010.130.000,00	229.010.130.000,00	100,00	
	4. Bantuan Keu ke Desa	28.409.500.000,00	28.059.500.000,00	98,77	
	2. Transfer bantuan keuangan lainnya	1.090.956.000,00	973.761.000,00	89,26	1.090.950.000,00
	Jumlah 2	340.042.727.700,00	339.575.532.700,00	99,86	365.168.845.000,00
	Total 1+2	350.808.547.600,00	350.341.352.600,00	99,87	

Untuk transfer bantuan keuangan ke Desa sebesar Rp338.601.771.700,- yang terdiri dari ADD Rp.81.532.141.700,- DD Rp.229.010.130.000,- dan Bantuan Keuangan Rp.28.059.500.000,- terinci dalam lampiran.

4. SURPLUS (DEFISIT)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. APBD Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2018 mengalami defisit sebesar (Rp28.751.186.984,21) atau 20,69 dari anggarannya defisit (Rp95.443.817.524,00) dengan realisasi pendapatan TA 2018 sebesar Rp1.785.911.075.230,15 dikurangi realisasi belanja sebesar Rp1.464.320.909.614,36 Transfer sebesar Rp 350.341.352.600,00

5. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan TA 2018 berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA 2017. sebesar Rp108.161.445.444,40 atau 100% dari anggaran sebesar Rp108.161.445.444,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.27

Penerimaan Pembiayaan

No	Keterangan	2018		%	Realisasi 2017 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Penggunaan Silpa Tahun sebelumnya	108.161.445.444,00	117.161.445.444,40	108,32	214.495.185.982,58
2	Pinjaman Dalam Negeri				17.729.980.680,00
	Jumlah	108.161.445.444,00	117.161.445.444,40	108,32	232.225.166.662,58



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Penggunaan SiLPA

Penggunaan SiLPA TA. 2018 berasal dari SiLPA TA. 2017 yaitu sebesar Rp117.161.445.444,40 atau 108,32% dari anggarannya sebesar Rp108.161.445.444,40 atau menurun sebesar Rp(97.333.740.538,18) dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp214.495.185.982,58.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah TA 2018 terealisasi sebesar Rp12.717.627.920,00 dari anggaran sebesar Rp12.717.627.920,00 atau 100,00%. Meningkat sebesar Rp4.489.238.770,00 dibandingkan Pengeluaran pembiayaan daerah TA 2017 sebesar Rp8.228.389.150,00,. Pengeluaran pembiayaan Daerah TA 2018 sebesar Rp12.717.627.920,00 digunakan untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah, Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dan Restitusi dengan rincian sbb:

Tabel. 5.1.28
Pengeluaran Pembiayaan

No	Keterangan	2018		%	Realisasi 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	10.422.000.000,00	10.422.000.000,00	100,00	8.189.000.000,00
2	Pembayaran pokok pinjaman dalam Negeri	2.256.548.000,00	2.256.548.000,00	100,00	0,00
3	Restitusi	39.079.920,00	39.079.920,00	100,00	0,00
4	Pembayaran Utang jangka panjang lainnya				39.389.150,00
	Jumlah	12.717.627.920,00	12.717.627.920,00	100,00	8.228.389.150,00

1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Dana yang digunakan sebagai Penyertaan modal pemerintah daerah TA 2018 terealisasi sebesar Rp10.422.000.000,00 atau 100% dari anggarannya yaitu Rp10.422.000.000,00 meningkat sebesar Rp2.233.000.000,00 dari realisasi TA 2017 sebesar Rp8.189.000.000,00, dengan rincian berikut ini:

Tabel. 5.1.29
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

No	Keterangan	2018		%	2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	PD. BPR BKK Kaliori	0,00	0,00	0,00	355.000.000,00
2	PT. Bank Jateng	0,00	0,00	0,00	5.635.000.000,00
3	PDAM Rembang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
4	Percetakan Daerah pd PD Aneka Perusda Kab.	0,00	0,00		200.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

	Rembang				
5	PT. Rembang Migas Energi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	999.000.000,00
6	Cash Out Bank Jateng	8.422.000.000,00	8.422.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	10.422.000.000,00	10.422.000.000,00	100,00	8.189.000.000,00

2) Pembayaran pokok pinjaman dalam Negeri

Pengeluaran daerah digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman BLUD RSUD dr. R. Soetrasno kepada Bank Jateng Cabang Rembang dalam TA. 2018 sebesar Rp2.256.548.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.256.548.000,00. Pembayaran pokok pinjaman dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.1.30
Pembayaran pokok pinjaman dalam Negeri

No	Keterangan	Tanggal Pembayaran	Realisasi
1.	Reclas belanja Barang/Jasa BLUD ke Pembiayaan (Pembayaran pokok hutang PT. Bank Jateng)	31- Dec-2019	2.256.548.000,00
		Jumlah	2.256.548.000,00

3) Restitusi

Realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 39.079.920,00 merupakan pengeluaran pembiayaan atas kelebihan penetapan pajak air PDAM.

6. PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan netto Kabupaten Rembang TA 2018 sebesar Rp104.443.817.524,40 merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp117.161.445.444,40 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp12.717.627.920,00. Realisasi pembiayaan TA 2018 menurun sebesar Rp 101.822.979.308,58 dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp206.266.796.832,58

7. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN 2018

SILPA Kabupaten Rembang Tahun 2018 sebesar Rp75.692.630.540,19 merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran sebesar Rp(28.751.186.984,21) dengan pembiayaan netto sebesar Rp104.443.817.524,40 SiLPA TA 2018 terdiri dari: Kas Bendahara Penerimaan Diindagkop/UMKM Rp. 68.000,00; Kas pada BUD sebesar Rp70.792.775.013,57; kas pada BLUD RSUD dr. Soetrasno sebesar Rp210.968.392,04; kas di BLUD Puskesmas Rp3.424.744.469,58 kas pada bendahara pengeluaran Dinkes sebesar Rp277.474.623 yang terdiri dari Rp276.864.623,00 yang oleh majelis TPTGR dimasukkan sebagai aset lainnya tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Bendahara dan sebesar Rp610.000,00 di kas Bendahara Puskesmas yg disetor pada tanggal 10 April 2019; serta Kas di Bendahara BOS Rp986.600.042,00 kas di Bendahar Bos pada Neraca sebesar Rp. 1.306.646.411,00 terdiri dari Kas Bos sebesar Rp. 986.600.042,00 yang



merupakan bagian SiLPA TA 2018 sedangkan nilai sebesar Rp. 320.046.369,00 merupakan penerimaan PFK yang sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan yang bukan merupakan bagian Silpa Kabupaten Rembang. SiLPA TA. 2018 tersebut menurun sebesar Rp41.468.814.904,21 dibandingkan SiLPA TA 2017 sebesar Rp117.161.445.444,40

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan penyajian informasi kenaikan dan penurunan SAL secara komparatif dengan periode sebelumnya terdiri dari:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Tabel 5.2.1
Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2018 dan TA 2017

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	117.161.445.444,40	214.875.906.410,58
Jumlah	117.161.445.444,40	214.875.906.410,58

Merupakan SiLPA dari pengelolaan APBD tahun lalu (TA 2017) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.2
Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal

No	Uraian Silpa	Nilai Akhir Tahun 2017
1	Kas di Kas Daerah	5.720.810.818,57
2	Deposito	95.000.000.000,00
3	Kas BLUD RSU	1.107.793.063,25
4	Kas BLUD Puskesmas	12.489.255.598,58
5	Kas BOS SD dan SMP	2.744.627.802,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan Dinindagkop	9.543.700,00
7	Kas di Bendahara Penerimaan Dinlutkan	9.414.462,00
8	Kas di Bendahara Pengeluaran DKK	80.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	117.161.445.444,40

**2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Tabel 5.2.3
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
TA 2018 dan TA 2017

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan	117.161.445.444,40	214.495.185.982,58
Jumlah	117.161.445.444,40	214.495.185.982,58

Saldo Anggaran Lebih digunakan sebagai penerimaan untuk pembiayaan TA. 2018 adalah sebesar Rp117.161.445.444,40.

Sub Total merupakan pengurangan (1) – (2)

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
Sub Total	0,00	380.720.428,00
Jumlah	0,00	380.720.428,00

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp75.692.630.540,19 merupakan sisa lebih anggaran pendapatan belanja per 31 Desember 2018 dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.4
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
TA 2018 dan TA 2017

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	75.692.630.540,19	117.161.445.444,40
Jumlah	75.692.630.540,19	117.161.445.444,40

4. Koreksi

Tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan koreksi lain-lain

Tabel 5.2.5
Koreksi Keasalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
TA 2018 dan TA 2017

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(380.720.428,00)
Koreksi Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah	0,00	(380.720.428,00)

5. Saldo Anggaran Lebih Akhir



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.2.6
Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2018 dan TA 2017

Uraian	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	75.692.630.540,19	117.161.445.444,40
Jumlah	75.692.630.540,19	117.161.445.444,40

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2018 sebesar Rp75.692.630.540,19 terdiri dari:

Tabel 5.2.7
Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

No	Uraian Silpa	Nilai Akhir Tahun 2018
1	Kas di Kas Daerah	5.792.775.013,57
2	Deposito	65.000.000.000,00
3	Kas BLUD RSU	210.968.392,04
4	Kas BLUD Puskesmas	3.424.744.469,58
5	Kas BOS SD dan SMP	986.600.042,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan Dinindagkop	68.000,00
7	Kas di Bendahara Pengeluaran DKK	610.000,00
8	Tuntutan Ganti Rugi Bend. Pengeluaran DKK	276.864.623,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	75.692.630.540,19

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2018.

Tabel 5.3.1
Rincian Neraca

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
	Aset		
1	Aset Lancar	157.249.790.862,18	165.782.551.429,16
2	Investasi Jangka Panjang	133.929.788.690,03	122.554.385.567,37
3	Aset Tetap	1.703.230.616.128,22	1.380.362.930.754,66
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	88.965.058.971,53	31.044.412.299,90
	Jumlah Aset	2.083.375.254.651,96	1.699.744.280.051,09
	Kewajiban dan Ekuitas		
1	Kewajiban Jangka Pendek	46.403.704.421,77	23.018.371.084,93
2	Kewajiban Jangka Panjang	11.605.064.680,00	15.759.982.680,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

	Jumlah Kewajiban	58.008.769.101,77	38.778.353.764,93
3	Ekuitas	2.025.366.485.550,19	1.660.965.926.286,16
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.083.375.254.651,96	1.699.744.280.051,09

1. ASET LANCAR

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp157.249.790.862,18 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Rembang yang berada di rekening Kas Daerah/bank pada akhir Tahun Anggaran. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 senilai Rp70.792.775.013,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2
Rincian Kas Daerah

No	Kas dan Bank	31-Des-18	31-Des-17
		(Rp)	(Rp)
1	Kas pada rekening Giro Bank	5.792.775.013,57	5.720.810.818,57
2	Deposito	65.000.000.000,00	95.000.000.000,00
	Jumlah	70.792.775.013,57	100.720.810.818,57

1) Kas pada Rekening Giro Bank

Rekening giro adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro pada PT Bank Jateng Cabang Rembang dan PT BRI Cabang Rembang atas nama BUD Kabupaten Rembang. Rekening tersebut merupakan rekening Kas Umum Daerah, yang dimaksudkan untuk menampung dana kegiatan rutin dan kegiatan lainnya, baik pendapatan maupun belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Rembang mempunyai 2 (dua) rekening untuk menampung Kas Daerah yaitu:

Tabel 5.3.3
Rekening Kas

Bank	Nomor Rekening	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
Bank Jateng Cab. Rembang	1.029.00001.5	5.744.141.473,57	3.041.750.990,00
BRI Cab. Rembang	00000142.01.000449.30	48.633.540,00	2.679.059.828,57
	JUMLAH	5.792.775.013,57	5.720.810.818,57

2) Deposito



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Deposito Pemerintah Kabupaten Rembang per 31 Desember 2018 yang berjangka waktu satu bulan atau setara kas senilai Rp65.000.000.000,00 dapat kami uraikan sebagai berikut

Tabel 5.3.4
Daftar Penempatan Deposito

NO	BANK	NO SERI	MUTASI		NOMINAL
			TGL. PENEMPATAN	TGL. JTH TEMPO	
			12/01/2015	12/02/2015	10.000.000.000
		R124305	06/02/2015	06/03/2015	10.000.000.000
		A237248	01/03/2018	01/04/2018	10.000.000.000
		A237249	01/03/2018	01/04/2018	10.000.000.000
		A237250	01/03/2018	01/04/2018	25.000.000.000
				Jumlah	65.000.000.000

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan uang yang masih ada pada Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2017. Kas di bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp68.000,00 turun senilai Rp18.890.162,00 dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2017 senilai Rp18.958.162,00. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.5
Kas Bendahara Penerimaan

No	Bendahara Penerimaan SKPD	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	9.414.462,00
2	Dinas Indagkop dan UKM	68.000,00	9.543.700,00
	Jumlah	68.000,00	18.958.162,00

Kas Bendaharaan Penerimaan tersebut merupakan penerimaan retribusi di Dinas Indagkop dan UKM senilai Rp68.000 merupakan retribusi kios pasar dan telah disetor ke Kas Umum Daerah di tahun anggaran 2019

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2018 dimana pendapatannya telah diakui sebagai Pendapatan retribusi di LRA Tahun 2018.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca adalah sisa dana/saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD (unit kerja badan, dinas, dan kantor) yang berasal sisa kas di rekening bendahara



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

pengeluaran dari Uang Persediaan yang masih belum disetor per 31 Desember 2018.

Tabel 5.3.6
Kas Bendahara Pengeluarann

No	Bendahara Pengeluaran SKPD	31-Des-18	31-Des-17
		(Rp)	(Rp)
1	Dinas Kesehatan	610.000,00	80.000.000,00
2	Sekretariat Daerah	8.419.331,00	2.163.360,00
	Jumlah	9.029.331,00	82.163.360,00

Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp9.029.331,00 merupakan sisa pajak di Sekretariat Daerah yang per 31 Desember 2018 belum disetor dan baru disetor di bulan Januari 2019 sebesar Rp8.419.331,00 dan sisa belanja kegiatan BOK yang belum disetor ke Kas Umum Daerah sebesar Rp610.000,00 dan telah disetor tanggal 10 April 2019.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018, tidak termasuk saldo kas per 31 Desember 2018, dengan uraian sebagai berikut:

- Saldo kas yang berasal dari Belanja Honor yang direalisasikan melalui LS Bendahara sebesar RpRp35.048.813,00, yang sampai dengan per 31 Desember 2018 belum dibayarkan. Atas saldo kas tersebut telah dicairkan dan dibayarkan kepada masing-masing pegawai yang berhak pada Bulan Januari Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Rembang telah mencatat belanja tersebut sebagai realisasi pada LRA TA 2018, sebesar nilai SP2D yang diterbitkan tersebut, meskipun pada per 31 Desember 2018 atas uang tersebut masih tersimpan di rekening Bendahara Pengeluaran. Untuk tujuan rekonsiliasi bank, penarikan atas LS honorarium ini akan mengoreksi (mengurangi) besarnya saldo kas di bank menurut rekening koran (catatan bank).

- Saldo kas yang berasal dari saldo minimal yang disyaratkan oleh bank, untuk dapat disisakan disetiap akhir tahun anggaran. Saldo tersebut berasal dari saldo-saldo pada saat pembukaan rekening, yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari saldo kas per 31 Desember 2018.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 903/1216/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pelaksanaan Rekening OPD dalam bentuk Giro, terkait saldo minimal (pembukaan awal rekening) telah dilakukan auto debit oleh Bank Jateng Cabang Rembang masuk ke Kas Umum Daerah sekaligus penutupan rekening mulai tanggal 25 April s/d 13 Mei 2019, untuk selanjutnya dilakukan pembukaan rekening giro dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/1382/2019 tanggal 23 Mei 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Rincian SP2D LS Belanja Honor dan saldo minimal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.7
Daftar LS Honor

No	SKPD	Saldo Minimal (pembukaan awal rekening)	Nilai LS di rekening
1	Dinas lingkungan hidup	179.657,00	4.205.000,00
2	Kecamatan sulang	95.246,00	1.471.913,00
3	Kecamatan sale	10.578,00	19.538.000,00
4	Kecamatan kragan	75.017,00	1.983.200,00
5	Kecamatan sedan	100.051,00	7.850.700,00
	Jumlah	460.549,00	35.048.813,00

d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Rekening di Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) senilai Rp3.635.712.861,04 mencakup BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang senilai Rp210.968.392,04 dan BLUD Puskesmas di Kabupaten Rembang senilai Rp3.424.744.469,00 yang terdiri atas 16 (enam belas) Puskesmas BLUD unit kerja yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.

- 1) Kas BLUD Rumah Sakit dr. R. Soetrasno

Tabel 5.3.8
Daftar Rekening BLUD RSUD

No	Kas BLUD	No Rekening	Per 31-12-2018 Rp	Per 31-12-2017 Rp
1	Bank Jateng Bendahara Penerimaan	2-029-070004	165.753.054,00	1.017.270.316,00
2	Bank Mandiri-BLUD RSUD	135-00-0666664-6	3.666.844,40	18.897.407,34
3	Bank Mandiri-BLUD RSUD	135-00-1041662-4	2.805.788,33	11.052.795,60
4	Bank BRI - BLUD RSUD	0142-01-001378-30- 3	1.932.775,00	
5	Tunai di Bendahara Penerimaan		36.809.930,31	60.572.544,31
	Jumlah		210.968.392,04	1.107.793.063,25

Saldo Kas di BLUD senilai Rp210.968.392,04 tersebut merupakan saldo kas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang selama satu periode tahun anggaran 2018 melaksanakan pengelolaan keuangan atas penerimaan pendapatannya (dari layanan umum), sesuai dengan peraturan yang ada sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk operasional kegiatan Rumah Sakit, di luar gaji pegawai negeri sipil dan dana kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

- 2) Kas BLUD 16 Puskesmas

Tabel 5.3.9
Daftar Rekening BLUD Puskesmas



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Nama Puskesmas	No. Rekening	Bank	Saldo Kas per 31 Des 2018 (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Puskesmas Rembang 1	2-029-11802-0	Bank Jateng	4.224.802,00	173.396.031,00
		6030-01-013805-53-5	BRI Unit Rembang Kota 1	169.171.229,00	
2.	Puskesmas Rembang 2	2-029-11800-3	Bank Jateng	111.302.879,00	199.232.164,00
		6031-01-015211-53-2	BRI Unit Rembang Kota 2	87.929.285,00	
3.	Puskesmas Bulu	3-029-22906-5	Bank Jateng	42.794,00	2.531.747,00
		6036-01-017883-53-9	BRI Unit Sulang	2.488.953,00	
4.	Puskesmas Sumber	2-029-11801-1	Bank Jateng	524.330.672,00	645.251.771,00
		6037-01-011446-53-7	BRI Unit Sumber	120.921.099,00	
5.	Puskesmas Lasem	3-152-00064-1	Bank Jateng	27.636.968,00	52.348.983,80
		6027-01-018152-53-4	BRI Unit Lasem	24.712.015,80	
6.	Puskesmas Pancur	3-152-00065-0	Bank Jateng	47.317.511,00	131.821.759,00
		7079-01-008406-53-7	BRI Unit Sumberagung	84.504.248,00	
7.	Puskesmas Sluke	2-029-11815-1	Bank Jateng	2.916.459,00	7.160.113,40
		6035-01-010378-53-9	BRI Unit Sluke	4.243.654,40	
8.	Puskesmas Pamotan	2-029-11793-7	Bank Jateng	101.759.022,00	332.763.176,00
		6028-01-019902-53-8	BRI Unit Pamotan	231.004.154,00	
9.	Puskesmas Gunem	2-029-11811-9	Bank Jateng	307.399.219,00	359.095.096,00
		6028-01-019903-53-4	BRI Unit Pamotan	51.695.877,00	
10.	Puskesmas Sale	2-029-11805-4	Bank Jateng	844.255,00	4.672.186,60
		6032-01-011790-53-8	BRI Unit Sale	3.827.931,60	
11.	Puskesmas Kragan 1	2-029-11818-6	Bank Jateng	50.758,00	4.744.328,40
		6026-01-015559-53-9	BRI Unit Kragan	4.693.570,40	
12.	Puskesmas Kragan 2	2-029-11816-0	Bank Jateng	49.443.370,00	78.711.625,00
		6029-01-013394-53-7	BRI Unit Pandangan	29.268.255,00	
13.	Puskesmas Sedan	2-029-11820-8	Bank Jateng	320.065.943,00	769.494.653,20
		6034-01-014958-53-1	BRI Unit Sedan	449.428.710,20	
14.	Puskesmas Sarang	2-029-11814-3	Bank Jateng	290.904.733,00	512.568.684,60
		6033-01-014381-53-6	BRI Unit Sarang	221.663.951,60	
15.	Puskesmas Kaliori	2-029-11804-6	Bank Jateng	93.323.602,00	107.932.460,00
		6025-01-008922-53-5	BRI Unit Kaliori	14.608.858,00	
16.	Puskesmas Sulang	2-029-11803-8	Bank Jateng	13.878.665,00	43.019.690,00
		6036-01-017882-53-7	BRI Unit Sulang	29.141.025,00	
				Total Kas	3.424.744.469,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

e. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.306.646.411,00 merupakan saldo kas pada satuan pendidikan (SD, dan SMP Negeri) di Kabupaten Rembang yang mencakup atas sisa lebih dana BOS dan pendapatan jasa giro yang belum disetor ke Kas Daerah, yang menjadi bagian dari SILPA per 31 Desember 2018. Selain itu terdapat saldo kas yang berasal dari kewajiban perpajakan per 31 Desember 2018 yang belum disetor ke Kas Negara, dan tidak menjadi bagian dari SILPA per 31 Desember 2018. Rincian saldo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.	Sisa Lebih Dana Bos 2018 (sisa belanja)	Rp	981.714.462,00
2.	Kurang setor jasa giro (bunga bank)	Rp	4.885.580,00
3.	Pajak yang belum disetor	Rp	320.046.369,00
	Jumlah	Rp	1.306.646.411,00

Daftar rincian Kas di Bendahara BOS pada masing-masing satuan pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran 5.4**

f. Setara Kas

Tidak ada saldo setara kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

g. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat mempergunakan investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposito*).

h. Piutang Pajak

Saldo piutang Pajak per 31 Desember 2018 terdiri dari:

Tabel 5.3.10
Daftar Piutang Pajak

No	Uraian	per 31-12-2018 Rp	per 31-12-2017 Rp
1	Piutang Pajak	29.485.235.037,00	21.942.027.344,00
2	Penyisihan Piutang Pajak	(16.281.567.115,23)	(15.638.332.200,07)
	Jumlah	13.203.667.921,78	6.303.695.143,93

Piutang Pajak senilai Rp29.485.235.037,00 dan penyisihan piutang pajak senilai Rp16.281.567.115,23 Nilai penyisihan piutang pajak daerah sebesar Rp16.281.567.115,23, meliputi Penyisihan Piutang Pajak selain PBB-P2



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

sebesar Rp1.268.451.417,21 dan Piutang PBB-P2 sebesar Rp15.012.115.689,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun berkenaan, yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.11
Rincian jenis Piutang Pajak

No.	Jenis Piutang	31-Des-18	31-Des-17
		Rp	Rp
1	Pajak Hotel	210.143.425,00	107.147.375,00
2	Pajak Restoran	32.360.150,00	32.323.100,00
3	Pajak Hiburan	34.528.000,00	49.018.000,00
4	Pajak Reklame	2.747.450,00	2.927.450,00
5	Pajak Sarang Burung Walet	209.921.000,00	209.671.000,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.337.447.758,00	4.435.067.152,00
7	Pajak Air Tanah	7.896.210,00	29.155.209,00
8	Pajak Parkir	800.000,00	1.900.000,00
	Jumlah	11.835.843.993,00	4.867.209.286,00

Dari nilai piutang pajak daerah per 31 Desember 2018 senilai Rp11.835.843.993,00. Fcv tersebut, sesuai dengan Penilaian kualitas penyisihan piutang diukur dari kualitas umur piutang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang, dikategorikan atas kelompok lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet. Rincian piutang dan penyisihan senilai Rp1.269.451.417,21 dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.12
Penyisihan Piutang Pajak

URAIAN RINCIAN PIUTANG	SALDO AKHIR	AGING SCHEDULE				PENYISIHAN PIUTANG
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
		0-1 th (0,5%)	1-2 th (10%)	2-3 Th (50%)	> 3 TH (100%)	
1	2	3	4	5	6	7
Pajak Hotel	210.143.425,00	104.625.550,00	104.817.875,00	-	700.000,00	11.704.915,25
Pajak Restoran	32.360.150,00	5.229.550,00	1.680.600,00	7.862.500,00	17.587.500,00	21.712.957,75
Pajak Hiburan	34.528.000,00	1.420.000,00	80.000,00	5.800.000,00	27.228.000,00	30.143.100,00
Pajak Reklame	2.747.450,00	-	-	500.000,00	2.247.450,00	2.497.450,00
Pajak Sarang Burung	209.921.000,00	1.087.500,00	2.012.500,00	1.680.000,00	205.141.000,00	206.187.687,50



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN RINCIAN PIUTANG	SALDO AKHIR	AGING SCHEDULE				PENYISIHAN PIUTANG
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
		0-1 th (0,5%)	1- 2 th (10 %)	2-3 Th (50 %)	> 3 TH (100 %)	
1	2	3	4	5	6	7
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.337.447.758,00	10.334.710.881,00	51.909.550,00	34.240.000,00	916.587.327,00	990.571.836,41
Pajak Air Tanah	7.896.210,00	1.372.060,00	132.100,00	958.300,00	5.433.750,00	5.932.970,30
Pajak Parkir	800.000,00	100.000,00	-	-	700.000,00	700.500,00
Jumlah	11.835.843.993,00	10.448.545.541,00	160.632.625,00	51.040.800,00	1.175.625.027,00	1.269.451.417,21

2) Piutang Pajak PBB P2

Piutang Pajak PBB P2 adalah piutang pajak PBB P2 hasil serah terima dari Kementerian Keuangan/KPP Pati dan Piutang PBB P2 yang murni dilaksanakan Kabupaten Rembang sejak tahun anggaran 2013 (tidak termasuk piutang yang telah diserahkan) yang sampai dengan 31 Desember 2018 senilai Rp17.649.391.044,00 dengan uraian sebagai berikut

Tabel 5.3.13
Rincian Piutang PBB 2

Uraian	31-Des-18	31-Des-17
	Rp	Rp
Piutang PBB P2 Pelimpahan dari Pemerintah Pusat	11.875.443.685,00	12.005.288.564,00
Piutang PBB P2 2013	1.054.703.002,00	1.082.217.342,00
Piutang PBB P2 2014	920.524.720,00	954.854.124,00
Piutang PBB P2 2015	593.538.713,00	629.395.009,00
Piutang PBB P2 2016	914.096.061,00	976.261.094,00
Piutang PBB P2 2017	1.046.338.139,00	1.426.801.925,00
Piutang PBB P2 2018	1.244.746.724,00	0,00
Jumlah	17.649.391.044,00	17.074.818.058,00

Dari nilai piutang PBB-P2 per 31 Desember 2018 senilai Rp17.649.391.044,00 tersebut, sesuai dengan Penilaian kualitas penyisihan piutang diukur dari kualitas umur piutang, dikategorikan atas kelompok lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet. Nilai penyisihan piutang PBB-P2 senilai Rp15.012.115.698,02 perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Penyisihan Piutang PBB 2

URAIAN RINCIAN PIUTANG	SALDO AKHIR	AGING SCHEDULE				PENYISIHAN PIUTANG
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
		0-1 th (0,5%)	1- 2 th (10 %)	2-3 Th (50 %)	> 3 TH (100 %)	
1	2	3	4	5	6	7
Piutang 2008-2012	11.875.443.685,00				11.875.443.685,00	11.875.443.685,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN RINCIAN PIUTANG	SALDO AKHIR	AGING SCHEDULE				PENYISIHAN PIUTANG
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
		0-1 th (0,5%)	1- 2 th (10 %)	2-3 Th (50 %)	> 3 TH (100 %)	
1	2	3	4	5	6	7
. Piutang 2013	1.054.703.002,00				1.054.703.002,00	1.054.703.002,00
. Piutang 2014	920.524.720,00				920.524.720,00	920.524.720,00
. Piutang 2015	593.538.713,00				593.538.713,00	593.538.713,00
. Piutang 2016	914.096.061,00			914.096.061,00		457.048.030,50
. Piutang 2017	1.046.338.139,00		1.046.338.139,00			104.633.813,90
. Piutang 2018	1.244.746.724,00	1.244.746.724,00				6.223.733,62
Jumlah	17.649.391.044,00	1.244.746.724,00	1.046.338.139,00	914.096.061,00	14.444.210.120,00	15.012.115.698,02

Berkaitan dengan piutang pajak dari hasil serah terima dari Kementerian Keuangan/KPP Pati Kabupaten Rembang saat ini masih dalam proses rekonsiliasi data melakukan validasi data pelunasan pajak periode tahun 2008 – 2012, untuk mengidentifikasi wajib pajak mana yang sebenarnya telah lunas bayar atau yang masih memiliki piutang sampai tingkat desa.

Piutang Pajak sebesar Rp29.485.235.037,00 belum termasuk dengan piutang denda per 31 Desember 2018 sebesar Rp89.804.660,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.15
Piutang Denda Pajak

Uraian	Ketetapan 2017	Ketetapan 2018	Realisasi	Sisa Ketetapan
- Denda Hotel	0,00	66.410.975	66.410.975	0,00
- Denda Restoran	0,00	2.186.097	2.053.097	133.000
- Denda Hiburan	0,00	3.560.350	3.560.350	0,00
- Denda Reklame	0,00	873.190	873.190	0,00
- Denda Parkir	0,00	387.380	384.380	3.000
- Denda ABT	0,00	5.922.730	5.001.155	921.575
- Denda Sarang burung	0,00	178.750	178.750	0,00
- Denda Mineral Bkn Logam & Batuan	12.720.100	153.469.555	77.442.570	88.747.085
- Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	146.200	146.200	0,00
Jumlah	12.720.100	233.135.227	156.050.667	89.804.660

Penyisihan piutang denda sebesar Rp89.804.660,00 adalah Rp2.437.686,00 dengan perhitungan ($Rp12.720.100 \times 10\% = Rp1.272.010,00$) masuk kategori kurang lancar ditambah piutang denda TA 2018 ($Rp233.135.227 \times 0,5\% = Rp1.165.676,14$) masuk kategori lancar.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

i. Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 tersebut terdiri dari:

Tabel 5.3.16
Piutang Retribusi

No	Uraian	per 31-12-2018 Rp	per 31-12-2017 Rp
1	Piutang Retribusi	1.524.677.422,00	1.408.571.750,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(501.597.241,86)	(390.830.084,00)
	Jumlah	1.023.080.180,14	1.017.741.666,00

Piutang Retribusi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan, yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) namun belum dibayar oleh pihak yang menikmati pelayanan. Saldo piutang retribusi pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp1.524.677.422,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.17
Rincian Piutang Retribusi

No.	Uraian	31-Des-18	31-Des-17
		Rp	Rp
1	Retribusi Sewa Kios Pasar	256.383.990,00	175.161.000,00
2	Retribusi Sewa Kios Terminal	269.776.500,00	232.844.250,00
3	Retribusi Sewa Tanah dan rumah	26.854.000,00	27.104.000,00
4	Retribusi Jasa Usaha-Kontribusi Kerjasama Revitalisasi Pasar Sedan	255.850.300,00	238.264.000,00
5	Retribusi Kendaraan – DPU	78.816.000,00	35.198.500,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi/OR	630.000.000,00	700.000.000,00
7	Retribusi menara telekomunikasi	6.996.632,00	0,00
	Jumlah	1.524.677.422,00	1.408.571.750,00

Dari nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 senilai Rp1.524.677.422,00 tersebut, sesuai dengan Penilaian kualitas penyisihan piutang diukur dari kualitas umur piutang, dikategorikan atas kelompok lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet. Nilai penyisihan Piutang Retribusi senilai Rp501.597.241,86 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.3.18
Penyisihan Piutang Retribusi

URAIAN PIUTANG	SALDO AKHIR	AGING SCHEDULE				PENYISIHAN PIUTANG
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

		0-1 th (0,5%)	1- 2 th (10 %)	2-3 Th (50 %)	> 3 TH (100 %)	
Retribusi Sewa Kios Pasar	256.383.990,00	126.118.240,00	8.943.000,00	10.356.500,00	110.966.250,00	117.669.391,20
Restribusi Sewa Kios Terminal	269.776.500,00	39.049.500,00	26.704.500,00	16.399.500,00	187.623.000,00	198.688.447,50
Retribusi Sewa Tanah dan rumah	26.854.000,00	300.000,00	0,00	240.000,00	26.314.000,00	26.435.500,00
Retribusi Jasa Usaha-Kontribusi Kerjasama Revitalisasi Pasar Sedan	255.850.300,00	0,00	70.041.400,00	75.176.400,00	110.632.500,00	155.224.840,00
Retribusi Kendaraan – DPU	78.816.000,00	78.816.000,00	0,00	0,00	0,00	394.080,00
Retribusi Tempat Rekreasi/OR	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Retribusi menara telekomunikasi	6.996.632,00	6.996.632,00	0,00	0,00	0,00	34.983,16
Jumlah	1.524.677.422,00	881.280.372,00	105.688.900,00	102.172.400,00	435.535.750,00	501.597.241,86

j. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pada Tahun Anggaran 2018 tidak ada Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan.

k. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2018 terdiri dari :

Tabel 5.3.19
Piutang Lain2 PAD Yang Sah

No	Uraian	per 31-12-2018 Rp	per 31-12-2017 Rp
1	Piutang Lain-Lain PAD	41.870.925.112,00	24.088.739.269,00
2	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD	(411.098.018,63)	(290.371.148,51)
	Jumlah	41.459.827.093,37	23.798.368.120,49

Piutang Lain-lain PAD yang sah senilai Rp41.870.925.112,00 terdiri dari piutang pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetrasno Rembang sebesar Rp38.727.460.312,00, piutang BPJS di BLUD 16 (enam belas) Puskesmas sebesar Rp3.143.339.800,00 dan piutang jasa giro di BPPKAD merupakan Jasa giro dari Dinas Perumahan dan Kawasan sebesar Rp125.000,00.

Sedangkan penyisihan piutang lain-lain PAD senilai Rp411.098.018,63 terdiri atas piutang pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetrasno Rembang sebesar Rp395.380.694,63, piutang BPJS di BLUD 16 (enam belas) Puskesmas sebesar Rp15.716.699,00 serta piutang jasa giro di BPPKAD merupakan Jasa giro dari Dinas Perumahan dan Kawasan sebesar Rp625,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Piutang BLUD adalah piutang dari Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang yang merupakan Piutang Retribusi Pelayanan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Kesehatan RSUD pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp38.727.460.312,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.3.20
Piutang BLUD

No	Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
		Rp	Rp
1	Piutang Umum	234.082.704,00	262.937.968,00
2	Piutang Askes	15.159,00	15.159,00
3	Piutang AJII	1.506.639,00	9.421,00
4	Piutang Askes PT KAI	327.579,00	327.579,00
5	Piutang Jamsostek	479,00	479
6	Piutang Jasa Raharja	484.211.850,00	450934541
7	Piutang BPJS	37.992.788.346,00	21.502.119.672,00
8	Piutang Parkir	14.527.556,00	0,00
	JUMLAH	38.727.460.312,00	22.216.344.819,00

Dari nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2018 senilai Rp38.727.460.312,00 tersebut, sesuai dengan Penilaian kualitas penyisihan piutang diukur dari kualitas umur piutang, dikategorikan atas kelompok lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet. Nilai penyisihan Piutang BLUD senilai Rp395.380.694,63 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.3.21
Penyisihan Piutang BLUD

URAIAN RINCIAN PIUTANG	SALDO AKHIR	AGING SCHEDULE				PENYISIHAN PIUTANG
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
		0-1 th (0.5%)	1-2 th (10%)	2-3 th (50%)	> 3 th (100%)	
Piutang Umum	234.082.704,00	20.467.155,00	-	22.309.906,00	191.305.643,00	202.562.931,78
Piutang Askes	15.159,00	-			15.159,00	15.159,00
Piutang AJII	1.506.639,00	1.497.218,00			9.421,00	16.907,09
Piutang Askes PT KAI	327.579,00	-			327.579,00	327.579,00
Piutang Jamsostek	479,00	-			479,00	479,00
Piutang Jasa Raharja	484.211.850,00	484.211.850,00				2.421.059,25
Piutang BPJS	37.992.788.346,00	37.992.788.346,00				189.963.941,73
Parkir	14.527.556,00	14.527.556,00				72.637,78
JUMLAH	38.727.460.312,00	38.513.492.125,00	-	22.309.906,00	191.658.281,00	395.380.694,63

- 2) Piutang BLUD 16 Puskesmas
Merupakan nilai piutang atas klaim di bulan April sampai dengan Desember 2017 senilai Rp3.143.339.800,00 yang telah diverifikasi.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Dan dari nilai piutang per 31 Desember 2018 senilai Rp3.143.339.800,00 dilakukan perhitungan penyisihan piutang senilai Rp15.716.699,00 atau 0,5% dari nilai piutang (kategori lancar).

Data piutang BPJS yang telah terverifikasi terdapat pada lampiran 5.5

3) Piutang Jasa Giro

Merupakan jasa giro di BPPKAD merupakan jasa giro dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang senilai Rp125.000,00 baru disetorkan di Maret 2019 dengan nilai penyisihan lancar (0,5%) sebesar Rp625,00

I. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari:

Tabel 5.3.22
Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	per 31-12-2018 Rp	per 31-12-2017 Rp
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	3.786.839.782,00	2.850.065.197,00
2	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	(18.934.198,91)	(2.850.065.197,00)
	Jumlah	3.767.905.583,09	0,00

Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan senilai Rp3.786.839.782,00 dengan penyisihan piutang senilai Rp18.934.198,91 atau dengan kategori lancar 0,5% merupakan kurang bayar Dana Bagi hasil dari pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/pmk.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.23
Daftar Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kurang bayar bagi hasil SDA kehutanan	764.139.727,00
2	Kurang bayar bagi hasil SDA mineral & Batubara	508.545,00
3	Kurang bayar bagi hasil SDA panas bumi	10.170.351,00
4	Kurang bayar bagi hasil SDA perikanan	99.184.671,00
5	Kurang bayar DBH PBB	2.591.947.827,00
6	Kurang bayar bagi hasil PPh 21, 25/29	306.079.460,00
7	Kurang bayar bagi hasil cukai tembakau	14.809.201,00
	Jumlah	3.786.839.782,00

m. Piutang Transfer Pemerintah Daerah

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.3.24
Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah

No	Uraian	per 31-12-2018 Rp	per 31-12-2017 Rp
1	Piutang Transfer Pemerintah Daerah	5.347.592.922,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah	(26.737.964,61)	0,00
	Jumlah	5.320.854.957,39	0,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.347.592.922,00 dengan penyisihan piutang senilai Rp26.737.964,61 atau dengan kategori lancar 0,5% merupakan kurang salur penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pemberitahuan kepada seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan nomor surat : 971.1/03.901 yang mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.25
Daftar Rincian Piutang Transfer

No	Uraian	Nilai
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.552.162.488,0
2	Bea Balik Nama Kendaraan	898.440.678,0
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.895.145.395,0
4	Pajak Air Permukaan	1.844.361,0
	Jumlah	5.347.592.922,0

n. Beban dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka per 31 Desember 2018 senilai Rp197.229.341,18 merupakan pengeluaran biaya Tahun Anggaran 2018 yang menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2018 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.. Biaya dibayar di muka ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.3.26
Daftar Rincian Beban dibayar di muka

No	SKPD	Uraian	Nilai Premi/kontrak	TMT	Jatuh Tempo	Beban dibayar dimuka
1	2	3	4	5	6	7
1	RSU	Asuransi keselamatan dokter	66.600.000,00	12/07/2018	12/07/2019	35.215.889,75
	RSU	Asuransi Kendaraan bermotor	50.315.100,00	02/05/2018	02/05/2019	16.817.649,98
2	BPPKAD	Asuransi Bangunan gedung kantor	24.009.824,00	01/08/2018	01/08/2019	14.011.212,36
	BPPKAD	Asuransi Kendaraan bermotor	52.330.296,00	01/08/2018	01/08/2019	30.537.953,56
	BPPKAD	Asuransi Kebakaran bangunan pasar	93.195.000,00	01/08/2018	01/08/2019	54.385.027,40
	BPPKAD	Sewa tanah (ds gading) untuk lokasi jembatan timbang	39.500.000,00	01/03/2018	28/02/2020	22.973.936,90



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	SKPD	Uraian	Nilai Premi/kontrak	TMT	Jatuh Tempo	Beban dibayar dimuka
1	2	3	4	5	6	7
	BPPKAD	Sewa Tanah PT KAI (wonokerto)) untuk lokasi jembatan timbang	40.000.000,00	01/03/2018	29/02/2020	23.287.671,23
		TOTAL	365.950.220,00			197.229.341,18

o. Persediaan

Persediaan merupakan persediaan barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Rembang. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*stock opname*). Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2018 senilai RpRp16.532.994.168,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.27
Persediaan

No	Uraian	per 31-12-2018 Rp	per 31-12-2017 Rp
1	Persediaan Bahan Habis Pakai		
	Persediaan Alat Tulis Kantor	266.943.799,00	354.561.837,00
	Persediaan Alat Listrik	51.260.600,00	46.945.850,00
	Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	4.632.500,00	3.998.000,00
	Persediaan alat kebersihan	228.763.775,00	131.581.390,00
2	Persediaan Material/ Bahan		
	Persediaan bibit ternak	4.312.500,00	97.835.500,00
	Persediaan Obat - obatan (kesehatan)	12.703.524.809,95	15.331.895.561,93
	Persediaan bahan kimia	1.364.137.197,00	6.550.014,00
	<i>Persediaan Bahan Makanan Pokok</i>	25.255.800,00	70.871.625,00
	<i>Persediaan Bahan Komputer</i>	476.913.030,00	148.371.980,00
	<i>Persediaan Alat Peraga/ Bahan Praktek</i>	23.015.000,00	1.870.000,00
	Persediaan bahan cetakan	807.349.178,80	860.060.554,20
	Persediaan alat laboratorium	328.928.968,30	210.852.147,00
	Persediaan alat kedokteran dan medis lainnya	242.688.510,00	197.620.859,00
	Persediaan alat rumah tangga	5.268.500,00	1.329.500,00
3	Persediaan Barang Lainnya		-
	Persediaan brg yg akan diberikan Kepada Pihak Ketiga	-	-
	Persediaan brg yg dijual kepada Pihak Ketiga	-	-
	Jumlah	16.532.994.168,05	17.464.344.818,13

Rincian persediaan masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 5.6



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2018 senilai Rp 2.538.888.320,00 setelah ada pengurangan sebesar Rp682.268.857,00 dari saldo per 31 Desember 2017.

Tabel 5.3.28
Investasi Non Permanen

No	Unit Kerja	per 31-12-2018 Rp	per 31-12-2017 Rp
1)	Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi	Rp 2.538.888.320	Rp3.221.157.177,00
	Jumlah	2.538.888.320,00	3.221.157.177,00

Saldo akhir Investasi Non Permanen di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM senilai Rp 2.538.888.320,00 merupakan sisa pokok perguliran dana dari tahun 2001 sampai dengan 2007.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pengelola LP-UKM dan BPR/BKK di Kabupaten Rembang yang mengelola dana bergulir, terdapat rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.29
Rincian sisa perguliran per Bank chaneling

NO	NAMA BPR / BKK	TOTAL PIUTANG DANA BERGULIR (POKOK) (Rp)
1	BPR - BKK CAB. SULANG	137.115.500
2	BPR - BKK CAB. SLUKE	56.368.300
3	BPR - BKK CAB. GUNEM	30.861.400
4	BPR - BKK CAB. REMBANG	1.206.157.862
5	BPR - BKK CAB. LASEM	117.299.500
6	BPR - BKK CAB. SALE	49.930.681
7	BPR - BKK CAB. PAMOTAN	310.693.160
8	BPR - BKK CAB. SARANG	128.057.450
9	BPR - BKK CAB. PANCUR	25.000.000
10	BPR - BKK CAB. KRAGAN	45.858.925
11	BPR - BKK CAB. SEDAN	134.806.890
12	BKK KALIORI CAB. BULU	-
13	BKK KALIORI	131.872.650
14	BKK KALIORI CAB. SUMBER	90.543.300
15	PD BANK PASAR	74.322.702
	JUMLAH	2.538.888.320

b. Investasi Permanen



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Rembang berupa penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT Bank Jateng Cabang Rembang serta PT PRPP Jateng.

Investasi permanen sampai dengan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing - masing senilai Rp131.390.900.370,03 dan Rp119.383.228.390,37

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Rembang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.30
Daftar rincian Investasi Permanen

No.	BUMD	Kepemilikan Saham (%)	per 31-12-2018 Rp	per 31-12-2017 Rp
1	PD BPR Bank Pasar	100%	13.875.500.892,00	13.621.605.243,00
2	PD Percetakan Daerah	100%	2.989.201.956,00	2.796.093.360,00
3	PDAM Rembang	100%	11.581.819.942,00	9.408.220.148,00
4	PD Apotek Daerah	100%	390.834.500,80	390.834.500,80
5	PD BPRBKK Lasem	49,00%	30.723.978.092,92	29.752.828.462,63
6	PD BPR BKK Kaliori	27,76%	2.990.705.934,65	3.052.585.184,57
7	PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ)	100,00%	30.490.230.917,89	30.408.065.063,24
8	PT. Rembang Migas Energy	99,90%	766.328.133,77	742.696.428,13
9	PT BPD Jateng	1,13%	37.376.000.000,00	28.954.000.000,00
10	PT PRPP Jateng	0,51%	206.300.000,00	206.300.000,00
		Jumlah	131.390.900.370,03	119.333.228.390,37

Saldo Investasi permanen per 31 Desember 2018 senilai Rp131.390.900.370, merupakan nilai investasi jangka Panjang permanen Kabupaten Rembang dengan menilai penyertaan modal berdasar kepemilikan saham kepemilikan saham kurang dari 20% menggunakan metode biaya dan kepemilikan saham di atas 20% menggunakan metode ekuitas.

Tabel 5.3.31
Metode Ekuitas dan Metode Biaya

NO	BUMD	PERHITUNGAN COST METHOD			PERHITUNGAN EQUITY METHOD		
		EKUITAS 2017 Audited	PENYERTAAN MODAL 2018	%	Nilai Ekuitas Akhir BUMD per 31 Des 2018 audited	EKUITAS BERDASARKAN LK BUMD (Audited)	Penyesuaian
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8 =(3+4)-7
A.	Equity Method						
1	PD BPR Bank Pasar	13.621.605.243,00	0,00	100,00	13.875.500.892,00	13.875.500.892,00	253.895.649,00
2	PD Percetakan Daerah	2.796.093.360,00	0,00	100,00	2.989.201.956,00	2.989.201.956,00	193.108.596,00
3	PDAM Rembang	9.408.220.148,00	1.000.000.000,00	100,00	11.581.819.942,00	11.581.819.942,00	1.173.599.794,00
4	PD Apotek Daerah	390.834.500,80	0,00	100,00	390.834.500,80	390.834.500,80	-
5	PD BPR BKK Lasem	29.752.828.462,63	0,00	49,00	62.701.996.108,00	30.723.978.092,92	971.149.630,29



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

6	PD BPR BKK Kaliori	3.052.585.184,57	0,00	27,76	10.773.436.364,00	2.990.705.934,65	(61.879.249,92)
7	PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ)	30.408.065.063,24	0,00	100,00	30.490.230.917,89	30.490.230.917,89	82.165.854,65
8	PT Rembang Migas Energi (RME)	742.696.428,13	1.000.000.000,00	99,90	767.095.229,00	766.328.133,77	(976.368.294,36)
	Jumlah A	90.172.928.390,37	2.000.000.000,00		133.570.115.909,69	93.808.600.370,03	1.635.671.979,66
B.	Cost Method						
9	PT BPD Jateng	28.954.000.000,00	8.422.000.000,00	1,13		37.376.000.000,00	
10	PT PRPP Jateng	206.300.000,00	-	0,51		206.300.000,00	
	Jumlah B	29.160.300.000,00	8.422.000.000,00			37.582.300.000,00	-
	Total	119.333.228.390,37	10.422.000.000,00			131.390.900.370,03	1.635.671.979,66

Perhitungan nilai investasi permanen pada BUMD mempergunakan metode ekuitas yang memperhitungkan prosentase saham kepemilikan, berasal dari 7 (tujuh) laporan BUMD yang telah audited yaitu PD BPR Bank Pasar, PD BPR BKK Lasem, PD BPR BKK Kaliori, PT RBSJ, PDAM Rembang, Unit Percetakan Daerah dan PT Rembang Migas Energi.

Sementara untuk unit Apotik Rembang dengan nilai Rp390.834.500,80 sebenarnya sejak pertengahan 2015 sampai dengan saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Berdasarkan disposisi Bapak Bupati atas nota dinas Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Rembang nomor 500/056.1/2017 tanggal 6 April 2017 bahwa Unit Apotik Rembang akan dibubarkan dengan terlebih dahulu dilakukan audit untuk mengetahui kewajiban dan asset yang dimiliki. Sampai dengan laporan ini masih dalam proses.

Sementara perhitungan investasi permanen Pemerintah Kabupaten Rembang pada Bank Jateng dan PRPP menggunakan metode biaya karena kepemilikan modal pemerintah daerah di bawah 20% .

3. ASET TETAP

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Rembang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Rembang melalui pembelian, pembangunan, pemeliharaan dan/atau aset yang dapat dikategorikan hibah.

Nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2018 senilai Rp1.703.230.616.128,22 dan per 31 Desember 2017 senilai Rp1.380.362.930.754,66 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5.3.32
Aset Tetap TA 2018 dan TA 2017

Uraian	Per 31 Des 2018 Rp	Per 31 Des 2017 Rp	Lebih (Kurang) Rp
--------	-----------------------	-----------------------	----------------------



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Per 31 Des 2018 Rp	Per 31 Des 2017 Rp	Lebih (Kurang) Rp
Tanah	286.254.619.909,00	281.687.526.125,00	4.567.093.784,00
Peralatan dan Mesin	392.790.012.211,53	352.394.182.719,87	40.395.829.491,66
Gedung dan Bangunan	781.856.404.669,61	679.120.962.967,61	102.735.441.702,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.094.760.004.096,00	1.058.220.140.070,00	36.539.864.026,00
Aset Tetap Lainnya	64.097.240.865,08	67.931.644.685,00	(3.834.403.819,92)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.959.553.009,00	614.277.300,00	32.345.275.709,00
Akumulasi Penyusutan	(949.487.218.632,00)	(1.059.605.803.112,82)	110.118.584.480,82
Jumlah	1.703.230.616.128,22	1.380.362.930.754,66	322.867.685.373,56

Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.33
Mutasi aset tetap TA 2018

Uraian	Per 31 Des 2017	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2018
	Rp	Rp	Rp	Rp
Tanah	281.687.526.125,00	105.549.833.234,00	100.982.739.450,00	286.254.619.909,00
Peralatan dan Mesin	352.394.182.719,87	67.989.840.126,00	27.594.010.634,34	392.790.012.211,53
Gedung dan Bangunan	679.120.962.967,61	176.732.923.953,00	73.997.482.251,00	781.856.404.669,61
Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.058.220.140.070,00	302.069.299.574,00	265.529.435.548,00	1.094.760.004.096,00
Aset Tetap Lainnya	67.931.644.685,00	15.727.969.436,00	19.562.373.255,92	64.097.240.865,08
Konstruksi Dalam Pengerjaan	614.277.300,00	32.499.140.009,00	153.864.300,00	32.959.553.009,00
Total	2.439.968.733.867,48	700.569.006.332,00	487.819.905.439,26	2.652.717.834.760,22

PENJELASAN PER KELOMPOK AKUN ASET TETAP

Penjelasan saldo masing – masing kelompok akun aset tetap per 31 Desember 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan ke dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam Akun Tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, bangunan air/irigasi, dan jaringan. Nilai saldo Tanah per 31 Desember 2018 senilai Rp286.254.619.909,00 mengalami peningkatan Rp4.567.093.784,00 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 senilai Rp281.687.526.125,00 sebagai berikut:

Tabel 5.3.34



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tanah TA 2018 dan TA 2017

Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017	Lebih (Kurang)
	Rp	Rp	Rp
Tanah	286.254.619.909,00	281.687.526.125,00	4.567.093.784,00
Jumlah	286.254.619.909,00	281.687.526.125,00	4.567.093.784,00

Kenaikan senilai Rp4.567.093.784,00 ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi penambahan aset tanah :

Belanja modal	7.406.104.110,00
Hibah	69.920.000,00
Koreksi	90.104.033.674,00
Mutasi masuk 2018	7.969.775.450,00
Jumlah	105.549.833.234,00

Mutasi pengurangan aset tanah :

Penghapusan	2.784.073.500,00
Koreksi	90.228.890.500,00
Mutasi keluar 2018	7.969.775.450,00
Jumlah	100.982.739.450,00

Nilai akumulasi 4.567.093.784,00

- 1) Belanja modal sebesar Rp7.406.104.110,00 terdiri atas realisasi belanja modal di 3 (tiga) SKPD yaitu Dindikpora Rp1.459.360.000,00, Dinas Lingkungan Hidup Rp3.189.965.110,00 dan Dinindagkop sebesar Rp2.756.779.000,00
- 2) Penambahan tanah karena ada hibah masuk terdiri atas :
 - a. Hibah tanah dari dr. Ali Syofii dengan nilai Rp19.920.000,00 untuk pembangunan mushola berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara dr. Ali Syofii dengan Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 030/293/2018 tanggal 23 Januari 2018.
 - b. Penggantian tanah desa Soditan yang ditempati kantor dan aula kec. Lasem menjadi milik Kec. Lasem sesuai SK NO. 143/194/2001 senilai Rp50.000.000,00
- 3) Mutasi merupakan perpindahan pencatatan antar SKPD sebesar Rp7.969.775.450,00
- 4) Penghapusan aset tanah sebesar Rp2.784.073.500,00 terdiri atas :
 - a. penghapusan pencatatan tanah senilai Rp48.100.000,- atas 4 bidang tanah bangunan rumah golongan III (rumah paramedis) di jl jatirogo km 1 sale senilai Rp48.100.000,00
 - b. Penghapusan tanah pada Dindikpora Rp2.735.973.500 dengan rincian penghapusan aset tanah (SK Pengelola Barang Milik Daerah No 030/0390/2018) Tanah Milik Desa Rp 2.560.273.500 dan double catat sebesar Rp175.700.000
- 5) Koreksi merupakan pencatatan nilai aset tanah diantaranya karena adanya reklasifikasi pencatatan, hasil inventarisasi/penelusuran aset tetap.



- a. Koreksi penambahan terdiri atas :
- Inventarisasi/ identifikasi tanah pada Dindikpora senilai Rp27.856.250,00 yang merupakan hasil identifikasi aset tetap Tanah TA 2018 (SDN Tambakagung Kaliori Rp 11.976.250; SDN KedungTulup Rp15.880.000)
 - Hasil penilaian Tanah TMP Giri Bakti. Senilai Rp176.054.000,00
 - Penambahan aset tanah SDN Pranti Sulang karena sudah keluar sertifikat (HP 1) senilai Rp94.447.500,00
 - Tanah kantor Indagkop utara sesuai SK Bupati Penetapan status no. 032/1980/2018 senilai Rp424.360.000,00
 - Reklasifikasi pencatatan tanah pasar sedan sebesar Rp2.978.202.500,00 dari akun asset lainnya setelah selesainya kerjasama/ kemitraan dengan PT Samijaya.
 - koreksi penilaian tanah bangunan jalan berdasar SK No 030/0819/2019 di DPU Taru sebesar Rp61.131.201.479,00
 - Pencatatan tanah bangunan TPI pada Dinlutkan sebesar Rp43.192.000,00 mencakup TPI Tunggulsari Rp1.410.000,00 TPI Pangkalan Rp14.230.000,00 TPI Pandangan Rp26.264.000,00 dan TPI Karanglincak Rp1.288.000,00
 - koreksi pencatatan atas tanah jalan poros di DPU Taru (didalamnya mencakup tanah jalan RSUD Tireman dengan hasil pengukuran baru) Rp17.053.117.618,00
 - Koreksi tanah waduk dan saluran irigasi berdasarkan SK Bupati No 030/0818/2019 sebesar Rp1.566.635.720,00
 - Koreksi tanah jalan lingkungan sesuai sk 030/002/2019 pada DPKP sebesar Rp5.655.635.720,00
 - koreksi pencatatan kembali atas penghapusan tanah (milik desa) di TA 2017 karena tidak didukung dokumen (sertifikat) untuk tanah bangunan sekolah sebesar Rp953.164.000,00
- b. Koreksi pengurangan terdiri atas :
- koreksi catat krn dobel catat Tanah kantor Dipenda gabung dg Museum Kartini sesuai dg SK NO. 030/0395/2018 sebesar Rp212.500.000,00
 - Koreksi Pencatatan atas di Tanah BBU Sluke karena milik provinsi sebesar Rp540.250.000,00
 - koreksi atas pencatatan hasil penilaian tanah bangunan jalan di LKPD TA 2017 sebesar Rp21.395.340.500,00 berdasarkan pencabutan SK No 030/1724/2017 (karena ada pengukuran ulang sesuai SK No 030/0819/2019 di DPU Taru sebesar Rp61.131.201.479,00)
 - Koreksi atas pencatatan jalan poros RSUD Tireman 2016 sebesar Rp34.900.000,00 karena adanya penghitungan ulang di tahun TA 2018
 - Reklasifikasi pencatatan tanah pelabuhan di Kecamatan sluke sebesar Rp68.045.900.000,00 ke asset lainnya.
- 6) Alasan reklasifikasi asset tanah pelabuhan tersebut dapat dijelaskan :
- a. Kronologi Perolehan Tanah HPL Nomor 1/HPL/BPN RI /2013 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- 1) Berdasarkan Laporan Hasil Audit Operasional Atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, Kabupaten Rembang Tahun 2007 – 2012 Tanggal 12 Pebruari 2012, Bab II Huruf B angka 2 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dimulai sejak tahun 2007 dengan adanya rekomendasi Bupati Rembang tentang lokasi pembangunan pelabuhan umum. Selanjutnya dilakukan negoisasi dengan calon investor pelabuhan dimana Pemerintah Kabupaten Rembang diwakili oleh PT RBSJ.

Pada tahun 2008 dibentuk dibentuk konsorsium PT BAK sebagai investor pembangunan pelabuhan yang selanjutnya menunjuk PT AHK untuk mengerjakan reklamasi. Guna mendukung operasional pelabuhan pada 28 Nopember 2011 dibentuk PT PRK selaku pengelola pelabuhan dengan kepemilikan saham PT BAK (85%) dan PT RBSJ (15%). Ijin operasional sementara dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut pada tanggal 10 April 2012 dan selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2012 Kemenhub menerbitkann ijin usaha kepada PT PRK sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Pada tanggal 2 Januari 2013 kepala BPN RI menerbitkan H{PL 81.616 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang di lokasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke.

Berdasarkan fakta-fakta dokumen secara kronologi diuraikan sbb :

- a) Kesepakatan bersama nomor 053/RBSJ/SPK/VIII/2007 tertanggal 27 Agustus 2007 antara PT RBSJ dengan Sdr. Edo Prsetyo Hananto (CV. BA) dan Sdr. Budhi Setiawan (PTBRTK) serta diketahui oleh Bupati Rembang tentang pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Umum di Kabupaten Rembang;
- b) Rekomendasi Bupati Rembang nomor 12 Tahun 2007 tertanggal 12 September 2007 dan nomor 2 tahun 2008 (tanpa tanggal) April 2008 kepada PT RBSJ tentang lokasi pembangunan pelabuhan umum;
- c) Rekomemdasi Bupati Rembang nomor 2 Tahun 2008 tertanggal 4 April 2008 kepada PT RBK tentang lokasi pembangunan pelabuhan umum;
- d) Pengakhiran kesepakatan bersama (tanpa nomor) / RBSJ/SPK/VI/2008 tertanggal 17 Juni 2008 antara PT RBSJ dengan Sdr. Edo Prasetyo Hananto (CV. BA) dan Sdr. Budhi Setiawan (PT BRTK) tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum di Kabupaten Rembang;



- e) Pendirian PT Bangun Arta Kencana (PT BAK) (akte notaris nomor 131 tertanggal 29 Pebruari 2008) yang antara lain ditandatangani oleh Sdr. Haryanto (CV BA), Sdr. Siswadi (Direktur PT RBSJ) dan Sdr. Budhi Setiawan (PT BRTK) menyebutkan modal disetor sebesar Rp.2.000.000.000,00 dengan komposisi sebesar 62,5 % disetor oleh Sdr. Edo Prasetyo Hananto dan sebesar 37,5% disetor oleh Sdr. Budhi Setiawan;
- f) Nota Kesepakatan Bersama antara PT RBSJ dengan PT BAK tentang Pembangunan Pelabuhan Umum Nasional Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah nomor 001/NKB/RBSJ/I/2009 tertanggal 27 Januari 2009;
- g) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT RBSJ selaku pemilik kegiatan dan PT BAK selaku investor nomor 002/SPK-PLBH/RBSJ/II/2009 tertanggal 5 Pebruari 2009 tentang Pekerjaan Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Umum Nasional Rembang di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dan pada tanggal tersebut muga diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- h) Pelepasan saham Sdr. Budhi Setiawan (37,5%) pada PT BAK dijual kepada Sdr. HM. Zainudin (31-3-2010). Dengan dijualnya saham tersebut berakhir pula pengakuan Sdr. Budhi Setiawan sebagai investor Pelabuhan Rembang Terminal Sluke;
- i) Surat Pernyataan tidak keberatan oleh Agung Rochmadi selaku Direktur Utama PT RBSJ, bahwa tanah hasil reklamasi seluas 81.616 m² untuk diterbitkan HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tertanggal 15 Juni 2011;
- j) Pendirian PT PRK (akta notaris nomor 259 tertanggal 28 Nopember 2011) dengan komposisi kepemilikan saham PT BAK sebesar 2.601 saham (85%) dengan nominal Rp.2.601.000.000,00
- k) Surat Dirjen Perhubungan Laut Nomor PP.10/2/5/DP-12 tertanggal 10 April 2012 tentang pemberian ijin operasional sementara pelabuhan Rembang yang ditujukan kepada Kantor UPP Rembang;
- l) Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 586 tahun 2012 tertanggal 24 Mei 2012 tentang pemberian ijin usaha kepada PT PRK sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
- m) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Rembang dan PT PRK tentang pembangunan dan pengelolaan pelabuhan umum Rembang Nomor 551.3/0536/2012 /001/KB.PRK/XI/2012 Tertanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Rembang , Sdr. M. Salim selaku Pihak Kesatu dan Direktur PT PRK. Sdr. Prilestyio selaku Pihak Kedua yang mengatur antara lain :



- Pihak Kesatu memberikan HGB di atas HPL kepada Pihak Kedua dan memberikan hak menggunakan dan memanfaatkan untuk jasa kepelabuhan dan menetapkan sebagai pengelola pelabuhan;
 - Pelaksanaan kerjasama dimulai bulan April 2012
- n) Keputusan Kepala BPN RI tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang atas tanah terletak di Kabupaten Rembang Nomor 1/HPL/BPN RI/2013 tertanggal 2 Januari 2013, selanjutnya diterbitkan sertifikat Hak Pengelolaan tanah seluas 81.616 m² tertanggal 8 Januari 2013;
- o) Pengajuan permohonan penerbitan HGB di atas HPL kepada Bupati Rembang atas tanah hasil reklamasi oleh PT PRK yang ditandatangani oleh Sdr. Prilestyo selaku Direktur melalui surat nomor 016/PT.PRK/IV/2013 tertanggal 15 April 2013.
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 1/HPL/BPN RI/2013 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Rembang Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dictum menimbang huruf c disebutkan bahwa sebidang tanah tersebut berasal dari reklamasi pantai yang dilakukan oleh PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya berdasarkan Keputusan Bupati Rembang tanggal 11 April 2009 nomor 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi untuk stock Pile Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang tanggal 15 Juni 2011, Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya telah menyerahkan tanah reklamasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, seluas 81.616 m² tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Rembang;

b. NILAI PEROLEHAN TANAH HPL

- 1) Berdasarkan Laporan Hasil Audit Operasional BPKP atas keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, Kabupaten Rembang Tahun 2007 – 2015 bab II huruf B angka (3) disebutkan bahwa pengukuran luas seluruh hasil reklamasi di pelabuhan terminal sluke yang dilakukan pada tahun 2015 oleh 2 lembaga yaitu PT Marga Nusantara Persada dan PT Surveyor Indoonesia adalah seluas 264.640 m² dengan biaya reklamasi sebesar Rp.31.440.500.434,96. (264.640 x Rp.118.804,79/m²)
- 2) Bahwa berdasarkan neraca Pemkab Rembang bahwa tanah reklamasi pelabuhan masuk sebagai asset tetap tanah sebesar Rp.68.045.900.000,00



- 3) Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI sebagaimana di atas luasan HPL sebesar 81.616 m². Dengan mengaju pada Laporan Hasil audit operasional BPKP sebagaimana tercantum dalam angka 1 maka biaya reklamasi seluas 81.616 m² adalah sebesar Rp9.696.371.740,64 (dari perhitungan 81.616 m² x Rp118.804,79/m²)
- c. Terhadap perbedaan biaya reklamasi dalam Laporan Hasil audit operasional BPKP atas keberadaan pelabuhan Rembang terminal Sluke Kab. Rembang tahun 2007-2015 dengan yang tertera dalam neraca Pemkab. Rembang tersebut, dalam buletin teknis Standar Akuntansi Pemerintah 09 dan 15, dijelaskan :
- 1) Buletin teknis Standar Akuntansi Pemerintahan 09 tentang Akuntansi Aset Tetap bahwa Pengakuan Tanah berdasarkan PSAP 07 Paragraf 16, Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila *salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap* milik pemerintah.
 - 2) Buletin teknis Standar Akuntansi Pemerintahan 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual dalam PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Berwujud; (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, *apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah*.
 - 3) Mengingat perundang-undangan yang berkaitan dengan penyajian aset tetap tidak dapat menjangkau seluruh persoalan atau permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Rembang, maka prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal digunakan untuk menjangkau persoalan tersebut. Selanjutnya pencatatan aset hasil reklamasi pantai untuk pengembangan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, dan aset yang sebelumnya dicatat dalam aset tetap direklasifikasi ke Aset Lainnya -Aset lain-lain.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Rincian Aset Tetap Tanah per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 5.7 dan 5.8**

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 senilai Rp392.790.012.211,53 meningkat senilai Rp40.395.829.491,66 dibandingkan saldo tahun 2017 senilai Rp352.394.182.719,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.35
Peralatan Mesin TA 2018 dan TA 2017

Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017	Lebih (Kurang)
	Rp	Rp	Rp
Alat-alat Besar	27.039.989.936,00	22.353.677.968,00	4.686.311.968,00
Alat-alat Angkutan	91.567.303.566,00	86.812.633.916,00	4.754.669.650,00
Alat-alat Bengkel & Ukur	4.339.569.831,00	3.444.728.115,00	894.841.716,00
Alat-alat Pertanian	4.434.137.628,00	2.586.839.128,00	1.847.298.500,00
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	155.778.797.171,31	142.170.247.347,58	13.608.549.823,73
Alat-Alat Studio dan Komunikasi	15.089.771.683,00	14.458.776.993,00	630.994.690,00
Alat-alat Kedokteran	67.077.470.890,22	52.620.420.565,22	14.457.050.325,00
Alat-alat Laboratorium	25.741.437.868,00	26.368.758.901,07	(627.321.033,07)
Alat-alat Kemanan dan Persenjataan	1.721.533.638,00	1.578.099.786,00	143.433.852,00
Jumlah	392.790.012.211,53	352.394.182.719,87	40.395.829.491,66

Peningkatan nilai senilai Rp40.395.829.491,66 berdasarkan dari penambahan dan pengurangan merupakan akumulasi atas belanja modal, hibah, nilai ekstrakomptabel, penghapusan dan koreksi (penyesuaian nilai) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi penambahan aset peralatan mesin :

Belanja modal	46.462.284.728,00
hibah	1.299.840.000,00
konversi/reklas akun	2.160.078.550,00
koreksi	14.743.332.621,00
mutasi 2018	3.324.304.227,00
Jumlah	67.989.840.126,00

Mutasi pengurangan aset peralatan mesin :

ekstrakomptabel	381.239.344,00
Penghapusan	14.428.005.539,00
hibah	1.009.066.250,00
konversi/reklas akun	2.159.784.750,00
koreksi	2.808.129.765,00
mutasi 2018	3.324.304.227,00
Rusak Berat	3.483.480.759,34



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

	Jumlah	27.594.010.634,34
Nilai akumulasi		40.395.829.491,66

- 1) Realisasi belanja modal Rp46.462.284.728,00 merupakan realisasi belanja sesuai dengan kegiatan masing –masing SKPD di Tahun Anggaran 2018.
- 2) Ekstrakomtabel merupakan nilai perolehan aset tetap peralatan mesin dibawah nilai Rp300.000,00 yang akan dikelompokkan dalam aset ekstrakomtable dan hanya tercatat di KIB namun tidak disajikan dalam Neraca sebesar Rp381.239.344,00
- 3) Terdapat penghapusan senilai Rp14.428.005.539,00 berada pada 5 (lima) SKPD yaitu Sekretariat Daerah sebesar Rp3.789.077.040,00, penghapusan barang peralatan mesin sesuai dengan SK Penghapusan NO 030/0418/2018, Kec Rembang sebesar Rp15.171.850,00 penghapusan atas barang rusak berat, BPPKAD (pengelola) sebesar Rp375.967.641,00, KDH (Sekterariat Daerah) sebesar Rp537.091.700,00 dilakukan penghapusan berdasarkan Penghapusan No 030/0418/2018) dan Dindikpora sebesar Rp9.710.697.308,00
- 4) Hibah merupakan penambahan atau pengurangan atas pencatatan aset tetap yang dikarenakan penerimaan dari pihak lain baik dari perorangan/kelompok masyarakat/komite/pemerintah pusat dan pengurangan aset tetap karena diserahkan ke pihak lain/ satuan pendidikan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.36
Daftar hibah masuk Peralatan Mesin

SKPD	Uraian	Nilai	BAST Hibah
Dindikpora	penambahan aset tetap alat kantor dan rumah tangga dari Komite Sekolah untuk SMPN 1 Bulu	2.700.000,00	BA 003/III/2018
Dindikpora	penambahan aset tetap alat kantor dan rumah tangga dari Komite Sekolah untuk SMPN 1 Bulu	86.225.000,00	BA 003/III/2018
Dindikpora	penambahan aset tetap alat kantor dan rumah tangga dari Komite Sekolah untuk SMPN 1 Sulang (PC 5 unit@Rp4.000.000	20.000.000,00	BA 003/III/2018
Dindikpora	penambahan aset tetap alat kantor dan rumah tangga dari Komite Sekolah untuk SMPN 1 Sulang server 2 unit Rp13.000.000	26.000.000,00	BA 003/III/2018
Dindikpora	alat kantor dan rumah tangga dari komite sekolah untuk SMPN 1 Sumber (Server 3unit @Rp12.750.000; komputer 5 unit @ Rp4.500.000; Switchub 2 unit @Rp2.000.000)	64.750.000,00	BA 003/III/2018
Dindikpora	penambahan aset tetap alat kantor dan rumah tangga dari Komite Sekolah untuk SMPN 5 Rembang (22 unit komputer Rp84.700.000; 1 unit server Rp13.000.000; 1 unit UPS Rp2.700.000))	100.400.000,00	BA 003/III/2018
DKK	hibah dari dr. Intan TA. 2018) berupa Lemari es	3.500.000,00	Surat tgl 5-10-2018
DKK	hibah dari dr. Darmono TA. 2018_ laptop	6.000.000,00	Surat tgl 5-10-2018
RSUD	Hibah dari Bank Jateng Mobil (Ambulance APV GE PS 1.5 L))	188.000.000,00	0235/UM.04.02/029/2018
RSUD	Hibah dari STIKES Surya Global Yogyakarta (Laptop)	5.099.000,00	Surat tgl 11 -01-2019
RSUD	Hibah dari STIKES Tlogorejo Semarang (Laptop)	6.480.000,00	Surat tgl 19-12-2017
RSUD	Hibah dari PT. Samator Gas Industri Kudus (Printer)	1.500.000,00	Surat tgl 1-08-2018
RSUD	Hibah dari Global Dispomedika (Printer)	1.225.000,00	Surat tgl 3-10-2018
RSUD	Hibah dari Global Dispomedika Jakarta (Printer)	6.250.000,00	Surat tgl 31-07-2018
RSUD	Hibah dari Stikes Muhammadiyah Kudus (LCD Projector)	7.000.000,00	Surat tgl 17-11-2018



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

SKPD	Uraian	Nilai	BAST Hibah
RSUD	Hibah dari STIKES Karya Husada (LCD Projector)	4.975.000,00	Surat tgl 19-10-2017
RSUD	Hibah dari Global Dispomedika (PC. Unit)	10.958.000,00	Surat tgl 3-10-2018
RSUD	Hibah dari Bank Jateng (Lemari Es)	1.550.000,00	Surat tgl 16-10-2018
RSUD	Hibah dari SMK Cordova Margoyoso Pati (Kursi Roda)	960.000,00	Surat tgl 6-03-2018
BPBD	Hibah Dari BNPB Motor Trail 2 unit @Rp26.587.000; mobil tangki air 1 unit @ Rp332.420.000 (BA NO 293/BNPB/09/2017))	385.594.000,00	293/BNPB/09/2012
BPBD	Hibah dari BNPB 2 motor trail @Rp28.061.000 (BA /BNPB/09/2016))	56.122.000,00	BA /BNPB/09/2016
Dinsospkpb	hibah kendaraan dari kemensos mobil perlindungan perempuan dan anak (molin)	226.150.000,00	BAST-12 Molin/KKP-PA/11/2016
Dinsospkpb	hibah kendaraan dari kemensos, Honda Vario Torlin	37.842.000,00	BAST-12/Torlin/KKP-PA/09/2017
indagkop	hibah masuk dari Dikop Prop Jateng berupa peralatan dan mesin TA 2018	24.560.000,00	030/460/2016
Dinlutkan	Hibah Sepeda Motor Perolehan Tahun 2011 dari pusat	14.850.000,00	523/580.2/2016
Dinlutkan	pencatatan barang hibah dr pusat berupa laptop	8.697.000,00	B148/DJPRL/PL.430/XII/2017
Dinlutkan	pencatatan barang hibah dr pusat berupa printer	2.453.000,00	B148/DJPRL/PL.430/XII/2017
	Jumlah	1.299.840.000,00	

Tabel 5.3.37

Daftar hibah keluar Peralatan Mesin

SKPD	Uraian	Nilai
DKK	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Mobil Ambulance) yg dihibahkan ke SMK Gunem	80.000.000,00
Dinarpus	Peralatan mesin berupa Televisi yang dihibahkan ke Ponpes Al Quran Narukan Kragan (SK No 030/415/2018)	14.375.000,00
Dinarpus	Hibah ke ponpes AL Qur'an Narukan Kragan berupa PC Unit (SK No 030/415/2018)	5.430.000,00
Sekretariat Daerah	alat angkutan Toyota Kijang K 9503 UD yang dihibahkan ke Dewan Pendidikan SK Bupati No 030/1389/2018	115.000.000,00
Sekretariat Daerah	Hibah alat angkutan berupa Toyota Kijang K9500 MD ke Badan Amal Zakat Nasional SK Bupati No 030/1389/2018	86.800.000,00
Pengelola	Hibah AT oleh Pengelola sesuai SK NO. 030/1531/2018 ke SMK Umar Fatah kendaraan roda empat	109.900.000,00
Pengelola	Hibah AT oleh Pengelola sesuai SK NO. 030/1531/2018	74.581.250,00
BKD	Hibah ke SMK Muhammadiyah Pamotan SK No 030/1531/2018 (kendaraan)	115.000.000,00
Kec Rembang	Hibah kendaraan bermotor BA No 030/698/2018	10.000.000,00
BPPKAD	Hibah Minibus ex trail hibah ke Satuan Korrdinasi Cabang Banser SK No 030/1531/2018	287.980.000,00
Satpol	Hibah berupa mobil kijang BA NO 030/672/2018	110.000.000,00
	Jumlah	1.009.066.250,00

- 5) Konversi/reklasifikasi akun adalah reklas pencatatan antar sub KIB di dalam KIB B(alat berat, alat angkutan, alat bengkel/ukur, alat pertanian, alat rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat lab dan alat keamanan) sebagai proses penyesuaian pencatatan ke rekening aset yang sesuai.

Perbedaan nilai konversi/reklas akun antara penambahan dan pengurangan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(2.160.078.550,00 - 2.159.784.750,00= Rp293.800,00) merupakan konversi/reklas akun antara KIB B dengan KIB yang lain.

Konversi Alat Kantor dan RT (Tambah Daya Listrik) pindah ke Jaringan Listrik Transmisi SMP N 1 Sedan (ke KIB D)	Rp	(10.000.000,00)
konversi pencatatan Bangunan Tugu Lainnya (5 Kerangka Baliho Papan Informasi) ke alat kantor TA. 2018 dari KIB C	Rp	197.804.000,00
konversi pencatatan (Portable Water Pump) dari Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah KIB D ke Alat Besar (Alat-alat Bantu) - Pompa TA. 2018	Rp	1.200.000,00
konversi pencatatan (Portable Water Pump) dari Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah KIB D ke Alat Besar (Alat-alat Bantu) - Pompa TA. 2018	Rp	700.000,00
konversi pencatatan Alat Kantor (Rumah Genset) ke Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen TA. 2018 /KIB C	Rp	(30.686.000,00)
Konversi aset tetap dari jaringan (KIB D) ke alat kantor dan rumah tangga (laptop)	Rp	7.500.000,00
konversi aset tetap dari alat kantor rumah tangga ke jaringan (jaringan wifi internet) 2018 (KIB D)	Rp	(9.000.000,00)
Reklas Aset Tetap Instalasi (KIB D) ke Alat Besar (Berupa Pompa Air)	Rp	1.595.800,00
Reklas Aset Tetap Renovasi (KIB E) ke Alat Kantor &RT	Rp	40.050.000,00
konversi dari aset tetap alat studio komunikasi ke jaringan telepon (KIB D)	Rp	(14.960.000,00)
Konversi Aset Dari Alat Rumah Tangga Lainnya ke Aset Bangunan Air Bersih-tandon (KIB D)	Rp	(183.910.000,00)
Jumlah	Rp	293.800,00

6) Mutasi adalah perpindahan/ penyesuaian pencatatan aset tetap antar SKPD sebesar Rp3.324.304.227,00

7) Koreksi pada peralatan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Koreksi Penambahan :

- a. Penyesuaian pencatatan pemakaian Tensi meter Air Raksa TA. 2018 Rp12.411.000,00 direalisasikan dari barang jasa
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin-Dus bin yellow, Excel Container, Princia Kabinet, Almari Kaca, Meja Rapat, Komputer, Scanners, AC dan alat dosimeter) Rp778.407.630,00 dicatat pengakuan asetnya karena realisasi belanja berasal dari utang
- c. Reklas dari Barang dan Jasa BLUD ke Peralatan dan Mesin BLUD (Pemeliharaan Incenerator-Alat Laboratorium Rp424.150.000,00
- d. REklas dari Pemeliharaan Gedung Obsgyn dan Orthopedi (AC 1 PK sebesar Rp7.000.000, AC 0,5PK sebesar Rp. 3.200.000, AC 2 PK sebesar Rp. 5.300.000
- e. Reklas dari barang jasa pembuatan almari Rp8.501.500,00 pada RSUD
- f. Pencatatan aset tetap berupa sofa yang belum tercatat di 2017 sebesar Rp63.488.750,00 di RSUD



- g. Reklas dari belanja barang jasa bahan pembersih ke belanja modal pengadaan kipas angin 2buah @Rp.495.000) pada Kominfo
- h. Penilaian aset Tanah kantor Indagkop utara dan kendaraan station wagon hasil inventarisasi AT sesuaiSK Bupati Penetapan status no. 032/1980/2018) Rp159.984.000,00
- i. Penyesuaian Alat angkutan Innova K9503CD Kurang Catat (Penelusuran aset) BM 2015 BPPKAD yang dimutasi ke Setda BA 028/0252/2016 (Setda belum catat) Rp330.755.000,00
- j. Konversi Penambahan Aset tetap 2018- 2 Kipas angin dari Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih Program Kegiatan 01.04 Rp1.200.000,00
- k. Penyesuaian pencatatan dari barang jasa ke Aset Tetap TA 2018 Rp14.225.000,00
- l. Pencatatan dari hibah blockgrand Rp763.679.950,00
- m. Pencatatan atas aset hasil penelusuran di Dindikporan dan DKK yang belum tercatat Rp12.170.039.791,00

Koreksi pengurangan :

- a. Penyesuaian pencatatan peralatan mesin dilakukan koreksi catat direklas ke persediaan berupa mouse, taplak, tikar, korden sebesar Rp279.725.845,00
- b. Penyesuaian pencatatan aset tetap, realisasi belanja modalnya merupakan pelunasan pembayaran hutang di Tahun 2018 atas pengadaan (Aset Pengadaan sitem monitoring mutu (Sistem Informasi Layanan RS)) yang asetnya telah dicatat dan diakui di tahun 2017 Rp198.331.650,00
- c. Reklas ke kelompok aset tidak berwujud software Rp135.900.000,00
- d. Koreksi Aset karena double catat dengan provinsi dengan Surat keputusan pengelola barang no.030/0350/2018 tentang penghapusan barang TA 2018 Rp103.000.000,00
- e. Koreksi catat karena pemeliharaan-kendaraan roda 3 Rp5.000.000,00
- f. Penyesuaian Koreksi aset tetap alat kantor rumah tangga berupa mesin jahit karena telah di Hibahkan ke masyarakat yang masih tercatat di neraca SK Bupati No 500/1008/2012 19 Desember 2012) Rp29.920.000,00
- g. Penyesuaian koreksi catat alat angkutan Vega K 9990 GD yang telah dihapus terkait TP/TGR yang sudah disetor ke kasda 28 September 2011 Rp9.023.000,00
- h. Penyesuaian koreksi catat atas alat angkutan SUPRA K 9641 GD yang sudah dihapuskan tahun 2013 (SK 030/0288/2013) Rp9.300.000,00
- i. Penyesuaian pengurangan penambahan aset tetap merupakan pemeliharaan gedung- pemasangan wall paper dinding , pasang kaca film dan tulisan informasi sebesar Rp8.575.000
- j. Penyesuaian Koreksi Pencatatan Peralatan dan mesin (Alat Pengolah



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Garam) Rp44.900.000,00 pada Dinlutkan karena telah dihibahkan

- 8) Rusak berat sebesar Rp3.483.480.759,34 merupakan barang – barang yang dikategorikan rusak berat dan direklas pencatatannya ke asset lainnya untuk selanjutnya akan dilakukan tahapan proses penghapusan pada:
- Dindikpora sebesar Rp2.754.797.879,34 merupakan hasil penelusuran inspektorat sebesar Rp2.458.250.380,34 dan sebesar Rp296.547.499,00 (merupakan nilai intrakomtabel) yang sebelumnya belum tercatat tercatat (tercatat pada KIB saat proses audit kemudian direklas karena masuk kategori rusak berat),
 - Hasil penelusuran Inspektorat pada Dinas Kesehatan atas asset yang sebelumnya belum pernah tercatat (tercatat pada KIB saat proses audit kemudian direklas ke asset lainnya karena masuk kategori rusak berat) sebesar Rp701.659.880,00
 - Kecamatan Pamotan sebesar Rp27.023.000,00 berupa 3 motor : honda K9865FD Rp8.000.000,00 ; yamaha K9854FD Rp9.023.000,00 ; honda K9682FD Rp10.000.000,00- (kondisi rusak berat semua)

Rincian Penambahan pengurangan Peralatan Mesin per SKPD dapat dilihat di lampiran 5.9

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 senilai Rp781.856.404.669,61meningkat senilai Rp102.735.441.702,00 dibandingkan saldo TA 2017 senilai Rp679.120.962.967,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.38
Gedung dan Bangunan TA 2018 dan TA 2017

No.	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp	Lebih (Kurang)
1.	Bangunan Gedung	765.674.967.211,61	667.438.595.882,61	97.006.142.429,00
2.	Bangunan Monumen	16.181.437.458,00	11.682.367.085,00	5.729.299.273,00
	Jumlah	781.856.404.669,61	679.120.962.967,61	102.735.441.702,00

Peningkatan nilai senilai Rp102.735.441.702,00 berdasarkan dari penambahan dan pengurangan merupakan akumulasi atas belanja modal, hibah, nilai ekstrakomtabel, penghapusan dan koreksi (penyesuaian nilai) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.3.39
Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2018

No	Uraian	Penambahan	Pengurangan	Lebih/ Kurang
1	Belanja modal	94.860.823.159,00	0,00	94.860.823.159,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	Penambahan	Pengurangan	Lebih/ Kurang
2	ekstra	0,00	4.544.887.582,00	(4.544.887.582,00)
3	hibah	5.219.870.000,00	91.445.000,00	5.128.425.000,00
4	Konversi/ reklas akun	2.668.532.307,00	396.140.500,00	2.272.391.807,00
5	koreksi	59.366.716.202,00	25.353.989.751,00	34.012.726.451,00
6	mutasi	14.616.982.285,00	14.616.982.285,00	0,00
7	hapus	0,00	28.994.037.133,00	(28.994.037.133,00)
	Jumlah	176.732.923.953,00	73.997.482.251,00	102.735.441.702,00

- 1) Belanja modal sebesar Rp94.860.823.159,00 sesuai dengan realisasi masing – masing SKPD
- 2) Terdapat ekstrakomtabel sebesar Rp4.544.887.582,00 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan akuntansi Kabupaten Rembang, batasan minimum gedung dan bangunan dengan nilai di bawah Rp10.000.000,00 hanya dicatat di KIB dan tidak disajikan dalam neraca masuk dalam kelompok ekstrakomtabel.
- 3) Terdapat penerimaan hibah sebesar Rp5.219.870.000,00 dan pemberian hibah sebesar Rp91.445.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hibah sebesar Rp70.000.000,00 yang merupakan hibah bangunan dari dr. Ali Syofii TA. 2018 berupa bangunan mushola Berita Acara tanggal 5 Nopember 2018.
 - b. Hibah blockgrand sebesar Rp5.149.870.000,00 sesuai dengan BAST sebagai berikut:

Tabel 5.3.40
Berita Acara Hibah Blockgrand TA 2018

No	Nama Sekolah	Nilai	Nomor BA
1	SD Negeri 1 Leteh	151.064.000,00	421.2/455/2018
2	SD Negeri 1 Pasar Banggi	158.004.000,00	425.1/077/2018
3	SD Negeri 1 Soditan	285.186.000,00	421.2/165/2018
4	SD Negeri 2 Karangharjo	158.004.000,00	425.1/058/2018
5	SD Negeri Binangun	111.410.000,00	421.2/160/2018
6	SD Negeri Bogorame	158.004.000,00	642/09/2018
7	SD Negeri Dowan	133.664.000,00	429/2018
8	SD Negeri Kendalagung	158.003.000,00	425/094/2018
9	SD Negeri Tuyuhan	223.568.000,00	428/1/2018
10	UPT SMP Negeri 1 Kaliori	200.000.000,00	420/932.a/2018
11	UPT SMP Negeri 1 Lasem	250.000.000,00	425.11/211.1/2018
12	UPT SMP Negeri 1 Pamotan	149.651.000,00	425/439/2018
13	UPT SMP Negeri 1 Pancur	200.000.000,00	425.1/162/2018
14	UPT SMP Negeri 1 Rembang	350.000.000,00	978/600/2018
15	UPT SMP Negeri 1 Sale	149.651.000,00	425.1/760/2018
16	UPT SMP Negeri 1 Sarang	350.000.000,00	425/426/2018



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Nama Sekolah	Nilai	Nomor BA
17	UPT SMP Negeri 1 Sedan	149.651.000,00	425/392/2018
18	UPT SMP Negeri 1 Sulang	149.651.000,00	425/494/2018
19	UPT SMP Negeri 2 Gunem	149.651.000,00	420/0311/2018
20	UPT SMP Negeri 2 Kragan	149.651.000,00	425/505/2018
21	UPT SMP Negeri 2 Lasem	149.651.000,00	900/701.a/2018
22	UPT SMP Negeri 2 Pamotan	149.651.000,00	425/427/2018
23	UPT SMP Negeri 2 Pamotan	150.000.000,00	425/426/2018
24	UPT SMP Negeri 2 Sedan	149.651.000,00	425/173.a/2018
25	UPT SMP Negeri 2 Sulang	149.651.000,00	425/148/2018
26	UPT SMP Negeri 3 Rembang	149.651.000,00	425.3/618.b/2018
27	UPT SMP Negeri 4 Rembang	150.000.000,00	900/341/2018
28	UPT SMP Negeri 4 Sale	167.151.000,00	420/198/2018
29	UPT SMP Negeri 5 Rembang	149.651.000,00	425/561.c/2018
	Jumlah	5.149.870.000,00	

- c. Pemberian hibah gedung pertokoan sebesar Rp91.445.000,00, dihibahkan sebagai bangunan pasar, dengan Berita Acara hibah Nomor 030/3084/2018 untuk Pasar Desa Sale Kecamatan Sale sebesar Rp41.325.000,00 dan Berita Acara Nomor 030/3085/2018 untuk Pasar Desa Mrayun Kecamatan Sale sebesar Rp50.120.000,00
- 4) Konversi/reklas akun pada gedung dan bangunan merupakan penyesuaian pencatatan KIB C dengan KIB lain yang dimaksudkan untuk penyesuaian rekening asset sesuai dengan kelompoknya.

Tabel 5.3.41
Konversi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	konversi pencatatan Bangunan Tugu Lainnya (5 Kerangka Baliho Papan Informasi) ke alat kantor (KIB C ke KIB B)	(197.804.000,00)	DKK
2	konversi pencatatan Alat Kantor (Rumah Genset) ke Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen KIB B ke KIB C	30.686.000,00	DKK
3	Konversi Tanaman Hias ke Bangunan tempat pertemuan lain lain (KIB E ke KIB C)	182.790.000,00	DPKP
4	Konversi instalasi pusat pengatur listrik lain-lain ke Bangunan Monumen (dari KIB D ke C) atas aset mutasi dari DPUTARU	2.286.604.307,00	Dinhub
5	(Konversi aset tetap dari bangunan ke jalan berupa pagar pengaman jalan)	(198.336.500,00)	Dinhub
6	Reklas Aset Tetap Renovasi ke Bangunan Gedung	159.550.000,00	Setwan
7	konversi aset tetap dari jalan khusus ke bangunan gedung kantor permanen (kapitalisasi) TA 2018 (KIB D ke KIB C)	8.902.000,00	Kaliori



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	Nilai	Keterangan
	Jumlah	2.272.391.807,00	

- 5) Koreksi penambahan dan pengurangan pada bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Koreksi Penambahan :

a. RSUD dr. Soetrasno

- Kapitalisasi Aset Bangunan dan Gedung (Gedung Kamar Mandi Lt.2)	72.421.000,00
- Kapitalisasi Aset Bangunan dan Gedung (Gedung Ruang Rapat)	177.800.000,00
- Kapitalisasi Aset Bangunan dan Gedung (Gedung Utama Radiologi)	99.520.000,00
- Kapitalisasi Aset Bangunan dan Gedung (Gedung Utama Lt.1)	41.100.000,00
- Kapitalisasi Aset Bangunan dan Gedung (Gedung Bougenvile)	128.830.000,00
- Kapitalisasi Gedung dan Bangunan (Rehabilitasi Poliklinik Lt.I (BLUD))	377.005.300,00
- Kapitalisasi Gedung dan Bangunan (Pengadaan Masjid Lanjutan (BLUD))	372.360.000,00
- Reclas KDP ke Gedung dan Bangunan (konsultan perencanaan rehab poli lt.1 dan honorinya)	18.305.000,00
- Reclas dari Aset Lainnya (RB) ke Aset Tetap Bangunan dan Gedung (Gedung Bougenvile))	70.000.000,00
- Kapitalisasi Aset Bangunan dan Gedung BLUD (dari Pemeliharaan Gedung Obsgyn dan Orthopedi)	130.026.000,00
- Kapitalisasi Aset Bangunan dan Gedung BLUD (Bangunan JOGLO 2018)) dari barjas	64.657.000,00

b. Dinindagkop

- Penyesuaian AT KDP menjadi AT Gedung dan bangunan- Pasar Pamotan	111.169.300,00
- Penyesuaian penambahan AT gedung bangunan Pasar Sedan - sesuai SK no 132/1980/2018)	3.419.562.000,00

c. Dindikpora

- Penyesuaian Aset Tetap yang belum tercatat hasil Inventarisasi KIB C pada Dindikpora atas nilai intrakomptabel	54.283.960.602,00
--	-------------------

Jumlah **59.366.716.202,00**

Koreksi Pengurangan :

a. Dindikpora



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- koreksi pencatatan aset tetap yang dimiliki sekolah swasta yang masih tercatat dineraca Dindikpora (Berdasarkan SK Penghapusan Pengelola Barang Milik Daerah No 030/0425/2018) pada Dindikpora	7.446.842.425,00
- koreksi aset tetap karena merupakan penataan lingkungan SMPN 1 Sulang	16.200.000,00
- Koreksi aset tetap karena merupakan pemeliharaan SDN Sumurtawang Kragan	5.800.000,00
- koreksi aset tetap karena merupakan pemeliharaan (pemeliharaan SDN 4 Pamotan_Pamotan	5.000.000,00
b. RSUD dr. Soetrasno	
- Penyesuaian pencatatan aset tetap, realisasi belanja modalnya merupakan pelunasan pembayaran hutang di Tahun 2018 atas pengadaan Aset Pembangunan Masjid yang asetnya telah dicatat dan diakui di tahun 2017 di RSUD	439.308.000,00
- koreksi menjadi KDP atas bangunan Stroke RSUD	11.495.775.120,00
c. Dinas Kesehatan, penyesuaian reklas aset tetap ke KDP pada bangunan gedung 2018 (puskesmas sumber) karena belum selesai pengerjaannya	5.180.919.000,00
d. reklas dari barang tugu peringatan lainnya ke Baliho pada Dinsos PPKB	17.270.000,00
e. koreksi dari KIB C krn berupa pemasangan zona aman sekolah	68.891.856,00
f. Koreksi pencatatan gedung bangunan ke aset tidak berwujud -kajian DED Ps Rembang dan PKL Gambiran TA 2018	677.983.350,00
Jumlah	25.353.989.751,00

Koreksi nilai aset bangunan gedung di atas mencakup koreksi di RSUD karena adanya reklasifikasi aset dari kelompok aset lainnya – aset lain – rusak berat gedung bougenville senilai Rp70.000.000,00 dapat dijelaskan bahwa semula gedung bougenville diusulkan untuk dihapuskan karena akan dilaksanakan pembangunan yang bersumber dari dana DAK tahun 2017 diharapkan dapat berfungsi sebagai Instalasi Gawat Darurat (IGD) di tahun 2018. Namun mengalami gagal lelang.

Memperhatikan kebutuhan atas pelayanan pasien yang sangat mendesak maka gedung bougenvil di manfaatkan dan dialih fungsi penggunaannya menjadi gedung transit pasien IGD dan tahun 2018 dianggarkan biaya pemeliharaan pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soetrasno sebesar Rp. 128.830.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya agar gedung transit pasien IGD



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

dapat segera di manfaatkan diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 445/345a/2018 tanggal 3 April 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor: 445/345b/2018. Selanjutnya pada tanggal 19 mei 2018 telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung (ex-Bougenvil) sekaligus di buatkan berita acara serah terima pekerjaan. Pada tanggal 19 mei 2018 Direktur Rumah Sakit memerintahkan kepada Kepala Instaliasi IGD RSUD untuk segera memanfaatkan Gedung exs-bougenvil.

- 6) Mutasi gedung dan bangunan sebesar Rp14.616.982.285,00 merupakan penyesuaian pencatatan antar SKPD.
- 7) Penghapusan gedung senilai Rp28.994.037.133,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.3.42
Penghapusan gedung

SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	No SK
Dindikpora	Penghapusan Gedung	22.108.188.423,00	SK 030/0164/2019
DKK	Penghapusan gedung kerja dan bangunan kesehatan	5.909.343.210,00	SK 030/0420/2018
indagkop	penghapusan gedung bangunan ps jolotundo. ps Lasem dan ps. Sulang krn akan dibangun kembali)	221.614.500,00	SK 030/0441/2018
Setda	Reklas Aset Gedung Bangunan ke aset lain-lain karena dihapuskan SK No 030/0403/2018	23.540.000,00	SK 030/0403/2018
Pengelola	penghapusan gedung bangunan dr Dintanpan	32.500.000,00	SK 030/1679/2018
RSUD	Penghapusan gedung, ICU, gedung kesehatan dan rumah dinas	698.851.000,00	SK 030/0314/2018
	Jumlah	28.994.037.133,00	

Rincian Penambahan pengurangan gedung dan bangunan per SKPD dapat dilihat pada lampiran 5.10

d. Jalan, Jembatan dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 senilai Rp1.094.760.004.096,00meningkat senilai Rp36.539.864.026,00dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 senilai Rp1.058.220.140.070,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.43
Jalan, Jembatan dan Jaringan TA 2018 dan TA 2017

No	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31-Des-18	31-Des-17	Lebih (Kurang)
		Rp	Rp	Rp
1	Jalan dan Jembatan	849.735.110.365,00	756.085.718.435,00	93.649.391.930,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

2	Bangunan Air (irigasi)	203.849.895.342,00	197.328.593.124,00	6.521.302.218,00
3	Instalasi	16.536.354.469,00	22.237.397.776,00	(5.701.043.307,00)
4	Jaringan	24.638.643.920,00	82.568.430.735,00	(57.929.786.815,00)
	Jumlah	1.094.760.004.096,00	1.058.220.140.070,00	36.539.864.026,00

Peningkatan senilai Rp36.539.864.026,00 berdasarkan penambahan dan pengurangan dikarenakan adanya Belanja Modal, Hibah, penghapusan dan koreksi atau penyesuaian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.3.44
Mutasi Jalan, Jembatan dan Jaringan

No	Uraian	Penerimaan	Pengurangan	Lebih (kurang)
1	Belanja modal	152.529.881.164,00	0,00	152.529.881.164,00
2	hapus	0,00	12.571.440.375,00	(12.571.440.375,00)
3	hibah	2.056.029.000,00	98.926.964.420,00	(96.870.935.420,00)
4	Konversi/reklas akun	106.981.829.110,00	108.872.124.717,00	(1.890.295.607,00)
5	koreksi	10.274.677.718,00	14.924.524.454,00	(4.649.846.736,00)
7	mutasi	30.226.882.582,00	30.226.882.582,00	0,00
8	Rusak Berat	0,00	7.499.000,00	(7.499.000,00)
	Jumlah	302.069.299.574,00	265.529.435.548,00	36.539.864.026,00

- 1) Nilai asset Jalan, Jembatan dan Jaringan per 31 Desember 2018 dipengaruhi atas realisasi belanja Modal sebesar Rp152.529.881.164,00. Terdapat penghapusan sebesar Rp12.571.440.375,00 yang merupakan koreksi pencatatan atas kegiatan normalisasi sungai sebesar Rp5.842.190.375,00 yang sebelumnya tercatat sebagai asset tetap berdasarkan SK Sekretariat Daerah No.030/0422/2018 dan penghapusan jembatan Rp6.729.250.000,00 berdasarkan SK No.030/0421/2018 karena adanya pelimpahan kewenangan di provinsi.
- 2) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat nilai sebesar Rp98.926.964.420,00 yang dihibahkan ke desa berdasarkan pada SK 030/0427/2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.45
Hibah Jalan, Jembatan dan Jaringan

No	Uraian	Nilai
1	Hibah jalan	60.732.320.470,00
2	Hibah jembatan	1.088.696.450,00
3	Hibah bangunan irigasi	21.692.511.600,00
4	hibah instalasi air bersih	6.453.009.500,00
5	hibah jaringan	8.960.426.400,00
	Jumlah	98.926.964.420,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Selain adanya hibah ke desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memperoleh Hibah Instalasi dari Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp2.056.029.000,00, berdasarkan Berita Acara Serat Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jendral Cipta Karya dengan Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor : 377.1/BA/DC/2017, 600/1002/2017

- 3) Konversi/ reklas akun pada Gedung dan Bangunan adalah penyesuaian pencatatan karena adanya perbedaan catat antara KIB D dengan rekening/akun belanja modalnya.

Tabel 5.3.46
Konvensi/reklas akun

No	SKPD	Penambahan	Pengurangan	Lebih Kurang
1	Satpol PP	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
2	Dindikpora	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3	Dinhub	198.336.500,00	2.286.604.307,00	(2.088.267.807,00)
4	Dinlutkan	183.910.000,00	0,00	183.910.000,00
5	Dinpermades	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
6	DKK	12.000.000,00	13.900.000,00	(1.900.000,00)
7	DLH	261.575.000,00	261.575.000,00	0,00
8	DPKP	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)
9	DPU Taru	106.279.547.610,00	106.279.547.610,00	0,00
10	Inspektorat	14.960.000,00	0,00	14.960.000,00
11	Kaliori	0,00	8.902.000,00	(8.902.000,00)
12	Setwan	0,00	1.595.800,00	(1.595.800,00)
	Jumlah	106.981.829.110,00	108.872.124.717,00	(1.890.295.607,00)

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

- Nilai 0,00 pada kolom lebih kurang artinya reklasifikasi akun hanya berada di dalam KIB D hanya berbeda sub akun. Misal pada Satpol PP terdapat reklas akun dari sub akun instalasi ke jaringan listrik sebesar Rp12.500.000,00, konversi dari instalasi ke bangunan air di DLH sebesar Rp261.575.000,00 berupa bangunan saluran pembawa air kotor, dan DPU Taru merupakan reklas dari bangunan air ke jalan (berupa talud) Rp49.579.344.675,00 dan jaringan ke bangunan air (berupa bangunan irigasi) Rp56.476.174.835,00
- Nilai Rp10.000.000,00 pada Dindikpora adalah konversi Alat Kantor dan RT (Tambah Daya Listrik) direklas ke Jaringan Listrik Transmisi SMP N 1 Sedan
- Dinas Perhubungan konversi instalasi pusat pengatur listrik lain-lain ke Bangunan Monumen (dari KIB D ke C) atas aset mutasi dari DPUTARU Rp 2.286.604.307,00 dan Konversi aset tetap dari bangunan ke jalan berupa pagar pengaman jalan Rp198.336.500,00.
- Konversi Aset Dari Alat Rumah Tangga Lainnya ke Aset Bangunan Air Bersih-tandon senilai Rp183.910.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- e) konversi aset tetap dari alat kantor rumah tangga ke jaringan (jaringan wifi internet) Rp9.000.000,00 di Dinpermades
 - f) Pada DPKP sebesar Rp7.500.000,00 Konversi aset tetap dari jaringan ke alat kantor dan rumah tangga (laptop)
 - g) Nilai sebesar Rp14.960.000,00 konversi dari aset tetap alat studio komunikasi ke jaringan telepon
 - h) Konversi aset tetap dari jalan khusus ke bangunan gedung kantor permanen pada Kec Kaliori Rp8.902.000,00, dan
 - i) Reklas Aset Tetap Instalasi ke Alat Besar (Berupa Pompa Air) Rp1.595.800,00
- 4) Terdapat koreksi atau penyesuaian pada pencatatan Jalan Jembatan dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut:
Koreksi penambahan :
- penyesuaian Aset Tetap yang belum tercatat hasil inventarisasi KIB D pada Dindikpora, masih termasuk Rp2.999.000,00 yang diidentifikasi sebagai barang rusak berat, selanjutnya akan direklas ke asset lainnya. (Rp5.814.109.770,00 + Rp2.999.000,00) 5.817.108.770,00
 - koreksi kurang catat aset tetap Kib D hasil penelusuran pada Dinas kesehatan, masih termasuk Rp4.500.000,00 yang diidentifikasi sebagai barang rusak berat, selanjutnya akan direklas ke asset lainnya. (265.604.000,00 + Rp4.500.000,00) 270.104.000,00
 - koreksi pencatatan bangunan jalan di DPKP yang terdiri dari 48 ruas jalan lingkungan sesuai SK No.030/1331/2019 yang belum tercatat 4.187.464.948,00
- Jumlah 10.274.677.718,00
- Koreksi Pengurangan
- Koreksi pencatatan (bium) yang pekerjaan fisiknya tdk dilaksanakan di DPKP 7.360.650,00
 - Koreksi pencatatan aset atas biium pekerjaan penataan lingkungan obyek wisata pantai binangun dan pembuatan jalur pejalan kaki di Dinbudpar yang pelaksanaan kegiatan fisiknya tidak jadi dilaksanakan. 7.600.000,00
 - Penyesuaian pencatatan Biaya umum (bium) ke KDP karena pekerjaan fisik belum selesai pada Dinlutkan pembangunan dermaga PPI Sarang dan PPI Pandangan 10.575.119.954,00
 - Koreksi pencatatan di Dinlutkan atas aset yg sebelumnya telah diserahkan pada masyarakat namun masih tercatat di Neraca 4.334.443.850,00
- Jumlah 14.924.524.454,00
- 5) Mutasi sebesar Rp30.226.882.582,00 adalah mutasi aset tetap antar SKPD
- 6) Asset tetap gedung dan bangunan yang dikategorikan barang rusak berat sebesar Rp7.499.000,00 terdapat pada Dindikpora sebesar Rp2.999.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp4.500.000,00 yang kedua asset RB tersebut sebelumnya hasil penelusuran yang belum tercatat (saat proses audit masuk dalam KIB)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

karena dikategorikan asset RB kemudian direklas ke asset lainnya dan selanjutnya akan dilakukan proses penghapusan

Rincian penambahan dan pengurangan asset Jalan, jembatan dan jaringan per 31 Desember 2018 dan rincingan data jembatan yang dihapuskan karena ada pelimpahan ke Provinsi terdapat pada lampiran 5.11, 5.12, dan 5.13.

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 senilai Rp64.097.240.865,08 menurun senilai Rp3.834.403.819,92 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 senilai Rp67.931.644.685,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.47
Aset Tetap Lainnya TA 2018 dan TA 2017

No.	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2018 Rp	31 Desember 2017 Rp	Lebih (Kurang)
1.	Buku dan Perpustakaan	44.033.150.260,08	43.475.694.767,00	557.455.493,08
2.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	18.999.424.439,00	23.428.616.418,00	(4.429.191.979,00)
3.	Hewan/ Ternak dan Tumbuhan	143.942.666,00	106.610.000,00	37.332.666,00
4.	Aset Tetap Renovasi	920.723.500,00	920.723.500,00	0,00
	Jumlah	64.097.240.865,08	67.931.644.685,00	(3.834.403.819,92)

Penurunan nilai senilai Rp3.834.403.819,92 berdasarkan dari penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.48
Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Penerimaan	Pengurangan	Lebih (kurang)
1	Belanja modal	8.189.412.734,00	0,00	8.189.412.734,00
2	hapus	0,00	11.665.448.114,29	(11.665.448.114,29)
3	konversi akun	0,00	382.390.000,00	(382.390.000,00)
4	koreksi	7.538.556.702,00	3.249.275.950,00	4.289.280.752,00
5	Rusak Berat	0,00	4.265.259.191,63	(4.265.259.191,63)
	Jumlah	15.727.969.436,00	19.562.373.255,92	(3.834.403.819,92)

- 1) Nilai Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2018 tersebut di atas selain adanya realisasi belanja modal sebesar Rp8.189.412.734,00 dipengaruhi penghapusan asset tetap sebesar Rp11.665.448.114,29 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah No 030/426/2018 Dinas Arsip dan Perpustakaan terdapat penghapusan buku



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- perpustakaan dan barang bercorak kebudayaan berdasar senilai Rp233.469.229,62
- b. Berdasarkan SK Penghapusan No 030/0418/2018 Sekretariat Daerah (sub akun Kepala Daerah) terdapat penghapusan lukisan di ruang Bupati senilai Rp260.000,00 dan
 - c. Berdasarkan SK Penghapusan no:030/ 0227/2019 di Dindikpora senilai Rp11.394.468.884,67 dan telah dilakukan pemusnahan, dan
 - d. Penghapusan di tingkat pengelola Rp37.250.000,00.
- 2) Koneversi/reklas akun sebesar Rp382.390.000,00 adalah reklas akan dari KIB E ke KIB C di DPKP sebesar Rp182.790.000,00 dan di Sekretariat Dewan reklas KIB E ke KIB B sebesar Rp40.050.000,00 (meubeler) dan KIB E ke KIB C sebesar Rp159.550.000,00 (renovasi ruangan) yang sebelumnya secara langsung tercatat ke KIB E karena terealisasi dari Belanja Modal Aset Tetap Renovasi.
- 3) Koreksi pencatatan di KIB E dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Koreksi penambahan :
- a. Reklas dari Belanja Barjas Surat kabar ke Aset tetap lainnya krn berupa pembelian buku bacaan sejumlah 19 buku (Dinkominfo) sebesar Rp1.399.700,00
 - b. Pencatan indukan ikan (Dinlutkan) sebesar Rp42.625.000 yang semula tercatat di persediaan sebagai benih/bibit ikan.
 - c. Pencatatan asset hasil penelusuran di Dindikpora sebesar Rp7.431.924.012,00
 - d. Pencatatan asset hasil penelusuran di Dinas Kesehatan sebesar Rp62.607.990,00
- Koreksi pengurangan :
- a. Koreksi pencatatan di Dindikpora karena merupakan milik swasta Berdasar SK Penghapusan Pengelola Barang Milik Daerah No 030/0425/2018 sebesar Rp2.673.251.650,00
 - b. Koreksi pencatatan di Dindikpora reklas ke persediaan sebesar Rp5.674.000,00
 - c. Reklas ke Konstruksi dalam pekerjaan (DPKP) sebesar Rp570.350.300,00
- 4) Reklasifikasi ke asset lain – rusak berat Rp4.265.259.191,63 merupakan asset akun buku dan perpustakaan Rp1.910.532.242,63 dan barang bercorak kebudayaan/kesenian Rp2.130.749.217,00 di Dinas Pendidikan dan Olah Raga serta terhadap pengelompokan asset rusak berat hasil penelusuran yang belum tercatat sebesar Rp223.977.732,00 terdiri atas Rp173.371.232,00 kategori buku dan Rp50.606.500,00 kategori barang bercorak kesenian.

Rincian penambahan dan pengurangan asset tetap lainnya per 31 Desember 2018 terdapat pada lampiran 5.14

f. Kontruksi Dalam Pekerjaan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2018 senilai Rp32.959.533.009,00 mengalami perubahan sebesar Rp32.345.275.709,00 dari nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan di tahun 2017 sebesar Rp614.277.300,00.

Perubahan nilai Konstruksi dalam Pekerjaan dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo awal		614.277.300,00
Penambahan :		
DKK	Reklas KDP atas pembangunan bangunan kesehatan Puskesmas Sumber	5.180.919.000,00
RSUD		
RSUD	Bangunan dan Gedung-Pengadaan Fasade Gedung Utama RI Tahap I (BLUD)	755.772.635,00
RSUD	Aset Bangunan dan Gedung-Pengadaan Lift Gedung Utama (BLUD)	803.048.000,00
RSUD	KDP Gedung dan Bangunan (Pekerjaan Gedung Jiwa (APBD-DAU)	3.118.155.000,00
RSUD	Reklas KDP gedung stroke	11.495.775.120,00
DPKP	Reklas KDP taman batas kota	570.350.300,00
Dinlutkan	Pembangunan PPI dermaga PPI Sarang dan PPI Pandangan	10.575.119.954,00
	Jumlah	32.499.140.009,00
Pengurangan :		
DKK	koreksi pencatatan KDP karena tidak dilaksanakan di TA 2018	14.339.000,00
RSUD	Reclas KDP ke Gedung dan Bangunan poli lt 1 karena telah selesai	18.305.000,00
Indagkop	KDP menjadi AT Gedung dan bangunan- Pasar Pamotan	111.169.300,00
Setda	koreksi aset KDP yang tidak dilaksanakan di TA 2018 karena rasionalisasi (Nota Dinas Kabag Umum No 466/055/2018)	10.051.000,00
	Jumlah	153.864.300,00
	Total KDP	32.959.533.009,00

Penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pekerjaan per SKPD terdapat pada lampiran 5.15

g. Akumulasi Penyusutan

Dihitung dengan metode garis lurus, berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Rembang dihitung dengan pola bulanan

Saldo Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 senilai Rp949.487.632,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal	1.059.605.803.112,82
Penambahan	
beban penyusutan & amortisasi	178.997.552.528,84
Koreksi Kapitalisasi Gedung	2.329.267.929,00
Koreksi Kapitalisasi Jalan Jembatan Jaringan	9.909.426.835,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Barang Berlebih DIKNAS	6.658.683.658,00	197.894.930.950,84	(+)
Pengurangan			
Beban Amortisasi	637.357.488,84		
Koreksi mutasi antar SKPD	6.618.838.473,00		
Koreksi karena penghapusan	30.643.609.019,00		
Pemberian hibah	6.206.007.438,00		
Koreksi karena telah dihibahkn	881.612.808,00		
Koreksi karena sekolah swasta yang dihapus catat	2.870.549.035,00		
Reklas ke aset lain	2.307.906.389,00		
Kapitalisasi (saat unaudit)	203.317.429.022,00		
Koreksi pembulatan	1.065.654,00		
Koreksi karena reklas akun	45.423.152.446,82		
Koreksi karena kebijakan terkait perhitungan masa manfaat	8.100.281.279,00		
RB DKK +RB DIKNAS	1.005.706.379,00	308.013.515.431,66	(-)
Akumulasi Penyusutan		949.487.218.632,00	

Rincian akumulasi penyusutan per SKPD dapat dilihat dalam Lampiran 5.16

4. DANA CADANGAN

Tidak terdapat saldo dana cadangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

5. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 senilai Rp88.965.058.971,53naik senilai Rp57.920.646.671,6 dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2017 senilai Rp31.044.412.299,90 Saldo Aset Lainnya berasal dari Tagihan Jangka Panjang yang merupakan reklasifikasi dari akun piutang TP/TGR, Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.49
Aset Lainnya TA 2018 dan TA 2017

No	Aset Lainnya	31-Des-18	31-Des-17
		Rp	Rp
1	Tagihan Jangka Panjang	3.272.269.623,00	2.995.405.000,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	2.978.202.500,00
3	Aset Tak Berwujud	1.247.867.554,56	1.093.681.693,40
4	Aset Lain-lain	84.444.921.793,97	23.977.123.106,50
	Jumlah	88.965.058.971,53	31.044.412.299,90

a. Tagihan Jangka Panjang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Saldo Tagihan Jangka Panjang merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan saldo per 31 Desember 2018 senilai Rp3.272.269.623,00 mencakup tanggungan TGR dan TKI di Sekretariat Dewan .senilai Rp2.995.405.000,00 dan tanggungan sisa uang persediaan DKK Rp276.864.623,00 yang per 31 Desember 2018 belum disetor.

- 1) Sampai saat ini Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang telah mengadakan penagihan-penagihan terhadap mantan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang periode 1999-2004 yang masih mempunyai tanggungan TGR dan TKI atau ahli warisnya bagi yang sudah meninggal dunia untuk segera mengembalikan TGR maupun BPO dan TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut adalah pelunasan TGR atas BPO dan TKI sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010:

Tabel 5.3.50
Pelunasan TPTGR

No	Bulan	2007	2008	2009	2010	Jumlah
1	Januari	-	203.884.000	71.935.000	-	275.819.000
2	Pebruari	-	-	84.535.000	-	84.535.000
3	Maret	-	99.455.000	84.535.000	-	183.990.000
4	April	-	99.455.000	-	-	99.455.000
5	Mei	-	99.455.000	84.535.000	-	183.990.000
6	Juni	313.287.000	99.455.000	201.051.000	-	613.793.000
7	Juli	104.429.000	96.968.000	79.561.000	-	280.958.000
8	Agustus	104.429.000	96.968.000	136.593.000	31.295.000	369.285.000
9	September	101.942.000	96.968.000	-	-	198.910.000
10	Oktober	-	96.968.000	-	-	96.968.000
11	Nopember	101.942.000	91.994.000	-	-	193.936.000
12	Desember	101.942.000	107.964.000	-	-	209.906.000
	JUMLAH	827.971.000	1.189.534.000	742.745.000	31.295.000	2.791.545.000

Pada Tahun 2007 total pengembalian senilai Rp827.971.000,00 terbagi atas Rp296.520.000,00 *contra post* dan Rp531.451.000,00 masuk dalam pendapatan TGR.

Pengembalian senilai Rp296.520.000,00 adalah pengembalian ke Kas Umum Daerah TGR untuk Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (BPO) dari realisasi belanja senilai Rp69.720.000,00 disetor ke Kas Umum Daerah senilai Rp19.320.000,00 dan belanja penunjang komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD (TKI) dari realisasi belanja senilai Rp2.473.800.000,00 disetor ke Kas Umum Daerah senilai Rp277.200.000,00 berupa *contra post* karena masih di dalam tahun berjalan (Rp19.320.000,00 + Rp277.200.000,00 = Rp296.520.000,00).

Dengan adanya *contra post* tersebut maka Piutang TGR atas BPO/TKI pimpinan dan anggota DPRD adalah senilai Rp3.043.215.000,00 dari nilai TGR



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

awal dikurangi *contra post* senilai Rp296.520.000,00. Sehingga nilai pelunasan TGR BPO/TKI sampai dengan 2010 adalah Rp2.495.025.000,00 atau (Rp2.791.545.000,00-Rp296.520.000,00).

Untuk TGR anggota DPRD Tahun 2004, ada angsuran dari bulan Januari s/d Desember 2013 senilai Rp31.200.000,00 sehingga sisa TGR adalah senilai Rp2.447.215.000,00.

Uraian di atas merupakan gambaran terhadap pelunasan TP/TGR terhadap anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk TGR Tahun 2004 dan TGR Tahun 2010, yang selama periode tahun anggaran 2017 tidak ada pelunasan kembali. Sehingga posisi perhitungan TP/TGR per 31 Desember 2017 terinci sebagai berikut :

TP/TGR

1. Anggota DPRD Kabupaten Rembang

a. TGR	Rp3.043.215.000,00	
b. Angsuran s.d. 31 Desember 2010	<u>Rp2.495.025.000,00</u>	(-)
Sisa TGR (a – b)		Rp548.190.000,00

2. DPRD Kabupaten Rembang TA 2005

a. TGR	Rp4.910.018.750,00	
b. Angsuran s.d. 31 Desember 2014	<u>Rp2.462.803.750,00</u>	(-)
Sisa TGR (a – b)		Rp2.447.215.000,00

Jumlah TP/TGR yang di reklasifikasi ke aset lainnya Rp2.995.405.000,00

- 2) Berkaitan sisa uang persediaan DKK sebesar Rp276.864.623,00 setelah dilakukan penutupan kas, dan dilakukan klarifikasi ke pihak DKK mulai dari Bendahara pengeluaran sampai dengan Bendahara pengeluaran pembantu, atas penerimaan uang persediaan sampai dengan pemberian panjar ke masing-masing bidang, sisa uang persediaan per 31 Desember 2018 tersebut masih berada di bendahara pengeluaran DKK TA 2018. Berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab mutlak, Bendahara Pengeluaran DKK TA 2018 menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan secara tunai dalam jangka waktu 2 (dua) dengan cara mengangsur setiap bulan Rp.11.535.610,00 dengan jaminan sertifikat HM.1110. Atas hal tersebut nilai sisa uang persediaan senilai Rp276.864.623,00 direklas dari Kas Bendahara Pengeluaran ke asset lainnya- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

b. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga senilai Rp2.978.202.500,00 merupakan aset tanah, Pemerintah Kabupaten Rembang yang dimanfaatkan untuk kerjasama dengan pihak ketiga melalui Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Rembang dan PT. Sami Jaya Mulya tentang Revitalisasi Pasar Sedan Nomor 556/4/2011 dan Nomor 009/SJM-V/2011 Tanggal 10 Mei 2011.

Pada tahun anggaran 2018 dilakukan penilaian kembali atas tanah dan bangunan pasar Sedan oleh Kantor Jasa Penilai Publik sebelum dilakukan reklasifikasi pencatannya ke Aset Neraca Pemerintah Kabupaten Rembang.

c. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, Lisensi dan *franchise*, Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 senilai Rp1.247.867.554,56 adalah nilai asset tidak berwujud setelah dilakukan amortisasi tercatat sesuai nilai bukunya .

Tabel 5.3.51
Aset Tak Berwujud

Jenis ATB	Nilai Perolehan awal	Beban Amortisasi	akumulasi 2018	Nilai Buku
Kajian	2.765.381.350,00	412.085.176,66	1.980.017.876,67	785.363.473,33
Software	2.131.329.957,00	225.272.312,18	1.668.825.875,77	462.504.081,23
Jumlah	4.896.711.307,00	637.357.488,84	3.648.843.752,44	1.247.867.554,56

Aset Tak berwujud milik Pemerintah Kabupaten Rembang per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.247.867.554,56 terinci atas:

Aset Tidak Berwujud 2017		4.105.167.957,00	
Penambahan			
Beban jasa penyusunan software		49.030.000,00	
Beban jasa penyusunan software		14.630.000,00	
Reklas blj modal software		135.900.000,00	
Reklas blj modal kajian		677.983.350,00	
Jumlah		877.543.350,00	4.982.711.307,00
Pengurangan			
Kajian/Masterplan yang telah selesai pengerjaannya		86.000.000,00	
Jumlah		86.000.000,00	4.896.711.307,00
Amortisasi 2017		3.011.486.263,60	
Amortisasi 2018		637.357.488,84	
Jumlah		3.648.843.752,44	
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud 2018			1.247.867.554,56



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Rincian nilai asset tidak berwujud masing-masing SKPD terlampir pada lampiran 5.17

d. **Aset Lain-lain**

Tabel 5.3.52
AsetLain-Lain

Aset Lain-lain	31-Des-18	31-Des-17
	(Rp)	(Rp)
Aset Lain-lain- Penyalahgunaan Kas (dalam proses pengadilan)	10.698.252.997,00	10.698.252.997,00
Aset Lain – lain – Dana TKI	53.000.000,00	53.000.000,00
Aset Lain – lain - DPPKAD PPKD - BPUD Indak	366.886.420,00	366.886.420,00
Aset Lain – lain – aset dikategorikan RB/aset yang akan diusulkan dihapuskan	73.326.782.376,97	12.858.983.689,50
Jumlah	84.444.921.793,97	23.977.123.106,50

1) Aset Lainnya - Aset Lain-lain - Penyalahgunaan Kas (dalam proses Pengadilan) Tahun Anggaran 2011 senilai Rp10.698.252.997,00 terdiri dari:

- Sisa penyalahgunaan kas di Kas Daerah	Rp	8.944.516.377,00
- Sisa penyalahgunaan kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	1.753.736.620,00
	Rp	<u>10.698.252.997,00</u>

Jumlah ini berkurang Rp40.158.498,00 dari Tahun Anggaran 2010 senilai Rp10.738.411.495,00. Setoran tersebut merupakan pengembalian pendapatan kolam renang (penyalahgunaan kas di Kas Daerah-setoran fiktif pendapatan kolam renang) yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 13 Juni 2009 senilai Rp15.000.000,00 dan tanggal 25 Juni 2009 senilai Rp25.160.000,00. Secara menyeluruh akun Aset Lain-lain penyalahgunaan kas (dalam proses pengadilan) terinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.53
Daftar Penyalahgunaan KAS

No	Uraian	Jumlah Tahun 2015 (Rp)	Keterangan
I	Penyalahgunaan Kas di Kas Daerah		
A	Transaksi setoran kas untuk menutup ketekoran kas berupa:		
1	Penerbitan deposito kosong	6.856.647.000,00	Masih dalam proses Pengadilan
2	Pelunasan kredit a.n pribadi dengan agunan APBD	1.500.000.000,00	Masih dalam proses Pengadilan
3	Setoran fiktif pendapatan kolam renang	0,00	Telah disetor ke Kas Daerah bulan Juni 2009
	Jumlah A	8.356.647.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	Jumlah Tahun 2015 (Rp)	Keterangan
B	Transaksi penarikan uang riil yang tidak dilaporkan/dicatat pada pembukuan Bagian Keuangan Setda (dipinjamkan kepada karyawan CV Karya Mina Putera Rp1.500.000.000,00 dan untuk keperluan yang belum jelas Rp500.000.000,00)	2.000.000.000,00	Sudah ada Putusan Pengadilan
C	Pengembalian:		
1	Pembiayaan SPMU Pemda	(248.130.174,00)	Sudah disetor ke Kas Daerah
2	Setoran ke Pemda Rembang	(101.598.886,00)	
3	Sisa saldo dalam Rekening (Rekening yang menampung pelunasan hutang dari karyawan CV Karya Mina Putera)	(1.062.401.563,00)	
	Jumlah C	(1.412.130.623,00)	
	Jumlah A+B+C	8.944.516.377,00	
II	Penyalahgunaan Kas di Bendahara Pengeluaran		
A	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2005	793.736.620,00	Sudah ada Putusan Pengadilan
B	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2006	965.907.500,00	Sudah ada Putusan Pengadilan
C	Pengembalian (setoran oleh Maskuri, SE sesuai Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 14/Pid-B/2008/PN.Rbg tanggal 16 Juli 2008)	(5.907.500,00)	Sudah disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Putusan Pengadilan
	Jumlah A+B+C	1.753.736.620,00	
	Jumlah I + II	10.698.252.997,00	

- a) Transaksi penarikan Kas Daerah yang digunakan oleh Pihak Ketiga yang tidak dilaporkan/dicatat di pembukuan Kas Daerah senilai Rp2.000.000.000,00 telah ada keputusan pengadilannya. Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 22/PID.B/2008/PN.Rbg Tanggal 15 Agustus 2010 a.n. Maskuri, SE dan dikuatkan dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 385/Pid/2008/PTSmg tanggal 06 November 2008, dengan pidana penjara dan denda tanpa ada pembayaran uang pengganti kerugian. Demikian juga Putusan dari Pengadilan Negeri Rembang Nomor 23/PID.B/2008/PN.Rbg, di tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Nomor 371/PID/2008/PTSmg tanggal 06 November 2008 a.n. Hari Riyadi dan M.Zahli dengan pidana penjara, denda, dan ganti kerugian untuk kedua terdakwa Rp55.688.000,00 namun sampai dengan Tahun Anggaran 2011 belum masuk ke Kas Daerah;
- b) Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2005 yang disalahgunakan oleh Pihak Ketiga senilai Rp793.736.620,00 telah ada putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pid.B/2008/PN.Rbg Tanggal 05 Agustus 2008 a.n. M.Zahli agar membayar uang pengganti kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Rembang senilai Rp793.736.620,00, kemudian terdakwa melakukan banding di Pengadilan Tinggi Semarang dan telah ada putusan dari Pengadilan tinggi Semarang Nomor 378/Pid/2008/PTSmg Tanggal 21 Januari 2009 yang meniadakan pembayaran uang pengganti kerugian;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- c) Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 yang disalahgunakan oleh Pihak Ketiga senilai Rp965.907.500,00 telah ada putusan Pengadilan Negeri Rembang, dengan Putusan Nomor 14/Pid.B/2008/PN.Rbg tanggal 16 Juli 2008 a.n. Maskuri, SE yang salah satunya menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Rembang senilai Rp5.907.500,00 yang telah disetor pada Tahun Anggaran 2007;
- d) Atas putusan pengadilan tersebut disertakan juga barang bukti yang disita dan telah dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Rembang berupa beberapa mobil, tanah dan aset lainnya hasil sitaan Tipikor tersebut telah dilelang dan menambah pendapatan daerah senilai Rp72.955.000,00.
- 2) Aset Lain – Lain Dana TKI senilai Rp53.000.000,00 merupakan tunggakan merah Dana Pinjaman PJTKI Kabupaten Rembang yang semula berada di akun investasi non permanen direklasifikasi ke akun aset lainnya – aset lain – lain- Dana TKI dengan alasan bahwa nilai tersebut bukan merupakan dana bergulir, tapi merupakan tunggakan merah TKI yang tetap tertagih di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rembang. Nilai Rp53.000.000,00 merupakan sisa tunggakan setelah terdapat pelunasan senilai Rp2.400.000 di tahun 2015 terhadap tunggakan senilai Rp55.400.000,00

Pada Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh Inpektorat Kabupaten Rembang pada Dana Pinjaman PJTKI Kabupaten Rembang tersebut. Dana PJTKI senilai Rp200.000.000,00 dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Rembang dengan PT Bank Jateng Cabang Rembang ditempatkan sebagai Cash Collateral di PT Bank Jateng Cabang Rembang dengan Nomor Rekening Ac.1.029.02684.9 senilai Rp196.000.000,00.

Secara menyeluruh sampai dengan 31 Agustus 2012, dana senilai Rp200.000.000,00 tersebut tersisa Rp156.402.423,00 terinci sebagai berikut:

Dana Bantuan PJTKI	Rp	200.000.000,00
Biaya umum	Rp	4.000.000,00
Dana yang ditempatkan di PT Bank Jateng	Rp	196.000.000,00
Jasa Giro per 28-10-2001 s/d 31-8-2012	Rp	15.802.423,00
	Rp	211.802.423,00
Potongan tunggakan merah/angsuran macet	Rp	55.400.000,00
Sisa dana Pinjaman PJTKI	Rp	156.402.423,00

Sesuai dengan LHP Inspektorat Kabupaten Rembang No.700/06/RHS/IRBAN-IV/2012 Tanggal 14 September 2012 sisa dana PJTKI pada rekening Ac.1.029.02684.9 di PT Bank Jateng Cabang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Kabupaten Rembang agar disetorkan ke Kas Daerah, maka per tanggal 8 Oktober 2012 dilakukan pemindahbukuan atas penutupan rekenening tersebut dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Rembang senilai Rp156.839.483,00.

Dan menarik surat Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Rembang No.700/1338/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Penarikan Sisa Dana Proyek Bantuan Pinjaman PJTKI dan Anggunan/ jaminannya, telah diserahkan 4 buah SKPT asli dan 5 buah SHM asli jaminan kredit TKI kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Rembang sebagai berikut:

1. SKPT No.179/2002 An Kurdi Ds Kunir Kec. Sulang
2. SKPT No.183/2002 An Ds. Mojorembun Kec. Kaliori Muntaram
3. SKPT No.181/2002 An Sumani Ds. Kunir Kec. Sulang
4. SKPT No.182/2002 An Ds. Dadapmulyo Kec. Sarang Sukarman
5. SHM No.184/ An Sarmah Ds. Sendangmulyo Kec. Kragan Nursam
6. SHM No.327 An Lampiyati Binti Kec Sulang Kastono
7. SHM No.14 An Noviana Ds. Kunir Kec. Sulang Likitawati
8. SHM No.268 An Triyana Ds. Sidowayah Kec. Rembang
9. SHM No.52 An Tasman Ds. Jatihati Kec. Sumber

Untuk SHM No.52 a.n. Tasman sudah lunas namun dokumen belum diambil masih di Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Rembang

- 3) *Akun Aset Lainnya-Aset Lain-lain - DPPKAD PPKD - BPUD Indak* senilai Rp366.886.420,00 merupakan Investasi pada BPUD Indak yang mengelola usaha Senkuko dan Warung Kayu dan telah berhenti secara operasional. Usaha Warung Kayu sejak ditetapkan penyewa pertama sampai dengan sekarang belum dioperasikan dan belum ada pendapatan sewa yang masuk sebagai pendapatan daerah termasuk usaha Senkuko dari awal operasionalnya tahun 2004 s/d 2008 juga selalu mengalami kerugian dan mempunyai tunggakan pajak.

Keberadaan Senkuko dan Warung Kayu tidak efektif lagi dan telah dihentikan operasionalnya, maka Pemerintah Daerah membentuk Panitia Pembubaran BPUD Indak Kabupaten Rembang sesuai Keputusan Bupati Rembang Nomor 518/95/2009 Tanggal 3 Pebruari 2009, dengan tugas antara lain melakukan inventarisasi aset, melaksanakan proses lelang aset, menyelesaikan status aset tetap yang dimiliki BPUD Indak, menyelesaikan kewajiban keuangan BPUD Indak, dan menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembubaran BPUD Indak.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Aset Senkuko berupa peralatan dan mesin yang masih baik dititipkan untuk dilelang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan terlelang senilai Rp24.900.000,00. Hasil lelang tersebut berdasarkan LHP Badan Pengawas Daerah Nomor 700/001/T.IV/2007 Tanggal 16 Januari 2008 bahwa hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang/ kewajiban keuangan yang harus dibayarkan Senkuko. Sehingga berdasarkan surat Kepala Diperindagkop & UMKM No.518/1992/2012 Tanggal 19 Desember 2012 perihal permohonan pencairan hasil penjualan aset Senkuko, pada Tanggal 21 Desember 2012 hasil penjualan/ lelang senilai Rp24.900.000,00 diserahkan pada Kepala Diperindagkop & UMKM selaku Ketua Badan Pengelola BPUD Indak.

Dan sesuai review Inspektorat Kabupaten Rembang No.700/050/Review/2013 Tanggal 14 Februari 2013 atas LKPD Kabupaten Rembang *unaudited* TA 2012, hasil lelang barang Senkuko tersebut disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp24.900.000,00.

- 4) *Akun* Aset Lainnya – senilai Rp73.326.782.376,97 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.3.54
Aset Lain Lain

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	ATB (software) Rusak Berat	69.202.500,00
2	Tanah Pelabuhan di Kec Sluke	68.045.900.000,00
3	Aset Rusak Berat	10.079.951.375,97
4	Akumulasi Rusak Berat	(4.868.271.499,00)
	Jumlah	73.326.782.376,97

Saldo Tanah Pelabuhan di Kecamatan Sluke sebesar Rp68.045.900.000,00 tersebut belum termasuk nilai tanah hasil reklamasi pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bonang Kecamatan Sluke seluas 183.024 m². Dari total asset tanah hasil reklamasi seluas 264.640,00 m², diantaranya seluas 81.616 m² telah diterbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 0002 atas nama Pemkab Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang belum dapat mencatat asset tanah seluas 183.024 m² (264.640,00 m²-81.616 m²) tersebut karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya permasalahan terkait investor yang mengklaim turut serta dalam proses kegiatan reklamasi. Sampai dengan per 31 Desember 2018 permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan oleh Pemkab Rembang. Sebagaimana diungkapkan dalam LHP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor LHA058/PW11/2016 tanggal 12 Februari 2016, diketahui adanya permasalahan legalitas dokumen perjanjian kerjasama pelaksanaan reklamasi, terutama terkait legalitas penunjukkan salah satu investor,



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

serta ketidakjelasan kerjasama investasi yang berdampak pada ketidakpastian hak dan kewajiban masing-masing investor;

- b. Selain itu, berdasarkan LHP Nomor LHA058/PW11/2016 tersebut, juga terdapat permasalahan luas lahan hasil reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke, yang diklaim berbeda oleh masing-masing investor yang terlibat dalam proses reklamasi. Pemkab Rembang mengalami kesulitan untuk mengambil langkah penyelesaian, berupa pengurusan bukti kepemilikan dan penilaian asset tanah berdasarkan biaya reklamasi yang sebenarnya dari masing-masing investor.

6. KEWAJIBAN

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah senilai Rp58.008.769.101,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.55
Kewajiban TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	31-Des-18	31-Des-17
		(Rp)	(Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	46.403.704.421,77	23.018.371.084,93
2	Kewajiban Jangka Panjang	11.605.064.680,00	15.759.982.680,00
	Jumlah	58.008.769.101,77	38.778.353.764,93

a. **Kewajiban Jangka Pendek**

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Rembang baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran atau tanggal laporan keuangan. Kewajiban jangka pendek pada Tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp46.403.704.421,77 naik senilai Rp19.230.415.336,84 dibandingkan TA 2017 senilai Rp23.018.371.084,93 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.56
Kewajiban Jangka Pendek TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	31-Des-18	31-Des-17
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	328.465.700,00	2.163.360,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	3.868.368.000,00	1.969.998.000,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.046.567.401,05	1.358.495.277,93
5	Utang Beban	1.708.809.516,00	1.380.927.435,00
6	Utang Kepada Pihak Ketiga	39.451.493.804,72	18.306.787.012,00
	Jumlah	46.403.704.421,77	23.018.371.084,93



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan pihak ketiga senilai Rp328.465.700,00 adalah hutang pajak dari Sekretariat Daerah dan Dindikpora (satuan pendidikan SD/SMP Negeri) atas pengelolaan BOS yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan per 31 Desember 2018 namun belum disetor ke Kas Umum Negara dan baru disetor di Tahun Anggaran 2019.

Tabel 5.3.57
Utang Perhitungan PFK TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	per 31-12-2018	per 31-12-2017
1	Sekretariat Daerah	8.419.331,00	2.163.360,00
2	Satuan Pendidikan (BOS)	320.046.369,00	0,00
	Jumlah	328.465.700,00	2.163.360,00

Dari nilai utang perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp328.465.700,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

	Sekretariat Daerah	Satuan pendidikan SD/SMP N
Penerimaan		
- SP2D	51.841.781.089,00	0,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	3.514.000,00	194.847.207,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	56.714.175,00	4.345.830,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	119.619.331,00	156.221.975,24
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	374.733.333,00	272.227.351,00
- Lain-lain	2.163.360,00	0,00
Jumlah Penerimaan	52.398.525.288,00	627.642.363,24
Pengeluaran		
- SPJ (LS + UP/GU/TU)	51.655.235.154,00	0,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	3.514.000,00	87.978.049,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	55.411.756,00	2.233.742,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	117.804.154,00	80.997.232,24
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	369.431.598,00	136.386.971,00
- Lain-lain	188.709.295,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	52.390.105.957,00	307.595.994,24
Jumlah utang PFK	8.419.331,00	320.046.369,00

2) Utang Bunga

Tidak ada saldo utang bunga per 31 Desember 2018.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang senilai Rp3.868.368.000,00 adalah pembayaran dari utang BLUD di RSUD dr. R.Soetrasno Rembang ke Bank Jateng Tahun 2018 yang merupakan bagian dari skedul pelunasan utang jangka panjang antara RSUD dr.Soetrasno Rembang dengan Bank Jateng.

4) Pendapatan di bayar di muka

Pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah dan telah disetor ke rekening kas umum daerah namun wajib setor/pajak/ retribusi belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari pemerintah daerah atau karena adanya kelebihan bayar pajak atau bukan pajak.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.3.58

Pendapatan dibayar dimuka TA 2018 dan TA 2017

NO	SKPD	Nilai 2018	Nilai 2017
1.	BPPKAD	755.174.864,00	996.088.090,52
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	291.392.537,05	362.407.187,41
	JUMLAH	1.046.567.400,05	1.358.495.277,93

- Nilai senilai pada BPPKAD merupakan penerimaan atas pajak reklame dan pemanfaatan tanah daerah sebesar Rp755.174.864,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp291.392.537,05 mencakup retribusi penyewaan tanah dan bangunan senilai Rp9.769.215,09 dan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah sewa senilai Rp281.623.321,96

5) Utang Beban

Utang Beban sebesar Rp1.708.809.516,00 adalah tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dibayarkan, meliputi rapelan kekurangan pembayaran gaji, tagihan listrik, telepon dan air bulan Desember yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 menjadi beban pemerintah daerah untuk dibayarkan pada periode selanjutnya.

Tabel 5.3.59

Utang Beban TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	per 31-12-2018	per 31-12-2017
1	Utang Beban Pegawai	139.628.995,00	90.559.553,00
2	Utang Beban Barang dan Jasa	1.569.180.521,00	1.290.367.882,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

	Jumlah	1.708.809.516,00	1.380.927.435,00
--	--------	------------------	------------------

Rincian utang beban per masing – masing SKPD terlampir pada Lampiran 5.18

6) Utang Jangka Pendek lainnya

Tidak ada saldo utang jangka pendek lainnya.

7) Utang Pajak

Tidak ada saldo utang pajak.

8) Utang kepada Pihak Ketiga

Merupakan Hutang kepada pihak ketiga dari RSUD dr. Soetrasno senilai Rp39.451.493.804,72 yang belum dibayarkan per 31 Desember 2018, naik besar Rp21.144.706.792,72 dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp18.306.787.012,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.60
Utang Pihak Ketiga TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	Pegawai	Barang Jasa	Modal	Hutang Pihak 3
1	Saldo Awal Hutang 2018	5.016.034.078,00	12.653.113.284,00	637.639.650,00	18.306.787.012,00
2	Pengurangan Hutang 2017	4.981.536.322,00	11.092.970.189,00	637.639.650,00	16.712.146.161,00
3	Saldo Hutang 2017 (1-2)	34.497.756,00	1.560.143.095,00	-	1.594.640.851,00
4	Penambahan Hutang 2018	12.736.328.776,00	18.915.775.612,72	6.204.748.565,00	37.856.852.953,72
5	Saldo Akhir Hutang 2018 (3+4)	12.770.826.532,00	20.475.918.707,72	6.204.748.565,00	39.451.493.804,72

Hutang pihak 3 sebesar Rp39.451.493.804,72 di dalamnya termasuk utang atas pembangunan gedung Jiwa dengan perhitungan fisik yang telah disepakati 68,08% sebesar Rp2.985.864.000,00 dan biaya umum sebesar Rp132.291.000,00 yang belum sama sekali diajukan pembayarannya dan diajukan di TA 2019.

Daftar rincian hutang pihak ketiga pada RSUD dr. Soetrasto dapat dilihat pada lampiran 5.19

b. Kewajiban Jangka Panjang

Adalah kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Utang jangka Panjang senilai Rp11.605.064.680,00 merupakan hutang jangka panjang BLUD RSUD dr. Soetrasno Rembang dengan Bank Jateng Cabang Rembang. Merupakan kredit berjangka dengan masa pinjaman 5 (lima) tahun mulai tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 12 Desember 2022 dengan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

nilai pinjaman maksimal senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar), yang sampai dengan per 31 Desember 2017 telah diterima oleh pihak BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang senilai Rp17.729.980.680,00.

Dengan skema pembayaran atas pokok utang di tahun anggaran 2019 senilai Rp3.868.368.000,00 maka perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 5.3.61
Kewajiban Jangka Panjang

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Total kewajiban jangka panjang	17.729.980.680,00
2	Pembayaran pada tahun 2018 (+)	2.256.548.000,00
3	Kewajiban yang masih harus dilunasi (1-2)	15.473.432.680,00
4	Bagian lancar utang jangka panjang (-)	3.868.368.000,00
5	Kewajiban jangka panjang (3-4)	11.605.064.680,00

7. EKUITAS

Nilai ekuitas per 31 Desember 2018 adalah senilai Rp2.025.366.485.550,19 merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban (Rp2.083.375.254.651,96 - Rp58.008.769.101,77) serta sama dengan nilai Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang.

D. Penjelasan POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

1. PENDAPATAN LO

Pendapatan LO diakui pada saat :

- Timbulnya hak atas pendapatan
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak oleh menagih pendapatan. Pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan LO merupakan Realisasi Pendapatan Operasioanal yang merupakan hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 tanpa terlebih dahulu adanya penagihan yaitu sebesar Rp1.604.531.572.663,68. OPD semula yang memiliki pendapatan hanya 14 OPD pada tahun 2017, sekarang menjadi 15 OPD di tahun 2018.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.4.1
Pendapatan LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	327.869.321.042,68	318.489.095.420,34	9.380.225.622,34	2,95
2	Pendapatan Transfer - LO	1.212.390.991.651,00	1.192.208.108.549,00	20.182.883.102,00	1,69
3	Lain-Lain Pendaptan Daerah Yang Sah - LO	64.271.259.970,00	21.033.652.516,26	43.237.607.453,74	205,56
	JUMLAH	1.604.531.572.663,68	1.531.730.856.485,60	72.800.716.178,08	4,75

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp327.869.321.042,68 meningkat sebesar Rp9.380.225.622,34 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp318.489.095.420,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	107.960.815.742,93	63.568.972.056,07	44.391.843.686,86	69,83
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	22.075.969.462,21	21.653.360.785,01	422.608.677,20	1,95
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	24.209.705.646,65	14.115.656.994,22	10.094.048.652,43	71,51
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	173.622.830.190,89	219.151.105.585,04	(45.528.275.394,15)	(20,77)
	JUMLAH	327.869.321.042,68	318.489.095.420,34	9.380.225.622,34	2,95

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA 2018 sebesar Rp296.676.436.263,15 dengan penambahan berupa :

- Piutang tahun 2018 sebesar Rp72.880.712.571,00
- Pendapatan diterima dimuka tahun 2017 sebesar Rp1.358.495.277,93
- Koreksi sebesar Rp5.719.396.497,91 pada RSUD dr.R.Soetrasno sebesar Rp4.260.706,00 karena penyesuaian koreksi piutang 2017 ; pada Dinas Perhubungan sebesar Rp945.000,00 karena jurnal penyesuaian pencatatan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

saldo awal ; pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp279.663.203,26 karena koreksi BPK atas pendapatan diterima dimuka yang double catat ; pada BPPKAD sebesar Rp5.434.402.588,65 karena penyesuaian pencatatan laba ditahan atas penyertaan modal 2018 dan Rp125.000,00 karena pencatatan piutang jasa giro yg blm disetor oleh DPKP th 2018.

Dan pengurangannya berupa :

- Piutang tahun 2017 sebesar Rp47.439.338.363,00
- Pendapatan diterima dimuka tahun 2018 sebesar Rp1.089.557.125,55
- Koreksi sebesar Rp 236.824.078,76 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp150.600,00 (pada Puskesmas Rembang 1, Lasem dan Kragan 2 atas Piutang awal tahun 2017) ; pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp236.673.478,76 karena koreksi BPK atas pengelompokkan PAD.

1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp107.960.815.742,93 meningkat sebesar Rp44.391.843.686,85 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp63.568.972.056,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.3
Tabel Pendapatan Pajak Daerah – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Pajak Hotel - LO	1.650.381.381,00	879.929.592,00	770.451.789,00	87,56
2	Pajak Restoran - LO	3.645.183.364,00	3.080.115.100,00	565.068.264,00	18,35
3	Pajak Hiburan - LO	227.583.750,00	208.322.500,00	19.261.250,00	9,25
4	Pajak Reklame - LO	846.050.655,93	999.566.311,07	(153.515.655,14)	(15,36)
5	Pajak Penerang Jalan - LO	23.455.582.696,00	18.129.943.313,00	5.325.639.383,00	29,37
6	Pajak Parkir - LO	71.669.000,00	12.400.000,00	59.269.000,00	477,98
7	Pajak Air Tanah - LO	367.950.790,00	201.043.950,00	166.906.840,00	83,02
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	8.647.500,00	9.692.500,00	(1.045.000,00)	(10,78)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	52.313.087.950,00	16.636.858.450,00	35.676.229.500,00	214,44
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	15.393.587.499,00	12.143.062.273,00	3.250.525.226,00	26,77
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	9.981.091.157,00	11.268.038.067,00	(1.286.946.910,00)	(11,42)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
	JUMLAH	107.960.815.742,93	63.568.972.056,07	44.391.843.686,86	69,83

Bila dibandingkan dengan LRA Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan realisasi anggaran Pendapatan Pajak Daerah – LRA 2018 sebesar Rp100.438.352.553,00 dengan adanya penambahan berupa :

- Piutang tahun 2018 pada BPPKAD sebesar Rp29.485.235.037,00
- Pendapatan diterima dimuka tahun 2017 pada BPPKAD sebesar Rp148.463.984,93

Adanya pengurangan berupa :

- Piutang tahun 2017 pada BPPKAD sebesar Rp21.942.027.344,00.
- Pendapatan diterima dimuka pada BPPKAD tahun 2018 sebesar Rp169.208.488,00.

2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp22.075.969.462,21 meningkat sebesar Rp422.608.677,20 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp21.653.360.785,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Pendapatan Retribusi Daerah – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	79.959.000,00	76.034.500,00	3.924.500,00	5,16
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	797.635.000,00	772.060.000,00	25.575.000,00	3,31
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	17.582.950,00	12.476.350,00	5.106.600,00	40,93
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	151.580.500,00	344.837.500,00	(193.257.000,00)	(56,04)
5	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	2.144.208.478,00	1.637.617.050,00	506.591.428,00	30,93
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	588.525.000,00	564.246.000,00	24.279.000,00	4,30



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	379.824.541,00	331.408.000,00	48.416.541,00	14,61
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.664.268.379,21	2.008.739.470,01	655.528.909,20	32,63
9	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	237.350.900,00	232.110.000,00	5.240.900,00	2,26
10	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	11.652.036.414,00	11.730.060.915,00	(78.024.501,00)	(0,67)
11	Retribusi Terminal - LO	259.276.000,00	263.570.000,00	(4.294.000,00)	(1,63)
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	98.025.000,00	200.816.000,00	(102.791.000,00)	(51,19)
13	Retribusi Rumah Potongan Hewan - LO	45.945.000,00	46.429.500,00	(484.500,00)	(1,04)
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	0,00	120.506.900,00	(120.506.900,00)	(100,00)
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	902.196.000,00	1.026.711.000,00	(124.515.000,00)	(12,13)
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	92.780.000,00	76.065.000,00	16.715.000,00	21,97
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.815.407.050,00	619.586.200,00	1.195.820.850,00	193,00
18	Retribusi Izin Gangguan - LO	144.178.650,00	1.566.326.400,00	(1.422.147.750,00)	(90,80)
19	Retribusi Izin Trayek - LO	5.190.600,00	23.760.000,00	(18.569.400,00)	(78,15)
20	Retribusi Izin Perikanan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	22.075.969.462,21	21.653.360.785,01	422.608.677,20	1,95

Bila dibandingkan dengan LRA, Pendapatan Retribusi Daerah – LO merupakan realisasi anggaran Pendapatan Retribusi Daerah – LRA 2018 sebesar Rp21.441.590.432,00 dengan adanya penambahan berupa :

- Piutang tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp78.816.000,00
- Piutang tahun 2018 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp269.776.500,00
- Piutang tahun 2018 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.996.632,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- Piutang tahun 2018 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp630.000.000,00
- Piutang tahun 2018 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp512.234.290,00
- Piutang tahun 2018 pada BPPKAD sebesar Rp26.854.000,00
- Pendapatan diterima dimuka tahun 2017 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp265.439.843,71
- Pendapatan diterima dimuka tahun 2017 pada BPPKAD sebesar Rp847.624.105,59
- Jurnal koreksi tambah pada Dinas Perhubungan atas penyesuaian pencatatan saldo awal piutang sebesar Rp945.000,00 dan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp279.663.203,26 karena koreksi audit atas pendapatan diterima dimuka yang double catat data.

Adanya pengurangan berupa :

- Piutang tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp35.198.500,00
- Piutang tahun 2017 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp232.844.250,00
- Piutang tahun 2017 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp700.000.000,00
- Piutang tahun 2017 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp413.425.000,00
- Piutang tahun 2017 pada BPPKAD sebesar Rp27.104.000,00
- Pendapatan diterima dimuka tahun 2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp289.432.418,35
- Pendapatan diterima dimuka tahun 2018 pada BPPKAD sebesar Rp585.966.376,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Kabupaten Rembang merupakan bagi laba atas penyertaan modal dengan saldo 31 Desember 2018 sebesar Rp24.209.705.646,65 meningkat sebesar Rp10.094.048.652,43 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp14.115.656.994,22 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	9.874.146.118,65	9.288.996.632,22	585.149.486,43	6,30
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perbankan	14.335.559.528,00	4.826.660.362,00	9.508.899.166,00	197,01
	JUMLAH	24.209.705.646,65	14.115.656.994,22	10.094.048.652,43	71,51

Bila dibandingkan dengan LRA, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO merupakan realisasi anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA 2018 sebesar Rp18.775.303.058,00 dengan adanya penambahan sebesar Rp5.434.402.588,65 dari BPPKAD berupa penyesuaian pencatatan laba ditahan atas penyertaan modal TA 2018 (pd pendaptan LO dan beban) Rp5.040.184.702,43 dan koreksi audit atas perhitungan laba dan rugi BUMD Rp394.217.886,22.

4) Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah – LO Kabupaten Rembang per 31 Desember 2018 sebesar Rp173.622.830.190,89 menurun sebesar Rp45.528.275.394,15 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp219.151.105.585,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Lain-lain PAD Yang Sah – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	174.940.000,00	223.242.000,00	(48.302.000,00)	(21,64)
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	3.501.426.408,00	8.258.104.243,00	(4.756.677.835,00)	(57,60)
4	Pendapatan Bunga - LO	10.271.682.940,00	9.641.233.369,00	630.449.571,00	6,54
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	927.093.577,00	485.414.424,00	441.679.153,00	90,99
7	Pendapatan Denda Pajak - LO	405.796.227,00	232.715.572,00	173.080.655,00	74,37
8	Pendapatan Denda Retribusi - LO	19.463.700,00	15.413.885,00	4.049.815,00	26,27
9	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	750.000,00	1.750.000,00	(1.000.000,00)	(57,14)
10	Pendapatan dari Pengembalian - LO	4.237.512.162,16	3.661.253.477,00	576.258.685,16	15,74
11	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	414.346.665,74	490.450.037,00	(76.103.371,26)	(15,52)
12	Penerimaan Pihak Ketiga - LO	32.564.334,00	51.970.000,00	(19.405.666,00)	(37,34)
13	Pendapatan Zakat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pendapatan BLUD - LO	153.637.254.176,99	139.413.813.927,04	14.223.440.249,95	10,20
15	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pendapatan Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pendapatan BOS - LO	0,00	56.675.744.651,00	(56.675.744.651,00)	(100,00)
20	Pendapatan Setoran dari Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	173.622.830.190,89	219.151.105.585,04	(45.528.275.394,15)	(20,77)

Bila dibandingkan dengan LRA, Lain-lain PAD Yang Sah – LO merupakan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA 2018 sebesar Rp156.021.190.220,15 dengan adanya penambahan berupa :

- Piutang tahun 2018 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.143.339.800,00
- Piutang tahun 2018 pada RSUD dr R. SOETRASNO sebesar Rp38.727.460.312,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- Pendapatan diterima dimuka tahun 2017 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp96.967.343,70
- Jurnal koreksi tambah pada RSUD dr. R.SOETRASNO atas piutang tahun 2017 sebesar Rp4.260.706,00
- Jurnal koreksi tambah pada BPPKAD atas jagir Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum disetor ke kasda sebesar Rp125.000,00

Adanya pengurangan berupa :

- Piutang tahun 2017 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.872.394.450,00
- Piutang tahun 2017 pada RSUD dr. R.SOETRASNO sebesar Rp22.216.344.819,00
- Pendapatan diterima dimuka tahun 2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp44.949.843,20
- Jurnal koreksi kurang pada Puskesmas Rembang 1, Lasem dan Kragan 2 atas Piutang awal tahun 2017 sebesar Rp150.600,00 dan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp236.673.478,76 karena koreksi audit atas pengelompokan PAD

b. Pendapatan Transfer – LO

Realisasi Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp1.212.390.991.651,00 meningkat sebesar Rp20.182.883.102,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp1.192.208.108.549,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Pendapatan Transfer – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	905.958.218.893,00	927.645.131.515,00	(21.686.912.622,00)	(2,34)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	169.043.867.887,00	147.400.729.034,00	21.643.138.853,00	14,68
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	110.563.737.871,00	92.803.709.000,00	17.760.028.871,00	19,14
4	Bantuan Keuangan - LO	26.825.167.000,00	24.358.539.000,00	2.466.628.000,00	10,13
	JUMLAH	1.212.390.991.651,00	1.192.208.108.549,00	20.182.883.102,00	1,69

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO terdiri dari:

Tabel 5.4.8



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Bagi Hasil Pajak - LO	23.105.105.123,00	28.022.881.056,00	(4.917.775.933,00)	(17,55)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	21.693.422.153,00	17.340.981.751,00	4.352.440.402,00	25,10
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	771.584.367.000,00	771.584.367.000,00	0,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	89.575.324.617,00	110.696.901.708,00	(21.121.577.091,00)	(19,08)
	JUMLAH	905.958.218.893,00	927.645.131.515,00	(21.686.912.622,00)	(2,34)

a) Bagi Hasil Pajak – LO

Realisasi Bagi Hasil Pajak – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp23.105.105.123,00 menurun sebesar Rp4.917.775.933,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp28.022.881.056,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Bagi Hasil Pajak – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Bagi Hasil Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	11.289.953.266,00	11.168.048.004,00	121.905.262,00	1,09
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	11.800.342.656,00	16.854.833.052,00	(5.054.490.396,00)	(29,99)
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	14.809.201,00	0,00	14.809.201,00	0,00
	JUMLAH	23.105.105.123,00	28.022.881.056,00	(4.917.775.933,00)	(17,55)

Bila dibandingkan dengan LRA, Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO merupakan realisasi anggaran pendapatan Bagi Hasil – LRA 2018 sebesar Rp20.192.268.635,00 dengan adanya penambahan berupa koreksi audit pada BPPKAD atas piutang terhadap kurang bayar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pusat sebesar Rp2.912.836.488,00 berupa :

- Pendapatan bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan sector pertambangan Rp2.591.947.827,00
- Pendapatan bagi hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 Rp306.079.460,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- Pendapatan bagi hasil cukai hasil tembakau Rp14.809.201,00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam – LO

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp21.693.422.153,00 meningkat sebesar Rp4.352.440.402,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp17.340.981.751,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.10

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	1.913.066.422,00	724.811.329,00	1.188.255.093,00	163,94
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	800.419.262,00	525.572.127,00	274.847.135,00	52,29
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	36.346.929,00	30.278.848,00	6.068.081,00	20,04
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	291.237.025,00	480.660.548,00	(189.423.523,00)	(39,41)
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	36.741.112,00	71.137.168,00	(34.396.056,00)	(48,35)
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - LO	3.151.403,00	4.352.112,00	(1.200.709,00)	(27,59)
7	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau - LO	18.612.460.000,00	15.504.169.619,00	3.108.290.381,00	20,05
	JUMLAH	21.693.422.153,00	17.340.981.751,00	4.352.440.402,00	25,10

Bila dibandingkan dengan LRA, Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO merupakan realisasi anggaran pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam– LRA 2018 sebesar Rp20.819.418.859,00 dengan adanya penambahan pada BPPKAD sebesar Rp874.003.294,00 berupa koreksi audit atas piutang terhadap kurang bayar dana bagi hasil dari pusat (SDA) atas

- Pendapatan Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan Rp764.139.727,00
- Pendapatan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan Rp99.184.671,00
- Pendapatan bagi hasil dari pertambangan panas bumi Rp10.170.351,00
- Pendapatan bagi hasil dari pertambangan umum Rp508.545,00

c) Dana Alokasi Umum – LO



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Realisasi Dana Alokasi Umum – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp771.584.367.000,00 tetap sama dibandingkan saldo 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Dana Alokasi Umum – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	771.584.367.000,00	771.584.367.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	771.584.367.000,00	771.584.367.000,00	0,00	0,00

Realisasi Dana Alokasi Umum – LO sama dengan Realisasi Dana Alokasi Umum – LRA tahun 2018 sebesar Rp771.584.367.000,00.

d) Dana Alokasi Khusus – LO

Realisasi Dana Alokasi Khusus – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp89.575.324.617,00 menurun sebesar Rp21.121.577.091,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp110.696.901.708,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.12
Dana Alokasi Khusus – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	14.770.709.000,00	19.940.583.000,00	(5.169.874.000,00)	(25,93)
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO	8.391.164.700,00	8.964.771.000,00	(573.606.300,00)	(6,40)
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO	5.746.282.900,00	2.742.428.000,00	3.003.854.900,00	109,53
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi - LO	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00
5	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Bidang Kehutanan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DAK Bidang Perumahan dan	950.373.000,00	0,00	950.373.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
	Kawasan Pemukiman - LO				
8	DAK Bidang Kesehatan - LO	34.507.222.717,00	34.873.220.300,00	(365.997.583,00)	(1,05)
9	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	806.698.000,00	1.450.800.000,00	(644.102.000,00)	(44,40)
10	DAK Bidang Perdagangan - LO	526.040.000,00	0,00	526.040.000,00	0,00
11	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	421.982.000,00	0,00	421.982.000,00	0,00
12	DAK Bidang Pertanian - LO	3.842.422.000,00	3.956.773.000,00	(114.351.000,00)	(2,89)
13	DAK Bidang Pendidikan - LO	14.874.968.600,00	15.127.482.000,00	(252.513.400,00)	(1,67)
14	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dana Alokasi Khusus Pariwisata	795.361.700,00	0,00	795.361.700,00	0,00
16	DAK Fisik Pasar	3.492.100.000,00	613.240.000,00	2.878.860.000,00	469,45
17	DAK Fisik Tambahkan	0,00	23.027.604.408,00	(23.027.604.408,00)	(100,00)
	JUMLAH	89.575.324.617,00	110.696.901.708,00	(21.121.577.091,00)	(19,08)

Realisasi Dana Alokasi Khusus – LO sama dengan Realisasi Dana Alokasi Khusus – LRA tahun 2018 sebesar Rp89.575.324.617,00.

2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp169.043.867.887,00 meningkat sebesar Rp21.643.138.853,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp147.400.729.034,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	135.157.721.710,00	119.428.018.295,00	15.729.703.415,00	13,17
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	492.050.000,00	1.140.150.000,00	(648.100.000,00)	(56,84)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
3	Bantuan Operasional Sekolah - LO	16.230.600.000,00	0,00	16.230.600.000,00	0,00
4	Dana Bantuan Dasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional KB (BOKB) - LO	15.729.107.298,00	8.943.478.739,00	6.785.628.559,00	75,87
6	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	1.434.388.879,00	1.395.701.000,00	38.687.879,00	2,77
7	Tunjangan Khusus Guru - LO	0,00	314.381.000,00	(314.381.000,00)	(100,00)
8	Bantuan Operasional PAUD - LRA	0,00	16.179.000.000,00	(16.179.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	169.043.867.887,00	147.400.729.034,00	21.643.138.853,00	14,68

Bila dibandingkan dengan LRA, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO merupakan realisasi anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA 2018 sebesar Rp398.053.997.887,00 dengan adanya pengurangan pada dinas BPPKAD sebesar Rp229.010.130.000,00 karena koreksi BPK atas pencatatan Pendapatan dan Beban Dana Bantuan Desa.

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp110.563.737.871,00 meningkat sebesar Rp17.760.028.871,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp92.803.709.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	24.068.242.592,00	20.161.487.173,00	3.906.755.419,00	19,38
2	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	20.522.207.304,00	15.359.389.745,00	5.162.817.559,00	33,61



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
3	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	36.007.866.795,00	26.830.199.341,00	9.177.667.454,00	34,21
4	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LO	73.084.137,00	31.258.258,00	41.825.879,00	133,81
5	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	29.892.337.043,00	30.421.374.483,00	(529.037.440,00)	(1,74)
	JUMLAH	110.563.737.871,00	92.803.709.000,00	17.760.028.871,00	19,14

Bila dibandingkan dengan LRA, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LO merupakan realisasi anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LRA 2018 sebesar Rp105.216.144.949,00 dengan adanya penambahan pada dinas BPPKAD sebesar Rp5.347.592.922,00 karena jurnal koreksi audit atas kurang salur penerima pajak provinsi jateng kepada Kabupaten Rembang TA 2018 atas :

- Pendapatan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor Rp1.552.162.488,00
- Pendapatan bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor Rp898.440.678,00
- Pendapatan bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp2.895.145.395,00
- Pendapatan bagi hasil dari pajak air permukaan Rp1.844.361,00

4) Bantuan Keuangan – LO

Realisasi Bantuan Keuangan – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp26.825.167.000,00 meningkat sebesar Rp2.466.628.000,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp24.358.539.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.15
Bantuan Keuangan – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	26.825.167.000,00	24.358.539.000,00	2.466.628.000,00	10,13
	JUMLAH	26.825.167.000,00	24.358.539.000,00	2.466.628.000,00	10,13



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Realisasi Bantuan Keuangan – LO 31 Desember 2018 sebesar Rp26.825.167.000,00 merupakan Bantuan Keuangan yg berasal dari Provinsi Jawa Tengah :

- Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah atas TMMD & SID sejumlah Rp596.490.000,00.
- Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, FEDEP, GAKY, NANGKIS, PUS, SIPD sejumlah Rp290.000.000,00.
- Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah atas Sarpras Peningkatan Jalan ruas Tireman-Ngotet Rembang sejumlah Rp2.675.309.000,00.
- Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah atas Sarpras Peningkatan jalan Karas-Sedan-Pandangan sejumlah Rp627.807.900,00.
- Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah atas Sarpras Pembangunan Puskesmas Sumber sebesar Rp1.132.978.400,00.
- Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah atas Sarpras Pembangunan Puskesmas Sumber dan Peningkatan Jalan Kalipang Lodan sebesar Rp8.802.759.600,00
- Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah atas Peningkatan Jalan Tireman-Ngotet dan Peningkatan Jalan Karas-Sedan sebesar Rp12.699.822.100,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp64.271.259.970,00 meningkat sebesar Rp43.237.607.453,70 dibandingkan 31 Desember 2017 sebesar Rp21.033.652.516,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.16
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Pendapatan Hibah - LO	64.271.259.970,00	21.033.652.516,26	43.237.607.453,74	205,56
2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	64.271.259.970,00	21.033.652.516,26	43.237.607.453,74	205,56

1) Pendapatan Hibah – LO

Realisasi Pendapatan Hibah – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp64.271.259.970,00 meningkat sebesar Rp43.237.607.453,74 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp21.033.652.516,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.17
Pendapatan Hibah – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	7.669.817.950,00	21.033.652.516,26	(13.363.834.566,26)	(63,54)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	55.967.950.020,00	0,00	55.967.950.020,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	534.072.000,00	0,00	534.072.000,00	0,00
4	Pendapatan Hibah dari Kelompok masyarakat/perorangan - LO	99.420.000,00	0,00	99.420.000,00	0,00
	JUMLAH	64.271.259.970,00	21.033.652.516,26	43.237.607.453,74	205,56

a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp7.669.817.950,00 menurun sebesar Rp13.363.834.566,26 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp21.033.652.516,26 yang diberikan melalui OPD:

Tabel 5.4.18
Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Dinas Pendidikan,	5.913.549.950,00	7.367.396.338,26	(1.453.846.388,26)	(19,73)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
	Pemuda dan Olahraga				
2	Dinas Kesehatan	0,00	3.487.458.600,00	(3.487.458.600,00)	(100,00)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	441.716.000,00	52.233.500,00	389.482.500,00	745,66
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	263.992.000,00	0,00	263.992.000,00	0,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	26.000.000,00	8.414.763.404,00	(8.388.763.404,00)	(99,69)
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	24.560.000,00	0,00	24.560.000,00	0,00
7	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	1.000.000.000,00	1.711.800.674,00	(711.800.674,00)	(41,58)
	JUMLAH	7.669.817.950,00	21.033.652.516,26	(13.363.834.566,26)	(63,54)

- Pendapatan hibah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.913.549.950,00 berupa penyesuaian pendapatan hibah peralatan dan mesin Blockgrant sebesar Rp763.679.950,00 dan penyesuaian hibah dari pemerintah/ Blockgrant tahun 2018 atas bangunan gedung sebesar Rp5.149.870.000,00
- Pendapatan hibah di BPBD 31 Desember 2018 dari BNPB sebesar Rp441.716.000,00 tersebut berupa Motor Trail 2 unit @ Rp26.587.000,00 ; Mobil Tangki Air 1 unit Rp332.420.000,00 ; Motor Trail 2 unit @ Rp28.061.000,00.
- Pendapatan hibah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 31 Desember 2018 dari Kemensos sebesar Rp263.992.000,00 berupa kendaraan.
- Pendapatan hibah di Dinas Kelautan dan Perikanan 31 Desember 2018 sejumlah Rp26.000.000,00 dari Pusat sejumlah Rp11.150.000,00 dan ada penyesuaian hibah sepeda motor perolehan tahun 2011 sebesar Rp14.850.000,00
- Pendapatan hibah di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp24.560.000,00 dari Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Koperasi Provinsi Jateng berupa Motor 1 unit Rp13.750.000,00 ;
Printer 1 unit Rp1.960.000,00 ; Komputer PC 1 unit Rp8.850.000,00.

- Pendapatan hibah di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) sebesar Rp1.000.000.000,00 dari Pemerintah Pusat untuk PDAM (penyertaan modal).

b) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp55.967.950.020,00 meningkat sebesar Rp55.967.950.020,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 yang diberikan kepada 403 Sekolah Negeri di Kabupaten Rembang dengan jumlah SMP 39 sekolah dan jumlah SD 364 sekolah yang tersebar sesuai wilayahnya dengan rincian :

Tabel 5.4.19
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	SATUAN PENDIDIKAN SMP	17.186.031.151,00	0,00	17.186.031.151,00	0,00
2	SATUAN PENDIDIKAN SD	38.781.918.869,00	0,00	38.781.918.869,00	0,00
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH BULU	1.666.910.000,00	0,00	1.666.910.000,00	
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH GUNEM	1.503.886.051,00	0,00	1.503.886.051,00	
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH KALIORI	2.637.858.128,00	0,00	2.637.858.128,00	
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH KRAGAN	4.218.504.473,00	0,00	4.218.504.473,00	
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH LASEM	2.895.433.826,00	0,00	2.895.433.826,00	
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH PAMOTAN	3.054.994.634,00	0,00	3.054.994.634,00	
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH PANCUR	1.797.549.308,00	0,00	1.797.549.308,00	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH REMBANG	6.100.967.425,00	0,00	6.100.967.425,00	
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH SALE	2.306.180.000,00	0,00	2.306.180.000,00	
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH SARANG	3.732.048.720,00	0,00	3.732.048.720,00	
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH SEDAN	2.608.600.161,00	0,00	2.608.600.161,00	
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH SLUKE	1.693.211.536,00	0,00	1.693.211.536,00	
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH SULANG	2.446.943.161,00	0,00	2.446.943.161,00	
	SATUAN PENDIDIKAN SD WILAYAH SUMBER	2.118.831.446,00	0,00	2.118.831.446,00	
	JUMLAH	55.967.950.020,00	0,00	55.967.950.020,00	0,00

c) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp534.072.000,00 meningkat sebesar Rp534.072.000,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 yang diberikan melalui OPD :

Tabel 5.4.20
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	300.075.000,00	0,00	300.075.000,00	0,00
2	RSUD dr.R.SOETRASNO	233.997.000,00	0,00	233.997.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
	(BLUD)				
	JUMLAH	534.072.000,00	0,00	534.072.000,00	0,00

Pendapatan hibah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 31 Desember 2018 sebesar Rp300.075.000,00 tersebut berupa penambahan aset tetap alat kantor dan rumah tangga dari Komite Sekolah untuk sekolah :

- SMPN 1 Bulu sebesar Rp88.925.000,00
- SMPN 1 Sulang sebesar Rp46.000.000,00 (5 unit PC @ Rp4.000.000,00 dan 2 unit server @ Rp13.000.000,00)
- SMPN 1 Sumber sebesar Rp64.750.000,00 (3 unit server @ Rp12.750.000,00 ; 5 unit komputer @ Rp4.500.000,00 ; 2 unit switchub @ Rp2.000.000,00)
- SMPN 5 Rembang sebesar Rp100.400.000,00 (22 unit komputer Rp84.700.000,00 ; 1 unit server Rp13.000.000,00 ; 1 unit UPS Rp2.700.000,00)

Pendapatan hibah di RSUD dr. R.SOETRSNO 31 Desember 2018 sebesar Rp233.997.000,00 tersebut berupa :

- Hibah dari Bank Jateng sejumlah Rp188.000.000,00 berupa Mobil Ambulance APV GE PS 1,5L.
- Hibah dari STIKES Surya Global Yogyakarta sejumlah Rp5.099.000,00 berupa Laptop.
- Hibah dari STIKES Tlogorejo Semarang sejumlah Rp6.480.000,00 berupa Laptop.
- Hibah dari PT. Samator Gas Industri Kudus sejumlah Rp1.500.000,00 berupa Printer.
- Hibah dari Global Dispomedika sejumlah Rp1.225.000,00 berupa Printer.
- Hibah dari Global Dispomedika Jakarta sejumlah Rp6.250.000,00 berupa Printer.
- Hibah dari Stikes Muhammadiyah Kudus sejumlah Rp7.000.000,00 berupa LCD Proyektor.
- Hibah dari STIKES Karya Husada sejumlah Rp4.975.000,00 berupa LCD Proyektor.
- Hibah dari Global Dispomedika sejumlah Rp10.958.000,00 berupa P.C. Unit.
- Hibah dari Bank Jateng sejumlah Rp1.550.000,00 berupa Lemari Es.
- Hibah dari SMK Cordova Margoyoso Pati sejumlah Rp960.000,00 berupa Kursi Roda.

**d) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan – LO**

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp99.420.000,00 meningkat sebesar Rp99.420.000,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 yang diberikan melalui :

Tabel 5.4.21
**Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/
Perorangan - LO**

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Puskesmas Kragan 2	99.420.000,00	0,00	99.420.000,00	0,00
	JUMLAH	99.420.000,00	0,00	99.420.000,00	0,00

Pendapatan hibah di Puskesmas Kragan2 31 Desember 2018 sebesar Rp99.420.000,00 tersebut berupa :

- Hibah dari dr. Ali Syofii sejumlah Rp70.000.000,00 berupa tanah di area Puskesmas Kragan2 seluas 166 m²
- Hibah dari dr. Intan TA sejumlah Rp3.500.000,00 berupa lemari es.
- Hibah dari dr. Darmono sejumlah Rp6.000.000,00 berupa laptop.
- Hibah dari dr. Ali Syofii sejumlah Rp19.920.000 berupa gedung bangunan mushola As-Shifa di area Puskesmas Kragan2

2) Dana Darurat – LO

Tidak terdapat realisasi Dana Darurat – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018.

3) Pendapatan Lainnya – LO

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Lainnya – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018.

2. BEBAN – LO

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi asset



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan berlalunya waktu.

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional Pemerintah Kabupaten Rembang selama tahun anggaran 2017. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.572.020.387.072,05 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.22
Beban – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Beban Pegawai - LO	833.027.249.062,16	797.173.514.832,34	35.853.734.229,82	4,50
2	Beban Barang dan Jasa	244.470.150.578,03	263.167.459.871,79	(18.697.309.293,76)	(7,10)
3	Beban Bunga	1.468.870.443,00	0,00	1.468.870.443,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah	182.535.624.982,00	46.450.880.000,00	136.084.744.982,00	292,96
6	Beban Bantuan Sosial	8.333.700.000,00	8.927.000.000,00	(593.300.000,00)	(6,65)
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	178.997.552.528,84	82.115.586.589,19	96.881.965.939,65	117,98
8	Beban Penyisihan Piutang	921.992.197,66	2.367.745.791,85	(1.445.753.594,19)	(61,06)
9	Beban Lain-lain	934.024.680,36	256.047.268,30	677.977.412,06	264,79
10	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	10.765.819.900,00	6.437.223.500,00	4.328.596.400,00	67,24
12	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	109.591.641.700,00	136.064.180.000,00	(26.472.538.300,00)	(19,46)
14	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	973.761.000,00	1.090.950.000,00	(117.189.000,00)	(10,74)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
15	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.572.020.387.072,05	1.344.050.587.853,47	227.969.799.218,58	16,96

a. Beban Pegawai – LO

Realisasi Beban Pegawai – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp833.027.249.062,16 meningkat sebesar Rp35.853.734.229,82 dibandingkan 31 Desember 2017 sebesar Rp797.173.514.832,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.23
Beban Pegawai – LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	444.776.258.497,16	453.422.084.187,00	(8.645.825.689,84)	(1,91)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	185.853.971.080,00	158.715.498.865,00	27.138.472.215,00	17,10
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	11.986.500.000,00	7.306.815.000,00	4.679.685.000,00	64,05
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.661.690.625,00	2.160.412.063,00	2.501.278.562,00	115,78
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	874.700.062,00	914.965.338,00	(40.265.276,00)	(4,40)
6	Beban Uang Lembur - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Biaya Pegawai PPK BLUD	85.070.293.435,00	64.501.607.677,00	20.568.685.758,00	31,89
8	Beban Pegawai BOS	7.309.371.091,00	13.251.513.673,34	(5.942.142.582,34)	(44,84)
9	Beban Honorarium	92.494.464.272,00	96.900.618.029,00	(4.406.153.757,00)	(4,55)
	JUMLAH	833.027.249.062,16	797.173.514.832,34	35.853.734.229,82	4,50

b. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang dan Jasa Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp244.470.150.578,03 menurun sebesar Rp18.624.809.293,76 dibandingkan 31 Desember 2017 sebesar Rp263.094.959.871,79 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.4.24
Beban Barang dan Jasa

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Beban Bahan Pakai Habis	15.101.118.947,00	13.771.416.809,00	1.329.702.138,00	9,66
2	Beban Persediaan Bahan/Material	12.054.674.745,42	15.483.207.646,84	(3.428.532.901,42)	(22,14)
3	Beban Jasa Kantor	20.048.315.720,00	18.913.091.573,00	1.135.224.147,00	6,00
4	Beban Premi Asuransi	4.769.675.354,68	4.761.690.846,54	7.984.508,14	0,17
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	2.498.526.872,00	2.396.716.759,00	101.810.113,00	4,25
6	Beban Cetak dan Penggandaan	6.128.769.816,20	5.309.184.509,30	819.585.306,90	15,44
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.619.094.715,87	1.814.351.880,00	(195.257.164,13)	(10,76)
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.077.727.273,00	1.182.002.545,00	(104.275.272,00)	(8,82)
9	Beban Sewa Alat Berat	0,00	72.500.000,00	(72.500.000,00)	(0,00)
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.248.762.500,00	1.165.582.000,00	83.180.500,00	7,14
11	Beban Makanan dan Minuman	21.865.368.036,00	22.054.961.705,00	(189.593.669,00)	(0,86)
12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	807.907.500,00	928.980.500,00	(121.073.000,00)	(13,03)
13	Beban Pakaian Kerja	237.449.000,00	284.275.050,00	(46.826.050,00)	(16,47)
14	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.451.191.400,00	5.433.888.800,00	(3.982.697.400,00)	(73,29)
15	Beban Perjalanan Dinas	37.520.410.415,00	32.107.683.797,00	5.412.726.618,00	16,86
16	Beban Pemeliharaan	1.139.372.856,00	2.847.944.396,00	(1.708.571.540,00)	(59,99)
17	Beban Jasa Konsultasi	1.669.506.000,00	4.799.878.980,00	(3.130.372.980,00)	(65,22)
18	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	30.562.112.740,00	(30.562.112.740,00)	(100,00)
19	Beban Barang untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	54.205.000,00	40.505.000,00	13.700.000,00	33,82
20	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	30.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
21	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.253.542.607,00	4.033.881.782,00	219.660.825,00	5,45
22	Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Beban Honorarium PNS - LO	3.915.000,00	4.700.000,00	(785.000,00)	(16,70)
24	Beban Honorarium Non PNS - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.009.540.000,00	879.210.000,00	130.330.000,00	14,82
26	Beban Barang Dana BOS	34.020.443.713,00	30.288.693.859,00	3.731.749.854,00	12,32
27	Beban Jasa Lainnya	5.632.644.089,00	3.456.517.775,00	2.176.126.314,00	62,96
28	Beban Penanganan Masalah Sosial	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00
29	Beban Beasiswa Pendidikan	1.515.896.000,00	946.589.000,00	569.307.000,00	60,14
30	Beban Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur	3.442.335.000,00	2.805.415.000,00	636.920.000,00	22,70
31	Beban Barang dan Jasa BLUD	60.329.131.091,86	55.544.295.216,11	4.784.835.875,75	8,61
32	Beban Barang Ekstra Komptable	4.926.126.926,00	1.238.181.703,00	3.687.945.223,00	297,85
	JUMLAH	244.470.150.578,03	263.167.459.871,79	(18.697.309.293,76)	(7,10)

Beban Persediaan

Beban persediaan terdiri dari beban bahan pakai habis, beban persediaan bahan/material, beban cetak dan penggandaan, beban obat RSUD, beban barang dan jasa BLUD RSUD, beban barang dan jasa BLUD puskesmas dan beban makanan minuman selama tahun anggaran 2018.

Beban Persediaan – LO merupakan realisasi Belanja Persediaan – LRA 2018 sebesar Rp106.243.339.703,20 ditambah dengan persediaan 2017 sebesar Rp17.464.344.818,13 ; koreksi sebesar Rp8.304.372.283,20 dan adanya pengurangan dari persediaan 2018 sebesar Rp16.532.994.168,05. Adapun selisihnya sejumlah Rp8.304.372.283,20 yang berupa koreksi disejumlah SKPD :

- Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp9.275.000,00 karena adanya belanja modal yang direklas ke persediaan berupa pembelian taplak dan tikar
- Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp28.791.500,00 karena adanya belanja modal yang direklas ke persediaan berupa gorden sebesar Rp10.400.000,00 ;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

lensa kamera Rp4.000.000,00 ; alat pengukur diameter tubuh dan tinggi badan Rp14.391.500,00

- RSUD dr.R.SOETRASNO sebesar Rp8.211.215.407,20 karena adanya transaksi berupa asuransi dibayar dimuka tahun 2017 sebesar Rp34.792.876,21 ; utang beban barang dan jasa atas pembayaran listrik telepon dan air tahun 2018 sebesar Rp227.206.451,00 ; hutang baru pada pihak ketiga sebesar Rp18.413.718.862,72. Dan ada pengurangan berupa utang beban barang dan jasa atas pembayaran listrik telepon dan air tahun 2017 sebesar Rp128.538.960,00 ; asuransi dibayar dimuka tahun 2018 sebesar Rp52.033.539,73 ; reklas dari belanja barang dan jasa ke aset tetap karena pemeliharaan *incenator* pada alat laborat Rp424.150.000,00 ; reklas dari barang dan jasa ke Aset tetap karena pembelian AC 1pk Rp7.000.000,00 AC ½pk Rp3.200.000,00 AC 2pk Rp5.300.000,00 ; kapitalisasi aset bangunan dan gedung BLUD (dari pemeliharaan gedung obsgyn dan orthopedic) Rp130.026.000,00 ; kapitalisasi aset bangunan dan gedung BLUD (bangunan joglo 2018) Rp48.617.000,00 ; pembayaran hutang pihak ke tiga Rp9.648.023.033,00 ; dan jurnal koreksi BPK atas nilai utang belanja barang dan jasa RSUD di Percetakan Daerah Rp17.614.250,00
- Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.995.650,00 karena adanya bium belanja modal yg direklas ke barang jasa karena kegiatan fisik tidak dilaksanakan, dengan rincian beban persediaan ATK Rp635.650,00 ; beban persediaan bahan bakar Rp600.000,00 ; beban bahan jaringan computer Rp540.000,00 ; beban penggandaan Rp220.000,00
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar Rp17.270.000,00 karena adanya reklas belanja modal ke barang jasa berupa baliho
- Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp(990.000) karena adanya reklas dari barang jasa ke belanja modal karena pembelian kipas angin 2 unit @ Rp495.000,00 sehingga menambah aset.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp2.797.800,00 karena adanya koreksi dari BPK atas utang barang dan jasa dengan nilai beban persediaan sebesar Rp363.000,00 ; beban cetak sebesar Rp1.650.000,00 ; dan beban penggandaan sebesar Rp784.800,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp1.158.000,00 karena adanya reklas dari belanja modal ke barang jasa berupa pemakaian persediaan lampu.
- Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp(91.773.000,00) karena koreksi bibit ternak Rp(93.523.000,00) dan reklas belanja modal ke barang jasa berupa pembelian kabel selang Rp1.750.000,00
- Sekretariat Daerah sebesar Rp72.675.500,00 karena reklas belanja modal ke barang jasa berupa pembelian gorden Rp43.560.000,00 ; karpet Rp20.900.000,00 ; dan jurnal koreksi audit atas utang barang jasa Rp8.215.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- Kecamatan Kragan sebesar Rp12.750.000,00 karena reklas belanja modal ke barang jasa berupa pembelian gorden dan spreng
- Kecamatan Sedan sebesar Rp(1.200.000,00) karena reklas barang jasa ke belanja modal berupa pembelian kipas angin 2 unit sehingga menambah aset.
- Inspektorat sebesar Rp35.530.000,00 karena reklas dari belanja modal ke barang jasa berupa pembelian gorden.
- Di 16 Puskesmas sebesar Rp4.876.426,00 karena selisih di beban barang jasa untuk tagihan listrik, telp air 2018 dan 2017.

Beban Dibayar Dimuka

Beban Premi Asuransi merupakan realisasi Belanja Premi Asuransi – LRA 2018 sebesar Rp4.868.609.548,00 dikurangi Beban dibayar dimuka tahun 2018 pada dinas BPPKAD berupa Asuransi kebakaran sebesar Rp98.934.193,32. Sehingga realisasi Beban Premi Asuransi – LO 2018 menjadi sebesar Rp4.769.675.354,68. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir merupakan realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir – LRA 2018 sebesar Rp1.665.356.324,00 dikurangi koreksi audit atas pencatatan beban dibayar dimuka tahun 2018 atas sewa lahan untuk jembatan timbang di Wonokerto dan desa Gading pada dinas BPPKAD sebesar Rp46.261.608,13. Sehingga realisasi Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir – LO tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.619.094.715,87

Kemudian Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit termasuk didalamnya Beban dibayar dimuka tahun 2017 sebesar Rp34.792.876,21 dari Premi Asuransi RSUD dan dikurangi Beban dibayar dimuka 2018 sebesar Rp52.033.539,73.

Beban Barang Ekstrakomtable

Realisasi Beban Barang Ekstrakomtable tahun 2018 sebesar Rp4.926.126.926,00. Beban Barang Ekstrakomtable merupakan aset tetap ekstrakomtable sesuai dengan Perbup Nomor : 900/28/2010 tentang Penetapan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah Dalam Kebijakan AKuntansi Kabupaten Rembang, yang harga perolehannya untuk :

- Aset tetap Peralatan dan Mesin \leq Rp300.000,00
- Aset tetap Gedung dan Banungan \leq Rp10.000.000,00

Merupakan Aset Tetap Ekstrakomtable yang tidak tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tapi tercatat sebagai Beban Barang Ekstrakomtable.

Beban barang dan jasa terbesar TA 2018 adalah beban barang dan jasa pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno yaitu Rp47.725.290.524,59.

c. Beban Bunga



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Realisasi Beban Bunga Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp1.468.870.443,00 meningkat sebesar Rp1.468.870.443 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.25
Beban Bunga

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Beban Bunga Utang Pinjaman	1.468.870.443,00	0,00	1.468.870.443,00	0,00
	JUMLAH	1.468.870.443,00	0,00	1.468.870.443,00	0,00

Realisasi Beban bunga utang pinjaman sebesar Rp1.468.870.443,00 merupakan beban bunga utang pinjaman pada RSUD dr. R.SOETRASNO kepada Bank Jateng.

d. Beban Subsidi

Tidak terdapat realisasi Beban Subsidi Kabupaten Rembang 31 Desember 2018.

e. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp182.535.624.982,00 meningkat sebesar Rp136.084.744.982,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp46.450.880.000 melalui SKPD:

Tabel 5.4.26
Beban Hibah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat				
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.107.616.000,00	0,00	1.107.616.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	21.850.000,00	0,00	21.850.000,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93.225.842.824,00	0,00	93.225.842.824,00	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.670.517.000,00	0,00	1.670.517.000,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	188.741.900,00	0,00	188.741.900,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	364.812.000,00	0,00	364.812.000,00	0,00
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	215.878.750,00	0,00	215.878.750,00	0,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	29.142.491.900,00	0,00	29.142.491.900,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

9	Dinas Lingkungan Hidup	70.910.000,00	0,00	70.910.000,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.413.250,00	0,00	6.413.250,00	0,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	410.851.200,00	0,00	410.851.200,00	0,00
14	Sekretariat Daerah	72.169.000,00	0,00	72.169.000,00	0,00
15	Kecamatan Rembang	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
16	Kecamatan Kaliori	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
17	Kecamatan Bulu	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
18	Kecamatan Lasem	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	0,00
19	Kecamatan Sale	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
20	Kecamatan Sarang	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
21	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	158.849.000,00	0,00	158.849.000,00	0,00
	JUMLAH	126.681.892.824,00	0,00	126.681.892.824,00	0,00

Tabel 5.4.27
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan				
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.688.750,00	0,00	17.688.750,00	0,00
2	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	71.655.408,00	0,00	71.655.408,00	0,00
3	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	55.764.388.000,00	46.450.880.000,00	9.313.508.000,00	20,05
	JUMLAH	55.853.732.158,00	46.450.880.000,00	9.402.852.158,00	20,24

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan melalui

- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp17.688.750,00 berupa pemberian Aset Tetap yaitu Televisi dan PC Unit yang dihibahkan ke Ponpes Al Quran Narukan Kragan.
- Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp71.655.408,00 berupa pemberian Aset Tetap yaitu Gedung Bangunan yang dihibahkan ke desa sebagai pasar desa.
- Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) sebesar Rp55.764.388.000,00 merupakan Belanja Tidak Langsung – Belanja Hibah yang dikelola BPPKAD dengan rincian



- ✓ Hibah kepada KB, TK, SD, Madrasah, SMP, dan BOP PAUD di Kabupaten Rembang sebesar Rp19.928.180.000,00 dengan OPD Pengampu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- ✓ Hibah kepada Rumah Sakit Islam Arafah YKM NU Rembang sebesar Rp850.000.000,00 dengan OPD Pengampu Dinas Kesehatan.
- ✓ Hibah berupa air minum perdesaan, sanitasi MCK, tangki septik individu dan KKM Pamsimas (Kelompok Keswadayaan Masyarakat Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di Kabupaten Rembang sebesar Rp2.617.208.000,00 dengan OPD Pengampu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- ✓ Hibah kepada anak cabang organisasi masyarakat di Kabupaten Rembang sebesar Rp565.000.000,00 dengan OPD Pengampu Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- ✓ Hibah kepada karang taruna “wira bakti” desa woro, karang taruna desa selopuro dan kelompok wanita bugar desa karangharjo sebesar Rp60.000.000,00 dengan OPD Pengampu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- ✓ Hibah kepada kelompok ternak dan kelompok tani di Kabupaten Rembang sebesar Rp6.813.000.000,00 dengan OPD Pengampu Dinas Pertanian dan Pangan.
- ✓ Hibah kepada paguyuban dan sanggar seni di Kabupaten Rembang sebesar Rp1.015.000.000,00 dengan OPD Pengampu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- ✓ Hibah kepada kelompok usaha bahari, kelompok petani garam, kelompok nelayan dan kelompok budidaya udang dan lele di Kabupaten Rembang sebesar Rp2.081.000.000,00 dengan OPD Pengampu Dinas Kelautan dan Perikanan.
- ✓ Hibah kepada Pramuka, KONI, FORMI, PMI, Dharma Wanita, Ponpes, Masjid, Mushola dan IGTKI (Ikatan Guru TK Indonesia) di Kabupaten Rembang sebesar Rp21.835.000.000,00 dengan OPD Pengampu Sekretariat Daerah bagian Kesra.

f. Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp8.333.700.000,00 menurun sebesar Rp593.300.000 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp8.927.000.000,00 melalui SKPD:

Tabel 5.4.28
Beban Bantuan Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	8.333.700.000,00	8.927.000.000,00	(593.300.000,00)	(6,65)
	JUMLAH	8.333.700.000,00	8.927.000.000,00	(593.300.000,00)	(6,65)

Beban Bantuan Sosial melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) sebesar Rp8.333.700.000,00 merupakan Belanja Tidak Langsung dengan rincian :

- Bansos penanganan/renovasi rumah tidak layak huni kepada kelompok masyarakat sebesar Rp6.910.000.000,00 dengan OPD Pengampu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Bansos untuk penanganan permasalahan kesejahteraan sosial sebesar Rp1.099.200.000,00 dengan OPD Pengampu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- Bansos untuk kemanusiaan sebesar Rp324.500.000,00 dengan OPD Pengampu Sekretariat Daerah Bagian Kesra.

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp178.997.552.528,84 meningkat sebesar Rp96.881.965.939,65 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp82.115.586.589,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.29
Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	52.914.122.677,00	31.758.776.082,02	21.155.346.594,98	66,61
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.620.541.894,00	12.560.589.491,88	4.059.952.402,12	32,32
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	108.825.530.469,00	37.139.209.296,00	71.686.321.173,00	193,02
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	375.000,00	(375.000,00)	(100,00)
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	637.357.488,84	656.636.719,29	(19.279.230,45)	(2,94)
	JUMLAH	178.997.552.528,84	82.115.586.589,19	96.881.965.939,65	117,98



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp52.914.122.677,00 meningkat sebesar Rp21.155.346.594,98 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp31.758.776.082,02 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.30
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	31 DES 2018 (Rp)	31 DES 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	937.197.181,00	633.392.367,98	303.804.813,02	47,96
2	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	422.529.594,00	363.795.360,00	58.734.234,00	16,14
3	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	8.483.517.753,00	8.440.009.978,00	43.507.775,00	0,52
4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	126.604.037,00	265.932.910,00	(139.328.873,00)	(52,39)
5	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	11.840.800,00	60.790.800,00	(48.950.000,00)	(80,52)
6	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	41.148.333,00	57.508.668,00	(16.360.335,00)	(28,45)
7	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	57.775.633,00	35.624.286,00	22.151.347,00	62,18
8	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	22.558.240,00	16.148.240,00	6.410.000,00	39,69
9	Beban Penyusutan Alat Ukur	642.332.378,00	299.513.212,00	342.819.166,00	114,46
10	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	151.684.090,00	153.824.310,00	(2.140.220,00)	(1,39)
11	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.775.692.471,00	6.795.898,00	1.768.896.573,00	26.028,89
12	Beban Penyusutan Alat Kantor	4.101.294.435,00	1.766.237.871,00	2.335.056.564,00	132,21
13	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	10.680.614.855,00	5.666.978.474,33	5.013.636.380,67	88,47
14	Beban Penyusutan Komputer	10.143.876.919,00	5.487.396.267,61	4.656.480.651,39	84,86
15	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	586.764.046,00	565.042.408,10	21.721.637,90	3,84
16	Beban Penyusutan Alat Studio	1.593.511.294,00	1.153.745.088,00	439.766.206,00	38,12
17	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	684.776.267,00	540.874.939,00	143.901.328,00	26,61



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DES 2018 (Rp)	31 DES 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
18	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	123.524.029,00	193.752.163,00	(70.228.134,00)	(36,25)
19	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	9.034.974.484,00	3.892.935.444,00	5.142.039.040,00	132,09
20	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	146.926.249,00	172.988.606,00	(26.062.357,00)	(15,07)
21	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	2.380.202.754,00	1.398.777.976,00	981.424.778,00	70,16
22	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	462.830.862,00	288.414.217,00	174.416.645,00	60,47
23	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	18.601.534,00	3.612.644,00	14.988.890,00	414,90
24	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	5.316.600,00	56.666,00	5.259.934,00	9.282,35
25	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	1.420.833,00	1.400.000,00	20.833,00	1,49
26	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	31.375.460,00	31.265.460,00	110.000,00	0,35
27	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	49.466.654,00	160.855.710,00	(111.389.056,00)	(69,25)
28	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	190.998,00	190.998,00	0,00	0,00
29	Beban Penyusutan Peralatan Non Senjata Api	195.573.894,00	100.915.120,00	94.658.774,00	93,80
	JUMLAH	52.914.122.677,00	31.758.776.082,02	21.155.346.594,98	66,61

2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp16.620.541.894,00 meningkat sebesar Rp4.059.952.402,12 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp12.560.589.491,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.31
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	31 DES 2018 (Rp)	31 DES 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.307.728.815,00	10.447.459.418,88	4.860.269.396,12	46,52



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DES 2018 (Rp)	31 DES 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	336.203.430,00	1.420.287.314,00	(1.084.083.884,00)	(76,33)
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	43.748.092,00	44.059.656,00	(311.564,00)	(0,71)
4	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	17.037.234,00	17.775.570,00	(738.336,00)	(4,15)
5	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	38.830.983,00	27.429.238,00	11.401.745,00	41,57
6	Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	22.536.480,00	59.336.334,00	(36.799.854,00)	(62,02)
7	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	39.767.202,00	25.810.372,00	13.956.830,00	54,07
8	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	774.936.458,00	478.678.389,00	296.258.069,00	61,89
9	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	39.753.200,00	39.753.200,00	0,00	0,00
	JUMLAH	16.620.541.894,00	12.560.589.491,88	4.059.952.402,12	32,32

3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp108.825.530.469,00 meningkat sebesar Rp71.686.321.173,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp37.139.209.296,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.32
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1					
1	Beban Penyusutan Jalan	96.815.703.968,00	24.323.628.757,00	72.492.075.211,00	298,03
2	Beban Penyusutan Jembatan	1.114.443.699,00	154.674.910,00	959.768.789,00	620,51
3	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	3.532.084.342,00	1.240.042.829,00	2.292.041.513,00	184,84
4	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	23.088.633,00	140.875.790,00	(117.787.157,00)	(83,61)
5	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	8.767.320,00	9.282.837,00	(515.517,00)	(5,55)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
6	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.570.752.431,00	7.225.908.985,00	(2.655.156.554,00)	(36,74)
7	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	70.131.299,00	58.937.518,00	11.193.781,00	18,99
8	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	480.406.437,00	397.238.172,00	83.168.265,00	20,94
9	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	34.056.453,00	23.482.432,00	10.574.021,00	45,03
10	Beban Penyusutan Bangunan Air	49.086.176,00	38.788.088,00	10.298.088,00	26,55
11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	339.022.526,00	347.642.238,00	(8.619.712,00)	(2,48)
12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	199.715.669,00	457.680.686,00	(257.965.017,00)	(56,36)
13	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	5.559.449,00	5.559.449,00	0,00	0,00
14	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	145.491.996,00	80.234.895,00	65.257.101,00	81,33
15	Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan	1.079.668,00	1.079.668,00	0,00	0,00
16	Beban Penyusutan Instalasi Gas	520.292,00	0,00	520.292,00	0,00
17	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	12.767.480,00	12.767.480,00	0,00	0,00
18	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	228.851.232,00	2.189.892.933,00	(1.961.041.701,00)	(89,55)
19	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1.131.909.686,00	411.644.754,00	720.264.932,00	174,97
20	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	62.091.713,00	19.846.875,00	42.244.838,00	212,85
	JUMLAH	108.825.530.469,00	37.139.209.296,00	71.686.321.173,00	193,02

4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tidak ada realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Kabupaten Rembang 31 Desember 2018.

5) Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tidak ada realisasi Beban Penyusutan Aset Lainnya Kabupaten Rembang 31 Desember 2018.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

6) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Realisasi Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp637.357.488,84 menurun sebesar Rp19.279.230,45 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp656.636.719,29 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.4.33
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	637.357.488,84	656.636.719,29	(19.279.230,45)	(2,94)
	JUMLAH	637.357.488,84	656.636.719,29	(19.279.230,45)	(2,94)

h. Beban Penyisihan Piutang

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp921.992.197,66 menurun sebesar Rp1.445.753.594,19 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp2.367.745.791,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.34
Beban Penyisihan Piutang

NO	URAIAN	31 DES2018 (Rp)	31 DE 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	643.234.915,16	786.281.682,34	(143.046.767,18)	(18,19)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	111.117.157,86	52.313.326,50	58.803.831,36	112,41
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	121.967.961,12	78.186.721,01	43.781.240,11	56,00
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	18.934.198,91	1.425.032.598,50	(1.406.098.399,59)	(98,67)
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	26.737.964,61	0,00	26.737.964,61	0,00
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	25.931.463,50	(25.931.463,50)	(100,00)
	JUMLAH	921.992.197,66	2.367.745.791,85	(1.445.753.594,19)	(61,06)

i. Beban Lain-lain



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Realisasi Beban Lain-lain Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp934.024.680,36 meningkat sebesar Rp677.977.412,06 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp256.047.268,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.35
Beban Lain-lain

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Beban Lain-lain	934.024.680,36	256.047.268,30	677.977.412,06	264,79
	JUMLAH	934.024.680,36	256.047.268,30	677.977.412,06	264,79

Beban lain-lain tersebut adalah beban lain-lain atas pembagian laba penyertaan modal tahun anggaran 2018

j. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Tidak ada realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Rembang 31 Desember 2018.

k. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp10.765.819.900,00 meningkat sebesar Rp4.328.596.400,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp6.437.223.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.36
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	10.765.819.900,00	6.437.223.500,00	4.328.596.400,00	67,24
	JUMLAH	10.765.819.900,00	6.437.223.500,00	4.328.596.400,00	67,24

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya terdiri dari :

- Beban Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp8.449.970.000,00
- Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp2.315.849.900,00

l. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tidak ada realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Rembang 31 Desember 2018.

m. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp109.591.641.700,00 menurun sebesar Rp26.472.538.300,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp136.064.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.37
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	109.591.641.700,00	136.064.180.000,00	(26.472.538.300,00)	(19,46)
	JUMLAH	109.591.641.700,00	136.064.180.000,00	(26.472.538.300,00)	(19,46)

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp81.532.141.700,00
- Bantuan Keuangan Kepada Desa berupa sarana prasarana sebesar Rp28.059.500.000,00
- Pencatatan Pendapatan dan Beban Dana Desa dihapuskan dari LO

n. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp973.761.000,00 menurun sebesar Rp117.189.000,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp1.090.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.38
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	973.761.000,00	1.090.950.000,00	(117.189.000,00)	(10,74)
	JUMLAH	973.761.000,00	1.090.950.000,00	(117.189.000,00)	(10,74)

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya terdiri dari Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp973.761.000 dengan pembagian sebagai berikut :

- Untuk Partai Golongan Karya Kabupaten Rembang sebesar Rp78.205.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- Untuk Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang sebesar Rp209.763.000,00
 - Untuk Partai Amanat Nasional Kabupaten Rembang sebesar Rp57.701.000,00
 - Untuk Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Rembang sebesar Rp106.654.000,00
 - Untuk Partai Nasdem Kabupaten Rembang sebesar Rp85.129.000,00
 - Untuk Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rembang sebesar Rp63.010.000,00
 - Untuk Partai Hanura Kabupaten Rembang sebesar Rp52.277.000,00
 - Untuk Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Rembang sebesar Rp135.740.000,00
 - Untuk Partai Demokrat Kabupaten Rembang sebesar Rp185.282.000,00
- o. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus**
Tidak ada realisasi Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten Rembang 31 Desember 2018.
- 3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**
- Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit dari Operasi Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 adalah surplus sebesar Rp32.511.185.591,63.
- 4. KEGIATAN NON OPERASIONAL**
- a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO**
Tidak ada realisasi Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018.
 - b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO**
Tidak ada realisasi Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO Kabupaten Rembang TA 2018 dan TA 2017.
 - c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO**
Tidak ada realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018.
 - d. Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO**
Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO Kabupaten Rembang TA 2018 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.200.000,00 dibandingkan dengan TA 2017 sebesar Rp10.200.000,00.
 - e. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tidak ada realisasi Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018.

f. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 sebesar Rp27.525.789.938,17 meningkat sebesar Rp26.253.222.899,17 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp1.272.567.039 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.39
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5(3-4)	6
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	27.525.789.938,17	1.272.567.039,00	26.253.222.899,17	2.063,01
	JUMLAH	27.525.789.938,17	1.272.567.039,00	26.253.222.899,17	2.063,01

Defisit kegiatan non operasional lainnya merupakan defisit dari penghapusan aset tetap pada OPD :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp19.187.288.119,67 berupa :
 - Penghapusan gedung bangunan yang dirobohkan sesuai SK No.030/0164/2019 sebesar Rp7.706.322.405.
 - Penghapusan KIB B dan KIB E surat keputusan Pengelola Barang Milik Daerah No.030/0227/2019 sebesar Rp11.480.965.714,67
- b. Dinas Kesehatan sebesar Rp6.862.120.717,00 berupa :
 - Penghapusan bangunan tahun anggaran 2018 sebesar Rp3.960.515.393,00
 - Penghapusan atas bangunan tahun anggaran 2018 atas bangunan yang telah diusulkan penghapusan di tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.889.114.924,00
 - Penghapusan aset rusak berat 2018 sebesar Rp12.490.400,00
- c. RSUD dr.R.SOETRASNO (BLUD) sebesar Rp719.494.356,50 berupa :
 - Penghapusan aset gedung tempat kerja rusak berat sebesar Rp495.019.458,00
 - Penghapusan aset rusak berat sebesar Rp224.474.898,50



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.478.667,00 berupa penghapusan barang dengan kondisi rusak berat.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp479.167,00 berupa penghapusan barang dengan kondisi rusak berat.
- f. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp18.333,00 berupa penghapusan barang rusak berat berupa laptop, printer dan lemari kayu.
- g. Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp1.691.666,00 berupa penghapusan barang rusak berat tahun 2015 dan 2016.
- h. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp947.917,00 berupa penghapusan barang rusak berat dengan SK Bupati No.030/1679/2018.
- i. Dinas Perhubungan sebesar Rp379.073.580,00 berupa penghapusan barang rusak berat dengan SK Bupati No.030/1679/2018.
- j. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp317.500,00 berupa penghapusan barang rusak berat dengan SK Bupati No.030/1679/2018.
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp54.766.666,00 berupa penghapusan barang rusak berat tahun 2015.
- l. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp187.578.653,00 berupa :
 - Mutasi ke Pengelola untuk dihapuskan aset tetap yang rusak berat sesuai SK Bupati No.030/1679/2018 sebesar Rp1.317.187,00
 - Penghapusan aset lainnya dari gedung bangunan pasar lasem, pasar sulang, pasar jolotundo karena dibangun kembali pengakuan defisit penghapusan sebesar Rp186.261.466,00
- m. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp5.522.010,00 berupa
 - Penghapusan aset ruang bupati tahun anggaran 2018 sesuai SK Bupati No.030/0418/2018 sebesar Rp260.000,00
 - Penghapusan aset ruang wakil bupati berdasarkan SK Bupati No.030/0418/2018 sebesar Rp5.262.010,00
- n. Sekretariat Daerah sebesar Rp30.201.667,00 berupa :
 - Penghapusan gedung bangunan sesuai SK Bupati No.030/0403/2018 sebesar Rp13.228.033,00
 - Penghapusan aset berdasarkan SK No.030/0409/2018 sebesar Rp13.616.666,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- Penghapusan aset berdasarkan SK No.030/0418/2018 sebesar Rp3.356.968,00
- o. Sekretariat DPRD sebesar Rp2.451.920,00 berupa penghapusan aset rusak berat sesuai SK Bupati No. 030/1679/2018
- p. Kecamatan Rembang sebesar Rp9.222.825,00 berupa penghapusan aset rusak berat tahun 2018
- q. Kecamatan Kaliori sebesar Rp100.000,00 berupa penghapusan aset rusak berat tahun 2018
- r. Kecamatan Sumber sebesar Rp 6.598.333,00 berupa penghapusan aset rusak berat tahun 2018.
- s. Kecamatan Gunem sebesar Rp1.395.811,00 berupa penghapusan aset rusak berat tahun 2018.
- t. Kecamatan Kragan sebesar Rp998.250,00 berupa penghapusan aset rusak berat sesuai dengan SK Bupati No.030/1679/2018.
- u. Kecamatan Sedan sebesar Rp6.250,00 berupa penghapusan aset rusak berat sesuai dengan SK No.030/1679/2018.
- v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp41.667,00 berupa penghapusan aset rusak berat sesuai dengan SK No.030/1679/2018.
- w. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.777.415,00 berupa penghapusan aset rusak berat sesuai dengan SK No.030/1679/2018.
- x. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) sebesar Rp63.218.448,00 berupa :
 - Penghapusan aset rusak berat oleh pengelola sesuai SK No.030/1679/2018 sebesar Rp2.721.905.
 - Penghapusan aset lainnya berupa peta topografi dan mengakui defisit penghapusan aset lainnya sebesar Rp37.250.000,00
 - Penghapusan aset lainnya dan mengakui defisit sebesar Rp23.246.543,00

5. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Realisasi Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 yaitu Defisit sebesar Rp27.525.789.938,17.

6. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit operasi dan kegiatan non operasional. Realisasi Surplus/Defisit



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Sebelum Pos Luar Biasa Kabupaten Rembang 31 Desember 2018 adalah surplus sebesar Rp4.985.395.653,46.

7. POS LUAR BIASA

Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

a. Pendapatan Luar Biasa – LO

Tidak ada realisasi Pendapatan Luar Biasa – LO Kabupaten Rembang 31 Desember 2018.

b. Beban Luar Biasa

Tidak ada realisasi Beban Luar Biasa Kabupaten Rembang 31 Desember 2018.

8. SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/defisit – LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit – LO Kabupaten Rembang sampai dengan 31 Desember 2018 adalah surplus sebesar Rp4.985.395.653,46.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Rembang selama tahun 2018 dan tahun 2017. Pelaporan arus kas memberikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

Penyajian laporan arus kas Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 mencakup penerimaan dan pengeluaran kas dari BLUD dan Dana BOS.

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Aliran kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi selama Tahun 2018 senilai Rp1.785.742.007.230,15 naik senilai Rp63.688.056.362,11 TA 2017 senilai Rp1.722.053.950.868,04. Kenaikan arus masuk kas dari aktivitas operasi diantaranya karena adanya kenaikan yang cukup besar dibandingkan TA 2017 pada pendapatan pajak daerah naik sebesar 68,14% dan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan Perbankan naik sebesar 103,80%. Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari:

Tabel 5.5.1
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		2018	2017
		(Rp)	(Rp)
a.	Penerimaan Pajak Daerah	100.438.352.553,00	59.734.946.872,00
b.	Penerimaan Retribusi Daerah	21.441.522.432,00	20.711.106.139,00
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.775.303.058,00	9.212.738.532,00
d.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.852.190.220,15	210.461.535.102,04
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	20.192.268.635,00	28.022.881.056,00
f.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	20.819.418.859,00	17.340.981.751,00
g.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	771.584.367.000,00	771.584.367.000,00
h.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	89.575.324.617,00	110.696.901.708,00
i.	Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	398.053.997.887,00	375.414.444.034,00
j.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105.216.144.949,00	92.803.709.000,00
k.	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26.825.167.000,00	24.358.539.000,00
l.	Penerimaan Hibah	56.967.950.020,00	1.711.800.674,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.785.742.007.230,15	1.722.053.950.868,04

Arus masuk kas dari aktivitas operasi diatas meliputi pendapatan operasi tahun anggaran 2018 yang telah disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, tidak termasuk kas di bendahara penerimaan SKPD senilai Rp68.000,00 yang sampai tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke kas daerah. Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp68.000,00 merupakan kas di bendahara penerimaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang terdiri dari pendapatan pelayanan pasar sebesar Rp23.000,00 serta pendapatan pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp45.000,00.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Arus keluar kas dari aktivitas operasi selama Tahun 2018 senilai Rp1.505.213.756.319,36 naik senilai Rp29.896.229.288,36 dibandingkan TA 2017 senilai Rp1.475.317.527.031,00. Pada Tahun Anggaran 2018 sebagian besar komponen belanja meningkat dibandingkan Tahun Anggaran 2017. Pada Tahun 2018 juga terdapat belanja bunga sebesar Rp1.468.870.443,00 yang merupakan bunga atas pinjaman pada Bank Jateng. Sedangkan untuk belanja tak terduga untuk Tahun Anggaran 2018 tidak ada realisasi.

Tabel 5.5.2
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		2018	2017
		(Rp)	(Rp)
a.	Belanja Pegawai	825.667.808.529,16	797.129.312.468,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	263.637.636.747,20	250.388.658.063,00
c.	Belanja Bunga	1.468.870.443,00	0,00
d.	Belanja Hibah	55.764.388.000,00	46.450.880.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial	8.333.700.000,00	8.927.000.000,00
f.	Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	339.575.532.700,00	365.168.845.000,00
g.	Belanja Tak Terduga	0,00	815.608.000,00
h.	Belanja Bagi Hasil Pajak	8.449.970.000,00	3.735.350.000,00
i.	Belanja Bagi Hasil Retribusi	2.315.849.900,00	2.701.873.500,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.505.213.756.319,36	1.475.317.527.031,00

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2018 senilai Rp280.528.250.910,79 merupakan selisih dari arus masuk kas dari aktivitas operasi senilai Rp1.785.742.007.230,15 dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi senilai Rp1.505.213.756.319,36. Arus kas bersih aktivitas operasi surplus senilai Rp280.528.250.910,79 berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang mampu dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2018 senilai Rp280.528.250.910,79 mengalami kenaikan senilai Rp 33.791.827.073,75 dibandingkan TA 2017 senilai Rp246.736.423.837,04.

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Arus masuk kas dari aktivitas investasi selama tahun 2018 berasal dari hasil penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai senilai Rp53.500.000,00 dan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebesar Rp115.500.000,00. Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai senilai Rp53.500.000,00 merupakan hasil penjualan barang inventaris daerah kondisi rusak berat pada sekretariat daerah sebesar Rp19.000.000,00 dan hasil penjualan barang inventaris kondisi rusak berat pada OPD sebesar Rp34.500.000,00. Sedangkan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebesar Rp115.500.000,00 terdiri dari hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan Pengguna Dinas Kesehatan Rp65.500.000,00; Hasil Penjualan bahan-bahan bekas bangunan Eks. Ps. Lasem, Jolotundo, Sulang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp22.500.000,00 serta hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan pada RSUD dr Soetrasno sebesar Rp27.500.000,00. Arus masuk kas dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan senilai Rp11.000.000,00 dibandingkan TA 2017 senilai Rp180.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.3
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		2018	2017
		(Rp)	(Rp)
a.	Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	53.500.000,00	0,00
b.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	115.500.000,00	180.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		169.000.000,00	180.000.000,00

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi selama tahun 2018 senilai Rp309.448.505.895,00 turun senilai Rp44.322.208.172,22 dibandingkan TA 2017 senilai Rp353.770.714.067,22. Seluruh nilai pengeluaran dari aktivitas investasi merupakan pembelian aset tetap, dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.5.4
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		2018	2017
		(Rp)	(Rp)
a.	Perolehan Tanah	7.406.104.110,00	528.142.667,00
b.	Perolehan Peralatan dan Mesin	46.462.284.728,00	64.631.248.279,22
c.	Perolehan Bangunan dan Gedung	94.860.823.159,00	104.140.195.865,00
d.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	152.529.881.164,00	173.930.573.900,00
e.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.189.412.734,00	10.540.553.356,00
Jumlah Arus Kas Keluar		309.448.505.895,00	353.770.714.067,22

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2018 defisit senilai Rp309.279.505.895,00 yaitu selisih



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

antara arus kas masuk senilai Rp169.000.000,00 dengan arus keluar kas senilai Rp309.448.505.895,00 naik senilai Rp44.311.208.172,22 dari defisit tahun 2017 senilai Rp353.590.714.067,22.

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus masuk kas untuk aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Rembang selama Tahun 2018 tidak ada sedangkan Realisasi Tahun 2017 sebesar Rp17.729.980.680,00.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Rembang selama Tahun 2018 senilai Rp12.717.627.920,00 naik senilai Rp4.489.238.770,00 dibandingkan TA 2017 senilai Rp8.228.389.150,00. Arus kas keluar dari Aktivitas Pembiayaan digunakan untuk:

Tabel 5.5.5

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan		2018	2017
		(Rp)	(Rp)
a.	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	10.422.000.000,00	8.189.000.000,00
b.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	2.256.548.000,00	0,00
c.	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	39.389.150,00
d.	Restitusi	39.079.920,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		12.717.627.920,00	8.228.389.150,00

Penyertaan modal (Investasi) senilai Rp10.422.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal pada PT. Bank Jateng Cabang Rembang senilai Rp8.422.000.000,00, PDAM Kabupaten Rembang senilai Rp1.000.000.000,00, dan PT Rembang Migas Energi senilai Rp1.000.000.000,00. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan untuk pembayaran pokok pinjaman senilai Rp2.256.548.000,00 merupakan pembayaran pinjaman pada Bank Jateng, sedangkan arus kas keluar sebesar Rp39.079.920,00 merupakan restitusi atas Pajak Air Bawah Tanah ke PDAM Kabupaten Rembang.

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Tahun Anggaran 2018 mengalami defisit senilai Rp12.717.627.920,00. Arus Kas bersih dari aktivitas pembiayaan mengalami penurunan senilai Rp22.219.219.450,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2017 yang surplus senilai Rp9.501.591.530,00.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Termasuk PFK antara lain Pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada Pihak Ketiga yang berhak. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris selama Tahun Anggaran 2018 senilai Rp107.128.766.435,00 mengalami penurunan senilai Rp1.455.167.234,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp108.583.933.669,00. Rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.6
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		2018	2017
		(Rp)	(Rp)
a.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BUD:		
	Iuran Wajib Pegawai	31.829.043.199,00	33.031.106.729,00
	Taperum	621.920.000,00	652.593.000,00
	Asuransi Kesehatan	9.816.232.393,00	10.123.165.225,00
	Pajak Penghasilan Ps.21	29.593.929.619,00	26.387.006.470,00
	Pajak Penghasilan Ps 22	892.255.456,00	781.389.042,00
	Pajak Penghasilan Ps 23	248.385.918,00	332.181.105,00
	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	5.146.075.058,00	5.855.794.256,00
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26.967.722.621,00	29.772.576.153,00
	Lainnya		3.814.636,00
	Asuransi Kecelakaan Kerja	702.805.230,00	728.521.576,00
	Asuransi Kematian	882.973.079,00	910.653.547,00
b.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran		
	Pajak Penghasilan Ps 22	1.302.419,00	33.000,00
	Pajak Penghasilan Ps 23	1.815.177,00	2.031.087,00
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	5.301.735,00	99.273,00
c.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di kas Bendahara BOS		
	Pajak Penghasilan Ps.21	106.869.158,00	0,00
	Pajak Penghasilan Ps 22	2.112.088,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		2018	2017
		(Rp)	(Rp)
	Pajak Penghasilan Ps 23	75.224.743,00	0,00
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	135.840.380,00	0,00
d.	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	80.000.000,00	388.570,00
e.	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	18.958.162,00	2.580.000,00
f.	Saldo Sisa UP Tahun Lalu	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		107.128.766.435,00	108.583.933.669,00

Penerimaan Perhitungan Fihak ketiga senilai Rp107.029.808.273,00 terdiri dari iuran yang dipotong langsung dalam pembayaran gaji PNS senilai Rp106.701.342.573,00, penerimaan PFK TA 2018 di bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah senilai Rp8.419.331,00 serta penerimaan PFK TA 2018 di kas bendahara BOS yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetorkan sebesar Rp320.046.369,00. Penerimaan sisa kas bendahara pengeluaran tahun lalu senilai Rp80.000.000,00 merupakan kas bendahara pengeluaran TA 2107 pada dinas Kesehatan yang disetor ke kas daerah tanggal 19 Maret 2018. Sedangkan Penerimaan sisa kas bendahara penerimaan tahun lalu senilai Rp18.958.162,00 merupakan setoran kas di bendahara penerimaan TA 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp9.414.462,00 dari Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan kas di bendahara penerimaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp9.543.700,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp1.962.500,00; Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp6.571.200,00 serta Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Rp1.010.000 yang disetor ke kas daerah tanggal 2 Januari 2018.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris selama tahun 2018 senilai Rp106.987.236.527,00 mengalami penurunan senilai Rp2.054.449.000,00 dibandingkan TA 2017 senilai Rp109.041.685.527,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.7
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		2018	2017
		(Rp)	(Rp)
a.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BUD:		
	luran Wajib Pegawai	31.829.043.199,00	33.031.106.729,00
	Taperum	621.920.000,00	652.593.000,00
	Asuransi Kesehatan	9.816.232.393,00	10.123.165.225,00
	Pajak Penghasilan Pasal 21	29.593.929.619,00	26.387.006.470,00
	Pajak Penghasilan Ps 22	892.255.456,00	781.389.042,00
	Pajak Penghasilan Ps 23	248.385.918,00	332.181.105,00
	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	5.146.075.058,00	5.855.794.256,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		2018	2017
		(Rp)	(Rp)
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26.967.722.621,00	29.772.576.153,00
	Lainnya	0,00	3.814.636,00
	Asuransi Kecelakaan Kerja	702.805.230,00	728.521.576,00
	Asuransi Kematian	882.973.079,00	910.653.547,00
b.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	276.864.623,00	80.000.000,00
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	9.029.331,00	2.163.360,00
d.	Koreksi Silpa	0,00	380.720.428,00
Jumlah Arus Kas Keluar		106.987.236.527,00	109.041.685.527,00

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris terdiri dari pengeluaran PFK di BUD senilai Rp106.701.342.573,00; pajak yang belum disetor senilai Rp8.419.331,00 pada Sekretariat Daerah dan kas dibendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan sebesar Rp610.000; Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sebesar Rp276.864.623,00 merupakan kas di bendahara pengeluaran TA 2018 di Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan sebagai tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara berdasar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang telah direklas ke aset lainnya-tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus keluar kas dari aktivitas transitoris. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Tahun Anggaran 2018 surplus senilai Rp141.529.908,00, yaitu selisih antara arus kas masuk senilai Rp107.128.766.435,00 dengan arus kas keluar senilai Rp106.987.236.527,00. Arus kas bersih tersebut mengalami kenaikan senilai Rp599.281.766,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2017 yang defisit senilai Rp457.751.858,00.

5. SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2018 senilai Rp75.744.231.617,19 terdiri dari:

Kas di BUD, BOS dan BLUD

Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

a. Aktivitas Operasi	Rp	280.528.250.910,79
b. Aktivitas Investasi	Rp	(309.279.505.895,00)
c. Aktivitas Pendanaan	Rp	(12.717.627.920,00)
d. Aktivitas Transitoris	Rp	141.529.908,00

JUMLAH Rp (41.327.352.996,21)

Saldo Awal Kas di BUD, BOS dan BLUD Rp 117.062.487.282,40

Saldo Akhir Kas di BUD, BOS dan BLUD (a)(TA2018) Rp 75.735.134.286,19

Kas di Bendahara Penerimaan (b)(TA2018) Rp 68.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran (c)(TA2018) Rp 9.029.331,00

Saldo Akhir Kas **Rp** 75.744.231.617,19



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Adapun Rekapitulasi saldo kas akhir TA 2018 senilai Rp75.744.231.617,19 sebagai berikut ini.

Tabel 5.5.8
Rekapitulasi Saldo Akhir per 31 Desember 2018

Uraian	Saldo Kas (Rp)		Kenaikan/ (Penurunan) Rp
	2018	2017	
a. Kas BUD	70.792.775.013,57	100.720.810.818,57	(29.928.035.805,00)
Bank Jateng Cabang Rembang	5.744.141.473,57	3.041.750.990,00	2.702.390.483,57
BRI Cabang Rembang	48.633.540,00	2.679.059.828,57	(2.630.426.288,57)
Deposito Bank Jateng.	65.000.000.000,00.	55.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito BRI	0,00	30.000.000.000,00	(30.000.000.000,00)
Deposito BNI	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)
b. Kas di Bendahara Penerimaan	68.000,00	18.958.162,00	(18.890.162,00)
Dinindagkop & UMKM	68.000,00	9.543.700,00	(9.475.700,00)
Dinas Kelautan	0,00	9.414.462,00	(9.414.462,00)
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	9.029.331,00	82.163.360,00	(73.134.029,00)
Dinas Kesehatan	610.000,00	80.000.000,00	(79.390.000,00)
Sekretariat Daerah	8.419.331,00	2.163.360,00	6.255.971,00
d. Kas di BLUD	3.635.712.861,62	13.597.048.661,83	(9.961.335.800,21)
RSUD	210.968.392,04	1.107.793.063,25	(896.824.671,21)
Puskesmas	3.424.744.469,58	12.489.255.598,58	(9.064.511.129,00)
e. Kas di Bendahara BOS	1.306.646.411,00	2.744.627.802,00	(1.437.981.391,00)
Jumlah	75.744.231.617,19	117.163.608.804,40	(41.419.377.187,21)

Saldo kas di bendahara BOS TA 2018 sebesar Rp1.306.646.411,00 merupakan sisa kas dari penghematan belanja sebesar Rp981.714.462,00; Jasa Giro yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.885.580,00; serta Pajak yang terutang sebesar Rp320.046.369,00.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar.

Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas sebesar Rp1.660.965.926.286,16 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2017 setelah neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

2. Surplus/defisit – LO tahun anggaran 2018 sebesar Rp4.985.395.653,46 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca bila nilai surplus dan mengurangi nilai ekuitas pada Neraca bila nilai defisit.
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, antara lain :

Tabel 5.6.1
Koreksi Ekuitas

No	Uraian	Nilai (Rp)
a	Koreksi Nilai Persediaan	(50.898.000,00)
b	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
c	Koreksi Kas	0,00
d	Koreksi Piutang	(5.055.106,00)
e	Koreksi Penyisihan Piutang	1.591.091,00
f	Koreksi Aset Tetap	122.571.793.297,38
g	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	241.823.057.880,82
h	Koreksi Investasi Jangka Panjang	(3.586.054.705,63)
i	Koreksi Aset Lainnya	(2.354.836.640,00)
j	Koreksi Amortisasi Aset Lainnya	-
k	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	1.015.565.793,00
l	Koreksi Kewajiban Jangka Panjang	-
m	Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap SKPD	-
n	Koreksi Ekuitas Mutasi Persediaan SKPD	-
o	Koreksi Ekuitas lainnya	-
Jumlah		359.415.163.610,57

Koreksi ekuitas merupakan koreksi ekuitas dari:

- a. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan sebesar Rp(50.898.000,00) merupakan koreksi nilai pada TA 2018 pada Dinas Kelautan dan perikanan, dengan rincian berikut ini.

Tabel 5.6.2
Koreksi Nilai Persediaan

No	Dinas	Koreksi Persediaan	Keterangan
1.	Dinlutkan	(42.625.000,00)	Reklas ke aset tetap
		9.100.000,00	Penambahan bibit ikan hasil pengembangbiakan
		(15.423.000,00)	Bibit ikan yang mati
		(1.950.000,00)	Indukan yang tidak produktif
Jumlah		(50.898.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

b. Koreksi Piutang

Koreksi piutang sebesar Rp(5.055.106,00) merupakan koreksi saldo piutang awal TA 2018 pada OPD berikut ini.

1. Koreksi piutang RSUD dr. R. Soetrasno atas penyesuaian piutang jasa rahanra Desember 2017 an. Ny. Ni'mah Dwijayanti Rp1.275.735,00; bapak Suyanto Rp500,00; Ny. Endang Sri Wahyuni Rp2.305.764,00 dan bapak Abdullah Rp678.707,00.

Tabel 5.6.3
Koreksi Piutang RSUD dr. R. Soetrasno

No	Nama	Tercatat	Realisasi	Selisih
1	Ni'mah Dwi Jayanti	2.520.585,00	1.244.850,00	(1.275.735,00)
2	Suyanto	8.062.948,00	8.062.448,00	(500,00)
3	Endang Sri Wahyuni	2.305.764,00	0,00	(2.305.764,00)
4	Abdullah	1.678.707,00	1.000.000,00	(678.707,00)
Jumlah		14.568.004,00	10.307.298,00	(4.260.706,00)

2. Koreksi piutang pada Puskesmas Kragan II, Puskesmas Lasem, Puskesmas Rembang I merupakan penyesuaian piutang atas konfirmasi dari BPJS terhadap data umpan balik No 293/VI.II/2019.

Tabel 5.6.4
Koreksi Piutang Puskesmas

No	Nama	Tercatat	Realisasi	Selisih
1	Puskesmas Rembang I	27.555.000,00	27.510.000,00	(45.000,00)
2	Puskesmas Lasem	64.170.000,00	64.665.000,00	495.000,00
3	Puskesmas Kragan II	73.712.000,00	73.412.600,00	(299.400,00)
Jumlah		165.437.000,00	165.587.600,00	150.600,00

3. Koreksi debit piutang pada Dinas Perhubungan sebesar Rp945.000,00 merupakan piutang retribusi pada Koperasi Windusari yang telah terbayar di tahun 2009 namun belum terkurangi pada catatan Dinas Perhubungan.

c. Koreksi Penyisihan Piutang



Koreksi penyisihan piutang Rp1.591.091,00 merupakan koreksi penyisihan piutang TA 2018 yang terdapat pada OPD berikut ini.

1. Koreksi penyisihan piutang Puskesmas Kragan I Rp100,00 karena salah penghitungan di TA 2017 yang seharusnya Rp78.875,00 tercatat Rp78.775,00. Koreksi piutang pada Puskesmas Sumber, Puskesmas Kragan II, Puskesmas Lasem, dan Puskesmas Rembang I karena penyesuaian piutang atas konfirmasi dari BPJS terhadap data umpan balik. Koreksi penyisihan piutang pada Puskesmas Pamotan sebesar Rp404.475,00 karena penyisihan piutang TA 2018 lebih kecil dari penyisihan piutang TA 2017. Penyisihan piutang TA 2017 Rp887.225,00 sedangkan TA 2018 Rp482.750,00
2. Koreksi penyisihan piutang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp350.000,00 karena penyisihan piutang TA 2018 lebih kecil dari penyisihan piutang TA 2017, penyisihan piutang 2017 sebesar Rp3.500.000,00 sedangkan TA 2018 sebesar Rp3.150.000,00.

Tabel 5.6.5
Koreksi Penyisihan Piutang

NO	NAMA	KOREKSI DEBET	KOREKSI KREDIT
1	PUSKESMAS KRAGAN 1	100,00	-
2	PUSKESMAS SUMBER	-	703.825,00
3	PUSKDESMAS KRAGAN II	-	17.866,00
4	PUSKESMAS PAMOTAN	-	404.475,00
5	PUSKESMAS LASEM	2.475,00	117.275,00
6	DINAS PARIWISATA	-	350.000,00
7	PUSKESMAS REMBANG I	-	225,00
JUMLAH		2.575,00	1.593.666,00

d. Koreksi Aset Tetap

Koreksi aset tetap TA 2018 sebesar Rp122.571.793.297,38 merupakan penyesuaian dari mutasi antar OPD serta adanya koreksi aset tetap, daftar terlampir. Koreksi aset tetap TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp138.390.108.404,38 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar (Rp15.818.315.107,00).

e. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap TA 2018 sebesar Rp241.823.057.880,82 merupakan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2018 dan mutasi. Koreksi akumulasi penyusutan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp547.714.516.751,89 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar (Rp305.891.458.871,07). Penambahan dan pengurangan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap daftar terlampir.

f. Koreksi Investasi Jangka Panjang

Koreksi investasi jangka panjang sebesar Rp(3.586.054.705,63) merupakan koreksi investasi non permanen Rp682.268.857,00 dan koreksi investasi permanen Rp2.903.785.848,63.

Koreksi investasi permanen sebesar Rp2.903.785.848,63 terdiri dari :

1	Penyesuaian perhitungan investasi permanen antara metode biaya dan metode ekuitas	Rp	1.635.671.979,66
2	Penyesuaian nilai restitusi pajak air permukaan PDAM	Rp	(39.079.920,00)
3	Penyesuaian atas penerimaan bagian laba BUMD	Rp	(4.936.767.463,19)
4	Penyesuaian atas beban laba BUMD	Rp	436.389.554,90
	Jumlah	Rp	(2.903.785.848,63)

g. Koreksi Aset Lainnya

Koreksi aset lainnya sebesar Rp(2.354.836.640,00) merupakan koreksi aset lainnya TA 2018 pada OPD berikut ini.

Tabel 5.6.6
Koreksi Aset Lainnya

NO	NAMA OPD	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Penyesuaian koreksi atas aset SMA BOS 2016 karena telah tercatat di aset Provinsi	(1.811.716.640,00)
2	Dinas Kesehatan	Koreksi penghapusan aset lain-lain Dinas Kesehatan (Tanah milik desa Rp455.710.000 dan telah tercatat di Indagkop Rp1.410.000) berdasar SK Pengelola No 030/0283/2018)	(457.120.000,00)
		Masterplan Puskesmas Sarang II yang telah selesai pengerjaannya	(39.500.000,00)
		Masterplan Puskesmas Rembang II yang telah selesai pengerjaannya	(46.500.000,00)
		JUMLAH	(2.354.836.640,00)

h. Koreksi Kewajiban Jangka Pendek



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Koreksi kewajiban jangka pendek sebesar Rp1.015.565.793,00 adalah koreksi hutang kepada pihak ketiga pada RSUD dr. R. Soetrasno BLUD terdiri dari koreksi kurang pada belanja pegawai Rp446.794.343,00 dan koreksi tambah pada belanja barang dan jasa Rp1.462.360.136,00 yang merupakan koreksi atas utang kepada pihak ketiga TA 2017.

4. Ekuitas Akhir.

Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp2.025.366.485.550,19 merupakan Surplus/defisit-LO dikurangi ekuitas awal dan koreksi-koreksi lainnya. Saldo Ekuitas Akhir ini merupakan Ekuitas Akhir Neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2018.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. GAMBARAN UMUM

1. LETAK ASTRONOMIS DAN KONDISI GEOGRAFI

Secara Astronomis, Kabupaten Rembang terletak pada garis koordinat berada pada 111°00' - 111°30' Bujur Timur dan 6°30' - 7°06' Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 101,408 ha yang dibatasi Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara disebelah selatan, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter diatas permukaan air laut. Adapun batas-batas wilayahnya adalah :

Utara	:	Laut Jawa
Selatan	:	Kabupaten Blora
Barat	:	Kabupaten Pati



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Utara : Laut Jawa
Timur : Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur

Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur yaitu Kecamatan Sarang memiliki kode telepon yang sama dengan Kabupaten Tuban (Jawa Timur). Bagian Selatan Wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara dengan puncaknya Gunung Butak (ketinggian 679 mdpl). Sebagian wilayah Utara terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 mdpl). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak dan Cagar Alam Gunung Lasem.

Secara administratif Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah \pm 101.408 Ha yang dibagi menjadi 14 Wilayah Kecamatan, yang terdiri dari 287 Desa dan 7 kelurahan. Nama, luas wilayah dan pembagian wilayah administratif desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Gambaran Wilayah per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Total Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Kecamatan Sumber	7.673	18
2.	Kecamatan Bulu	10.240	16
3.	Kecamatan Gunem	8.020	16
4.	Kecamatan Sale	10.714	15
5.	Kecamatan Sarang	9.133	23
6.	Kecamatan Sedan	7.964	21
7.	Kecamatan Pamotan	8.156	23
8.	Kecamatan Sulang	8.454	21
9.	Kecamatan Kaliori	6.150	23
10.	Kecamatan Rembang	5.881	34
11.	Kecamatan Pancur	4.594	23
12.	Kecamatan Kragan	6.166	27
13.	Kecamatan Sluke	3.759	14
14.	Kecamatan Lasem	4.504	20
J U M L A H		101.408	294

2. KONDISI PEREKONOMIAN

Kabupaten Rembang yang berada diperlintasan jalur transportasi darat antarkota dan antar provinsi memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sejumlah potensi yang ada. Saat ini Kabupaten Rembang mengalami kemajuan yang cepat dan berhasil lepas dari predikat daerah tertinggal, bahkan berbagai mega proyek telah dibangun di wilayah Kabupaten Rembang, diantaranya untuk mencukupi kebutuhan air telah dibangun embung-embung besar seperti embung lodan, embung panohan dan embung-embung kecil lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Kemajuan Rembang dipastikan masih bisa ditingkatkan, menyusul mulai beroperasinya berbagai mega proyek yang ada di Kabupaten Rembang, seperti Pabrik Semen dan sebelumnya juga telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sluke dengan kapasitas 2.000 megawatt yang akan terkoneksi pada jaringan listrik di Pulau Jawa dan Bali.

Selain itu Rembang juga akan memiliki Pelabuhan Umum Nasional (PUN) di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke, yang saat ini proses pembangunannya masih terus berlangsung. Pelabuhan tersebut sempat dilakukan uji coba dengan melibatkan satu unit kapal tongkang yang berkapasitas 3.000 ton untuk mengangkut hasil tambang berupa batu kapur untuk dikirimkan ke pelabuhan PLTU Tanjung Jati B Jepara. Pelabuhan tersebut diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, menyusul pelabuhan tersebut akan dimanfaatkan untuk masuk-keluar kapal barang berbobot mati 30-40 gross tonnage.

Kabupaten Rembang memiliki potensi galian tambang seperti pasir kuarsa, pospat, batu gamping, dolomit, kalsit, andesit, tras. Lignit, tanah liat, ball clay dan gipsum. Sejumlah galian tambang tersebut biasanya dipakai untuk berbagai keperluan industri seperti pasir kuarsa untuk bahan dasar keramik, gelas/kaca, semen dan industri lain (cat, karet, gerinda, logam dan bata tahan api), demikian pula pospat yang digunakan oleh industri pupuk dan industri kimia lain seperti detergen dan asam fosfat. Potensi galian tambang tersebut sangat menarik investor untuk mendirikan pabrik semen di Kabupaten Rembang, diantaranya PT. Semen Indonesia. Bahkan perusahaan tersebut telah selesai dibangun dan saat ini telah beroperasi secara penuh.

Potensi Pertanian dan Peternakan yang dimiliki Kabupaten Rembang juga tidak kalah dengan daerah lain, seperti komoditas tanaman pangan yang potensial dikembangkan menjadi sebuah usaha agrobisnis unggulan di Kabupaten Rembang adalah komoditas Jagung dan Kacang tanah. Sedangkan komoditas tanaman sayur-sayuran yang menjadi unggulan yakni tanaman cabai merah varietas tamparyang merupakan plasma nuftah asli Rembang dan memiliki karakteristik rasa pedas, buah tidak mudah busuk, warna merah cerah dan produktivitasnya mencapai 11,25 ton/ha serta harganya cukup bersaing di pasaran. Produktivitasnya masih bisa dikembangkan dan bisa dijadikan daya tarik investasi karena sentra produksi cabai merah tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Sarang, Kragan, Sulang, Sale, Kaliiori dan Sumber.

Komoditas Peternakan yang menjadi unggulan Kabupaten Rembang yaitu sapi dan domba. Bahkan Kabupaten Rembang merupakan salah satu sentra produksi sapi potong di Jawa Tengah, menyusul populasi sapi potong pada tahun 2005 mencapai 97.257 ekor dan menempati urutan keempat di Jawa Tengah. Kegiatan budidaya sapi potong meliputi usah pembibitan (*breeding*) dan penggemukan (*Fattening*), adapun jenis sapi yang ada adalah sapi ongole, brahman, Simmental, limousine dan brangus.

Selain itu juga ada kegiatan inseminasi buatan (*Artificial Insemination*) pada sapi semakin memberikan jaminan akan adanya ketersediaan sapi bibit dan sapi



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

bakalan yang berkualitas genetic unggul. Dari sisi pemasaran, permintaan sapi potong terus mengalami peningkatan baik pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Di bidang Perikanan, Kabupaten Rembang juga tidak kalah dengan daerah pesisir lainnya. Berdasarkan hasil pendataan Pemerintah Kabupaten Rembang, omzet perikanan yang terdeteksi setiap tahunnya antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Omzet tersebut masih bisa ditingkatkan lagi, mengingat potensi perikanan di Kabupaten Rembang cukup besar dan belum tergarap secara menyeluruh. Jika pengembangan sektor perikanan dipacu, maka omzet perikanan bisa mencapai hingga Rp 3 miliar pertahun. Apalagi hampir separuh penduduk Kabupaten Rembang menggantungkan hidupnya pada sektor usaha di bidang perikanan dan kelautan.

Pengembangan sektor usaha perikanan juga didukung akses transportasi yang cukup memadai, karena Rembang menjadi jalur perlintasan antar provinsi. Untuk mendukung pengembangan sektor perikanan, Pemerintah Kabupaten Rembang juga telah menyiapkan sentra perikanan dan kelautan di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang. Yang telah dilengkapi dengan fasilitas stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) dan *coolstorage* (ruang berpendingin).

Potensi di bidang Pariwisata juga cukup menarik untuk dikunjungi karena beberapa objek wisata yang ada memiliki nilai sejarah cukup tinggi, seperti Makam RA. Kartini dan museum Kartini yang menyimpan sejumlah koleksi dan kebiasaan semasa hidup pejuang kaum perempuan RA. Kartini selama hidup bersama suaminya Raden Adipati Joyoningrat (Bupati Rembang). Sejarah perjuangan salah satu wali di Jawa juga bisa ditemukan di Kabupaten Rembang, yakni tempat pasujudan dan makam Sunan Bonang yang berada di Desa Bonang, Kecamatan Lasem serta objek wisata bersejarah lainnya maupun objek wisata alam untuk refreshing keluarga.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021 DAN VISI-MISI

RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, disusun untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder* pembangunan daerah (pemda, masyarakat dan swasta) dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah, sejalan dengan tujuan nasional dan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah, yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, saling melengkapi dalam satu kesatuan pola sikap serta pola tindak.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

RPJMD ini sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah dimana di dalamnya memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan prakiraan maju pendanaan.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan masing-masing urusan/sektor, penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 juga memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, antara lain: Strategi penanggulangan kemiskinan daerah, rencana pengembangan tenaga kerja daerah, rencana pemberdayaan perempuan, rencana pengembangan pariwisata dan rencana pengembangan kawasan bahari terpadu.

1. VISI DAN MISI

Visi dan Misi dari H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Rembang, adapun Visi dari Bupati terpilih adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan ”

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 seperti tersebut di atas, akan ditempuh melalui 7 (Tujuh) Misi Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat, tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

7. Meningkatkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

2. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), perlu disusun kembali organisasi perangkat daerah yang akan membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Organisasi perangkat daerah ini yang disusun berdasarkan peraturan daerah ini diharapkan akan menjadi organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kemampuan Kabupaten Rembang serta akan terbina koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan komunikasi kelembagaan, baik di tingkat daerah maupun dengan pemerintah pusat. Selain itu penyusunan organisasi perangkat daerah ini juga telah memperhatikan aspek keuangan, cakupan tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk dan sarana prasarana penunjang tugas. Berdasarkan pertimbangan di atas maka disusun Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah selaku Entitas Pelaporan, terdiri atas 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 21 Bidang Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 17 Dinas Daerah, 3 Badan Daerah, 3 perangkat daerah yang menanggapi urusan pemerintahan lain, Kantor Kesbangpol, BPPBD dan 14 Kecamatan sebagai Entitas Akuntansi. Sedangkan tiga lainnya bukan merupakan Entitas Akuntansi, yaitu DPRD yang diketuai oleh H. Majid Kamil MZ, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan terbentuknya organisasi pemerintah Kabupaten Rembang yang baru ini akan berimbas dalam siklus keuangan daerah yang tertuang dalam APBD mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaksanaan APBD serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rembang. Dalam pelaporan pertanggungjawaban APBD mulai Tahun Anggaran 2016, demikian pula dalam pelaporan tahun selanjutnya.

C. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Badan Layanan Umum Daerah bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 445/659/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka sejak tanggal 1 Januari 2010, Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) dengan status penuh. BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah dan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Fleksibilitas yang dimaksud adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Rembang dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan fleksibilitasnya, sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) karenanya, secara periodik tetap wajib menyampaikan laporan keuangannya ke Pemda Kabupaten Rembang, dan pada akhir Tahun Anggaran selain menyajikan Laporan Keuangan dalam basis Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) juga wajib menyajikan Laporan Keuangan dengan basis Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar kompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rembang.

Sedangkan untuk penerapan BLU pada UPT Puskesmas Se-Kabupaten Rembang sudah dimulai sejak tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Rembang sebagaimana berikut ini:

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI REMBANG
TENTANG PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK – BLUD) PADA UPT
PUSKESMAS SE-KAB. REMBANG**

NO	NAMA PUSKESMAS	NOMOR SK BUPATI REMBANG	KETERANGAN
----	----------------	-------------------------------	------------



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(1)	(2)	(3)	(4)
1	UPT PUSKESMAS REMBANG 1	900/0713/2015	Tgl. 02 Juli 2015
2	UPT PUSKESMAS REMBANG 2	900/0714/2015	Tgl. 02 Juli 2015
3	UPT PUSKESMAS SUMBER	900/0715/2015	Tgl. 02 Juli 2015
4	UPT PUSKESMAS KALIORI	900/0716/2015	Tgl. 02 Juli 2015
5	UPT PUSKESMAS SULANG	900/0717/2015	Tgl. 02 Juli 2015
6	UPT PUSKESMAS BULU	900/0718/2015	Tgl. 02 Juli 2015
7	UPT PUSKESMAS LASEM	900/0719/2015	Tgl. 02 Juli 2015
8	UPT PUSKESMAS PAMOTAN	900/0720/2015	Tgl. 02 Juli 2015
9	UPT PUSKESMAS PANCUR	900/0721/2015	Tgl. 02 Juli 2015
10	UPT PUSKESMAS SLUKE	900/0722/2015	Tgl. 02 Juli 2015
11	UPT PUSKESMAS KRAGAN I	900/0723/2015	Tgl. 02 Juli 2015
12	UPT PUSKESMAS KRAGAN II	900/0724/2015	Tgl. 02 Juli 2015
13	UPT PUSKESMAS GUNEM	900/0725/2015	Tgl. 02 Juli 2015
14	UPT PUSKESMAS SEDAN	900/0726/2015	Tgl. 02 Juli 2015
15	UPT PUSKESMAS SARANG	900/0727/2015	Tgl. 02 Juli 2015
16	UPT PUSKESMAS SALE	900/0728/2015	Tgl. 02 Juli 2015

D. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMKUDA)

Sejak Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Rembang mulai menerapkan sistem informasi berbasis komputerisasi yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengelolaan keuangan daerah yang berujung akurasi dalam penyajian Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam bentuk Pertanggungjawaban keuangan APBD.

Pemerintah Kabupaten Rembang bekerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (BPKP) dengan MoU Nomor 900/4219/2008, MoU-4819/PW11/3/2008 meliputi kegiatan-kegiatan Penyusunan Informasi Keuangan Daerah (SIMKUDA), Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Sinergi Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD, Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Kinerja Instansi Pemerintahan (SKIP), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pengawasan, Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peningkatan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat, Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan, Implementasi dan Pengembangan *Good Governance*, Peningkatan Pelayanan Publik dan *Fraud Control Plan* dalam rangka Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). MoU tersebut berlaku sampai dengan tiga tahun dan akan diperpanjang bila kedua belah pihak menghendakinya.



Pelaksanaan kesepakatan kerjasama tersebut dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam kegiatan-kegiatan khusus dengan perjanjian kerjasama yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rembang yang terkait. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Rembang telah melakukan kerjasama dengan BPKP berdasarkan MoU tersebut diatas untuk SIMKUDA dan SIMA. SIMKUDA dengan surat kerjasama nomor 900/612/2009, 02.4/PW11/3/2008 tentang Bimbingan teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Penerapan Program Aplikasi Komputer Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKUDA) Kab. Rembang, yang meliputi: penyusunan neraca, penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sosialisasi dan asistensi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan penerapan Program Aplikasi Komputer SIMKUDA pada Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang. Demikian juga kerjasama mengenai penataan aset daerah dengan Simda BMD masih berlangsung.

Pada Tahun 2011 kerjasama dengan BPKP propinsi Jawa Tengah telah selesai dan kerja sama ini dilanjutkan kembali ditandai dengan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Rembang dan Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor 900/0306/2012, Nomor MoU-481/PW 11/3/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah.

E. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD)

Melanjutkan pelaksanaan SIMKUDA, Pemerintah Kabupaten Rembang dengan membawa komitmen untuk menyelesaikan permasalahan inventarisasi Barang Milik Daerah yang masih belum valid dan sebagai upaya pelaksanaan *action plan* atas hasil audit BPK tentang aset Pemerintah Kabupaten Rembang, mulai menerapkan sistem informasi dan pengelolaan barang milik daerah dengan berbasis komputerisasi. Dengan harapan dapat meningkatkan mekanisme pencatatan, pengelolaan aset sehingga dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dapat tercapai akurasi data.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (BPKP) sebagai bentuk pendampingan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD.

F. DANA DESA

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ke rekening masing-masing desa se-Kabupaten Rembang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Pemerintah Kabupaten Rembang selanjutnya perlu menyusun dan menetapkan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang Tata Cara Penetapan, Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 dialokasikan berdasarkan pada alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten.

Adapun penetapan besaran dan realisasi pencairan Dana Desa di Kabupaten Rembang Tahun 2018 terlampir pada lampiran 5.3.

Dana Desa tersebut sudah 100% ditransfer ke rekening masing-masing desa se-Kabupaten Rembang melalui 3 (tiga) tahap pencairan yaitu Tahap pertama (I) 20% ditransfer mulai bulan Maret, April, Mei dan Juni 2018, kemudian Tahap kedua (II) 40% ditransfer pada bulan Mei dan Juni 2018 serta Tahap ketiga (III) 40% ditransfer pada bulan September, Oktober dan Nopember 2018.

BAB VII

P E N U T U P

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Rembang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk Tahun 2018. Catatan atas Laporan Keuangan

